

**IDEOLOGI SOSIALISME INDONESIA PERSPEKTIF
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(Studi pada Komite Pimpinan Wilayah PRD Lampung Tahun 2010 – 2015)**

(Skripsi)

Oleh :

M. SADDAM SOLIHIN SAPTA DWI CAHYO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

IDEOLOGI SOSIALISME INDONESIA PERSPEKTIF PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

(Studi pada Komite Pimpinan Wilayah PRD Lampung Tahun 2010 – 2015)

Oleh :

M. Saddam Solihin Sapta Dwi Cahyo

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif PRD, dan mengetahui praktik politik PRD dalam kerangka mewujudkan ideologinya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling* sekaligus *snowball sampling*. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif PRD adalah Pancasila yang mengikuti penafsiran pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ideologi sosialisme yang dimaksudkan adalah terwujudnya suatu tata kehidupan masyarakat Indonesia yang seutuhnya adil, dan makmur tanpa adanya penindasan manusia atas manusia, ataupun bangsa atas bangsa. PRD pada praktiknya tidak lagi memilih strategi dan taktik perjuangan yang radikal, melainkan lebih moderat dengan mengadopsi gerakan intra-parlementer. PRD berusaha mempengaruhi sistem dan struktur kekuasaan melalui intervensi pemilu dan diaspora politik. Perspektif kekuasaan yang dikehendaki ideologi PRD adalah mewujudkan sistem politik demokrasi partisipatoris. Secara umum gerakan politik PRD sangat terinspirasi oleh tradisi sosialisme abad 21 yang berkembang di kawasan Amerika Latin, seperti Venezuela, dan Bolivia.

Kata Kunci : Ideologi, PRD, Sosialisme Indonesia.

ABSTRACT

IDEOLOGY OF INDONESIAN SOCIALISM ON PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY PERSPECTIVE

(Study on Teritorial Leader's Committee of PRD Lampung on Years 2010 – 2015)

By :

M. Saddam Solihin Sapta Dwi Cahyo

The purpose of this study are to identify the ideology of Indonesian socialism on PRD perspective, and to know the politics practices of PRD in order to realize its. The method of this study is qualitative with phenomenology approach. Data collection by in-depth interview, observation participant, and documentation. The informant selected by purposive sampling and snowball sampling. Data analysis by data reduction, data display's, and concluding drawing or verification. This study show that the ideology of Indonesian socialism on PRD perspective is Pancasila that follow the explanation of Soekarno's speech in BPUPKI council at June 1st, 1945. The ideology of socialism means that to realize a Indonesian society system of life that totally legal and prosperous without suppression of human over human, or nation over nation. PRD's practices no more choose strategy and tactics radical of its struggle, but more moderate by adopted intra-parliamentary movement. PRD try to influence the system and the structure of authority by intervention general election and diaspora politics. The authority perspective that desire by PRD's ideology was to realize the politics system of democratic participatory. Generally politics movement of PRD very inspired by socialism tradition 21st century that developed in Latin American region, such as Venezuela and Bolivia.

Key Words : PRD, Ideology, Indonesian Socialism,

**IDEOLOGI SOSIALISME INDONESIA PERSPEKTIF
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(Studi pada Komite Pimpinan Wilayah PRD Lampung Tahun 2010 – 2015)**

Oleh

M. Saddam Solihin Sapta Dwi Cahyo

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: IDEOLOGI SOSIALISME INDONESIA
PERSPEKTIF PARTAI RAKYAT
DEMOKRATIK (Studi pada Komite
Pimpinan Wilayah PRD Lampung
Tahun 2010 - 2015)**

Nama Mahasiswa

: M. Saddam Sofihin Sapta Dwi Cahyo

Nomor Pokok Mahasiswa

: 0816011006

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

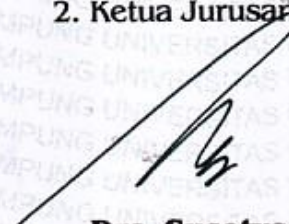
1. Komisi Pembimbing



Dr. Hartoyo, M.Si.

NIP 19601208 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi



Drs. Susetyo, M.Si.

NIP 19581004 198902 1 001

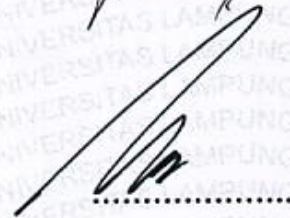
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Hartoyo, M.Si.



Penguji Utama : Drs. Susetyo, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hl. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Februari 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, atau skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas telah dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah, yang nama pengarangnya disebutkan serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2016

embuat Pernyataan,



M. Saddam Solihin Septa Dwi Cahyo

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Muhamad Saddam Solihin Sapta Dwi Cahyo dengan panggilan Saddam, dilahirkan sebagai putra kedua sekaligus bungsu dalam sebuah keluarga kecil yang hangat dan sederhana di Kota Bandar Lampung. Persisnya pada hari Selasa *pon* tanggal 6 November tahun 1990.

Merupakan buah percintaan dari seorang Ayah bernama Drs. Samsi, M.Si. (Alm) dengan seorang Ibu bernama Lusi Marlisa Hartoyo, S.Pd. Keduanya hidup dan bekerja sebagai abdi negara yang berkewajiban mendidik sebagian anak-anak bangsa Indonesia. Sementara Abangnya si sulung bernama M. Rolip Saptamaji, S.Ip, M.Ipol. seorang yang sedang gigih berjuang menapaki hidup.

Pertama kali menempuh pendidikan di TK Satria Bandar Lampung. Sekolah tingkat dasar berpindah-pindah di beberapa kota dan provinsi karena mengikuti orang tua, akhirnya berhasil lulus tepat 6 tahun di SD Negeri 2 Sukabumi pada tahun 2002. Melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 5 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2005, dan beranjak ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus tahun 2008. Pertengahan tahun itu pula penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung

dengan NPM 0816 011 006. Penulis lolos melalui jalur seleksi penerimaan PKAB (Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat) dengan bekal beberapa prestasi di bidang olahraga seni bela diri Karate, khususnya perguruan KKI (Kushin-ryu M. Karate-do Indonesia) yang digelutinya sejak usia 12 tahun.

Selama lebih dari tujuh tahun menempuh pendidikan di jenjang strata satu ini, penulis sempat memperoleh berbagai pengalaman menempa diri dalam beberapa organisasi. Seperti menjadi Pengurus UKM Karate Unila periode 2008 – 2009. Sebagai Staf Bidang Penelitian dan Kajian Intelektual HMJ Sosiologi yang mengelola buletin SOCIETAS di periode 2009 – 2010. Sebagai Anggota Magang, Staf Pemasaran, lalu Reporter UKPM Teknokra Unila di tahun 2008 – 2011. Sebagai Kepala Dinas Sosial Masyarakat BEM FISIP Unila periode 2010 – 2011. Sebagai Anggota, Kepala Departemen Pendidikan Bacaan, lalu Sekretaris LMND Eksekutif Kota Bandar Lampung di tahun 2009 – 2011. Sebagai Pimpinan Redaksi newsletter mahasiswa SUARA PELOPOR di tahun 2010-2012. Sebagai Koordinator Umum Sanggar Belajar Abdi Rakyat Bandar Lampung periode 2009 – 2012. Sebagai Badan Koordinasi, lalu Sekretaris LMND Eksekutif Wilayah Lampung di tahun 2011 – 2014. Serta menjadi Kontributor Biro Daerah Lampung di media massa Berdikari Online.com (BO) sejak tahun 2010 – 2015. Bersama beberapa rekannya juga sempat membangun komunitas seperti Kelompok Diskusi Progresif (KEDIP), Sosiolog Muda Lampung, dan Bengkel Tulis Bintang Merah.

Penulis merupakan peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Unila Periode Januari-Februari Tahun 2011 di Desa Datar Bancong Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Bersama 9 orang mahasiswa lintas jurusan lainnya mengusung tema kesehatan masyarakat. Pengalaman KKN sungguh berharga memberikan perspektif khas masyarakat pedesaan yang masih hidup secara subsisten, guyub, dan mengandalkan lingkungan alam sekitar sebagai potensi ekonomi. Dalam kesempatan itu kelompok kerja penulis memiliki beberapa program unggulan, diantaranya survey penyakit dan lingkungan, pembuatan lubang sampah organik/non-organik serta penyuluhan pembuatan pupuk darinya, penyuluhan amakanan sehat tanpa MSG dan bahan kimia berbahaya, pelatihan dan lomba dokter kecil di SD desa tersebut, hingga mendorong arisan pembuatan WC yang memenuhi standar kesehatan.

Penulis gemar menuliskan gagasan sederhananya dalam bentuk artikel opini, yang cukup rutin dimuat dalam berbagai media massa cetak dan online, di tingkat lokal mau pun nasional. Tulisan-tulisan sederhananya diarsipkan dalam akun *blog* pribadi di alamat www.bengkeltulis-sadamcahyo.blogspot.com untuk memudahkan akses oleh siapa pun yang membutuhkannya secara bertanggung jawab. Penulis memiliki harapan dapat membangun perpustakaan pribadi yang aktif dan produktif, dan mulai dirintis dalam bentuk paling sederhana, yakni mengumpulkan lebih dari tiga ratusan koleksi buku milik pribadi yang berstempelkan “Bengkel Batja Saddam Tjahjo”, dan dapat dipinjam-bacakan oleh kawan-kawannya melalui akun *fanpage* FB.

MOTO

“Kita mencintai tanah air, orang asing mencintai apa yang dikandungnya, kita mendapat tanah longsor dan air banjir, orang asing mendapat intan emas berlian.” **Pidi Baiq** (1972-), seniman kontemporer yang populer sebagai Imam Besar The Panas Dalam Serikat, menghasilkan banyak lagu, buku, dan gambar yang dekonstruktif atas paradigma mainstream.

“The left is back! And it’s the only path we have to get out of the spot ti which the right has sunken us. Socialism builds and capitalism destroys!.” **Hugo Rafael Chavez Frias** (28 Juli 1954 - 5 Maret 2013), tokoh pelopor tradisi Sosialisme Abad 21 di kawasan Amerika Latin dan Karibia, Presiden Republik Bolivarian Venezuela sejak 2 Februari 1999 hingga terbunuh dengan konspirasi penyakit kanker.

“Sosialisme abad 21 ialah masyarakat hidup sejahtera, kita tak inginkan sosialisme masa silam seperti Soviet yang statis, partai tunggal, atheis dan sekadar menggunakan gerakan sosial sebagai sarana mencapai tujuan, perlu baca ulang teori klasik Marx dan Engels agar masyarakat yang bersolidaritas kuat tak menjadi pelaku eksploitasi atau dieksploitasi, melainkan saling menghargai perbedaan.” **Martha Harnecker** (1937-), Sosiolog Marxis kontemporer asal Chili, eks pelarian politik rezim Pinochet, berguru pada Louis Althusser di Perancis, penasihat Hugo Chavez di Venezuela.

“Imagine all the people sharing all the world, you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one, I hope someday you will join us, and the world may live as one.” Lirik lagu “Imagine” karya **John “Winston” Lennon** (1940 –1980), legenda musik dunia yang populer lewat group band The Beatles, juga seorang aktivis politik sayap kiri.

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.”
Voltaire/ Francois Marie Aruouet (1694 - 1778) penulis *cum* filsuf populer Perancis di masa Abad Pencerahan.

Naskah skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ilmiah ini
dipersembahkan kepada mereka sumber kehidupan..

Tuhan Semesta Alam,

*Sujud syukurku atas limpahan segala restu Allah Sang Maha Penentu
bagi kami seluruh makhluk ciptaan-Nya..*

Ayah,

*Selamanya aku bersyukur dan berbangga ditakdirkan hidup sebagai
putramu, terimakasih Ayah, guru, dan inspirasiku, dari alam yang
langgeng itu pasti kau tengok karya ini..*

Ibu, dan Abang,

*Terimakasih telah memberi kesempatan dan menuntunku hidup di
Bumi Manusia yang begitu rumit ini dengan penuh rasa kasih dan
ketulusan, teguh kalian mengajarkan aku yang bebal ini untuk
memahami dan berani menghadapinya, sungguh hidup sama sekali
takkan bermakna apa pun jika kalian tidak berkenan menjadi jantung
bagi kehidupanku..*

Mentari,

*Bumi selamanya akan gelap gulita, dan Manusia selamanya tak akan
pernah mau bangkit membebaskan diri dari belenggu persoalan tanpa
cahaya yang kau pancarkan di separuh waktu kehidupan ini,
terimakasih..*

Secuil sumbangan untuk mu Bangsa dan Peradaban Manusia..

SANWACANA

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Manusia lain bisa saja menganggap skripsi berjudul “*Ideologi Sosialisme Indonesia Perspektif Partai Rakyat Demokratik ; Studi pada KPW PRD Lampung Tahun 2010 - 2015*” ini sekadar hasil penelitian yang pseudo-ilmiah, karena di dalamnya terdapat begitu banyak kelemahan dari berbagai aspek prosedur keilmuan. Lebih jauh, karya ini pun bisa saja dianggap sampah literer yang hanya menambah beban gunung sampah dunia ilmu pengetahuan Indonesia yang nyaris ambruk longsor itu. Namun, setidaknya bagi saya pribadi, ini merupakan karya tulis yang penting sebagai fondasi awal dari bangunan mental intelektual organik dalam diri, yang hendak saya upayakan terus dibangun semasa hidup.

Tentu saja setiap proses awalan senantiasa diwarnai oleh goresan-goresan kesalahan dan terkadang fatal, namun sejatinya bermanfaat menjadi bekal bagi penyempurnaan pengetahuan di masa datang. Selanjutnya dengan penuh kebanggaan, saya haturkan rasa syukur, hormat, dan terimakasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu, baik secara moral maupun material, hingga akhirnya naskah skripsi yang terlambat ini dapat terselesaikan, diantaranya kepada:

❖ **Segenap Birokrasi Kampus**

1. Dekan FISIP Universitas Lampung, Bapak **Drs. Agus Hadiawan, M. Si.** yang telah berbijaksana mengayomi seluruh mahasiswanya .
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak **Drs. A. Effendi, M. Si.** beserta stafnya **Pak Lukman** dan **Bu Iis** yang senantiasa membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa tingkat akhir untuk terhindar dari jeratan Drop Out.
3. Ketua Jurusan Sosiologi, Bapak **Drs. Susetyo, M. Si.** yang menjelma layaknya seorang bapak, terimakasih telah berkenan mengulurkan banyak bantuan dan kesabarannya mengayomi kami mahasiswa yang terlambat lulus. Sekaligus sebagai dosen pembahas dan penguji skripsi yang telah banyak memberi petunjuk dalam setiap prosesnya.
4. Pembimbing dan penguji utama skripsi, Bapak **Dr. Hartoyo, M. Si.** Terimakasih atas segala kemurahan hatinya untuk terus memotivasi, memandu, dan memberikan semua saran terbaik dalam setiap prosesnya.
5. Pembimbing akademik mahasiswa, Bapak **Drs. Bintang Wirawan, M.Hum.** yang punya cara khas untuk memandu dan mendukung setiap mahasiswanya.
6. Sekretaris Jurusan Sosiologi, Bapak **Drs. Ikram Baadila, M.Si.** yang telah berkenan memotivasi kami beberapa “mahasiswa senior” yang bangun kesiangan ini untuk segera menuntaskan kewajiban pada diri dan keluarga.
7. Staf administrasi Jurusan Sosiologi, **Ibu Siti Fatimah** yang dengan kerendahan hati mereka untuk membantu dan memperlancar semua proses penyelesaian studi mahasiswa, semuanya tak akan tuntas tepat waktu.

8. Seluruh Staf Pegawai FISIP Unila, khususnya Mas Edi selaku juru kunci gedung B FISIP Unila, termasuk para Kiyay Satpam, juga para penjaga Kantin Bawah Tangga Gedung B yang telah mewarnai kehidupan penulis selama menempuh studi di kampus oranye ini.

❖ **Para Dosen Panutan**

Kepada seluruh guru pencerah, di antaranya : Bu **Endry Fatimaningsih, S.Sos, M.Si**, aku akan terus berkeras menjadi matahari sebagaimana yang Ibu contohkan dalam mengajar kami tanpa pernah mencela, semoga studi doktoral di UI-nya lancar, dan lekas menebarkan ilmu barunya di almamater Unila tercinta. Bu **Dr. Bertoven Vivit Nurdin, S.Sos, M.Si**, yang kecerdasannya sangat menginspirasi, semoga harmoni kehidupan manusia akan terwujud kelak dalam formasi sosial yang baru setelah kapitalisme ini diruntuhkan. Bung **Maruly H Utama, S.Sos, M.Si** jika semakin banyak lahir intelektual organik yang visioner, semestinya sosialisme ilmiah mampu tumbuh subur dalam ilmu dan praktiknya yang nyata. Bu **Dr. Erna Rochana, S.Sos, M.Si**, saya akui ternyata dalam proses belajar itu, perhatian dan objektivitas memang patut diselaraskan. Pak **Dr. Hartoyo, M.Si** bahwa kedisiplinan dan ketekunan belajar memang harus selalu menjadi prinsip bagi siapapun yang ingin menjadi seorang pembelajar. Pak **Drs. I Gede Sidemen, M.Si** memang dunia sosial memang selalu membutuhkan perhitungan angka-angka yang rasional dan wajar untuk mengubah kenyataan buruk menjadi baik. Pak **Drs. Abdulsyani, M.Ip**

pancaran kebijaksanaan memang selalu dibutuhkan oleh setiap insan cendikia yang kerap dirundung keresahan saat belajar. Pak **Drs. Bintang Wirawan, M.Hum** bahwa belajar bukan hanya perkara besar memahami dunia, tapi juga bagaimana mencermati manusia dan masalahnya hingga pada hal-hal kecil yang kerap disepelekan. Pak **Drs. Ikram Baadila, M.Si.** dunia kita memang berwarna, hanya manusia dengan mata hati dan akal pikiran yang buta saja melihat dunia ini hanya hitam dan putih, bahkan kelabu pun ditentangnya. Bung **Drs. Pairulsyah, M.H.** bahwa budaya egaliter bukanlah ekspresi kurang ajar, ternyata sesungguhnya adalah harmoni ideal bagi suatu relasi sosial yang saling membangun. Pak **Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim.** apa yang bisa kita lakukan dan kejar hari ini memang tidak sepatutnya ditunda, karena hanya akan membuahkan keberlarutan yang sendu.

❖ **Keluarga Kecilku yang Hangat**

Teruntuk **para Leluhur** yang telah mewariskan darah-daging, semangat, serta sejarah mengagumkan. Pada **Ayah Drs. Samsi, M.Si. (Alm)** yang pertama kali memberi pelajaran hidup, terimakasih telah menempa dan menjaga moral kami kedua putra mu dengan cara yang tak bisa ditandingi. Benar Ayah, "*Air (pendidikan) itu penting untuk kehidupan..!*" dan semoga putra bungsu mu ini sanggup mengelola semua kesempatan dan potensi demi membanggakanmu, hingga akhirnya kita bisa kembali berbincang akan banyak hal, di alam sana, suatu saat nanti. Pada **Ibu Lusi Marlisa Hartoyo, S.Pd.** jelmaan malaikat pelindung yang penuh kehangatan kasih sayang, terimakasih telah begitu tulus memberi kami hidup yang sangat amat layak dan

bahagia, dengan cara-cara mu yang luar biasa itu Ibu. Pada **Abang M.Rolip Saptamaji, S.I.P., M.Ipol.** yang selalu berhasil membuktikan diri patut dijadikan panutan, meski dunia telah memberi kita jarak yang menghilangkan begitu banyak ruang kebersamaan, namun keterampilanmu menganyam ingatan dan mengejar waktu nyatanya selalu berhasil menjadikan kita sepasang kakak-beradik yang sebagaimana mestinya.

Pada **Agnes Mayda Indraswari, S.S.** yang telah hadir ke dalam kehidupan kami, sebagai kakak perempuan yang enerjik, dan baik hati, terimakasih untuk selalu berusaha mengayomi, memberi banyak rujukan bacaan, saran dan informasi yang selalu menarik juga mencerahkan. Pada Kang Mas **Noer Pendi, S.E.** yang begitu tulus dan setia memberikan waktu dan tenaganya untuk membantuku sekeluarga dalam banyak hal, termasuk pada tingkah jenakanya yang selalu membuat wajah dan hati kami mengurai senyum lepas, pada obrolan-obrolannya tentang pengalaman hidup yang banyak membuatku malu sekaligus salut.

Pada **Rizqy Umami, S.Pd.** si Mentari hangat nan tembem yang telah “pulang” ke dalam hidupku, terimakasih atas kegigihannya memantik api semangat untuk menuntaskan studi Strata-1 ini dan mengejar cita-cita lanjut studi, suatu saat nanti. Semangatmu yang luar biasa dalam memperjuangkan hidup dengan sebaik-baiknya itu telah begitu menginspirasi untuk tak menyerah dan selalu bersyukur, meski tetap saja proses ini tampak lambat sekali. Semoga Tuhan senantiasa merestui kita bersama dalam satu kehidupan.

Kepada semua keluarga besar terkasih, permohonan maaf sebesarnya kuhaturkan dengan sadar atas keterlambatan masa studi ini, yang harus diakui pula telah banyak menghabiskan pengorbanan, baik materi, perasaan, kesempatan, dan waktu. Berbahagialah kalian yang telah ikhlas dan bijaksana dalam kesehatan jiwa dan raga yang dikaruniakan oleh Tuhan Semesta Alam.

❖ **Sahabat, Kawan, dan Rekan**

Sahabat, **Danang Wisnu Susilo** yang sudah tumbuh selayaknya saudara dalam banyak kesempatan tawa dan tangis masa remaja. Gagasanmu tentang masa depan hidup yang kadang tampak begitu jauh melampaui kenyataan ternyata secara bertahap telah berhasil terbuktikan, lewat kerja keras meski kadang berbalut keluh-kesah.

Dewa Putu Adi Wibawa, S.H., M.H. dengan keistimewaannya telah berjasa menuntunku mengurai pengetahuan, dan mimpi-mimpi indah tentang masyarakat tanpa kelas sebagai cita-cita luhur dari kehidupan peradaban manusia, juga atas kerendahan hatinya yang telah berkenan menjadikanku seorang teman manusia.

Komunitas **Humourize Community (Hu_Com 2006)** : Danang WS, Helia Yusnia, Yurres SW, Febri Syifa Bayu, Dedy SN, Lutfi Malefo, Teguh Priono, Lidya Novita, Salis Satia, Elinda Yunita, Yossi Anggraini, yang rela dan setia mendampingi pertumbuhan hidup penulis sebagai remaja SMA, dengan segala kelakuan labil dan aneh, berhasil bahagia meski hidup di masa itu sesungguhnya penuh masalah. Abadilah silaturahmi kita broth and sist; *“Tertawa untuk Persaudaraan !”*.

Perguruan **KKI (Kushin-ryu M. Karate-do Indonesia)** khususnya ranting SMP N 5 Bandar Lampung dan SMA N 1 Bandar Lampung di tahun 2003 – 2011 : Sensei Abudzar, Sempai Budi, Sempai Tasiman, Sempai Ardiansyah, Mbak Tia, Kak Wondo, Kiki Otang, Oki, Rinto, Gerry, Suprianto, Riki, Rajib, Lina, Hefna, Yunita, Ali, Vaka, Ricko, Rimty, Destia, Nindia, Solikha, Arlina, Kartika, Dhani, Fadhel, Gideon, Fauzan, Nadya, Risca, Dini, dan semuanya. Masa-masa kita bermandi keringat meneriakkan 10 Pedoman Karate-do, semua luka dan lebam yang didapat selama latihan juga pertandingan, senantiasa terekam guna membakar semangat Bushido dalam diri ini. Oosh !

Kawan-kawan seangkatan **Sosiologi '2008**: “Jeng” Nurul Panji, Yan ‘Tole’, Irsyad Wildan, Arwin Rio, Wayan ‘Kejung’, Yodi Sudarto, dan semua dari kelas regular/mandiri yang berhasil lulus ataupun henggang duluan. Khusus untuk **“Komunitas Serigala Terakhir” yang luarr biasa!** ; Kristin Maratur, Triyani Tory, Netty “Calo Angkatan”, Mijwad “Asep” Septriansyah, Gustina Lova, dan dua orang terakhir yang wisuda barengan, Dedy “Daeng” dan Sutikno ‘Nino Cool Guys’. Terimakasih sudah kompak saling menyemangati dan membantu keberhasilan menggapai gelar Sarjana Sosiologi, benar-benar sampai di ujung nafas masa studi. Selamat, semoga kita semua sukses berlipat-lipat..!

Kawan-kawan **Sosiologi '2010** : **Hidayatturohman** pemuda lugu tapi berprinsip mengagumkan, terimakasih atas kesempatan saling membantu selama ini, tanpa kegigihan dan kebaikan hatinya barangkali saya hanya akan semakin banyak

menambah beban kelalaian. Bayu Mars, Emil, Nora, Cynthia, Wenny, dan Nora yang sempat mengisi masa-masa akhir studi dan memberikan dukungan.

Kawan-kawan **KKN Tematik Desa Datar Bancong** di Kasui Way Kanan periode Januari-Februari 2012: Topan Aditya Handoko, Rian Oktora Prihandoko, Apri Suwandi, David Simamora, Habriandi Bukit, Wanti Simanjuntak, Nina Turnip, Evi Sijabat, dan lainnya dari total 20 orang dalam dua tim. Segenap warga Desa: Mang Syam, Mang Basir, Mang Bah, Bu Tuti, dan lainnya yang rela diajak kerjasama dan bergembira, juga untuk semua tangisannya saat kita harus berpisah. Dosen Pembimbing Lapangan, Pak Dicky eks aktivis SMID yang baik. Bapak-bapak Kepolisian yang sigap membantu penangkapan pelaku pencurian posko, dan memberi bonus hiburan organ tunggal sebagai perpisahan.

UKPM Teknokra, dengan cara yang khas dan penuh kesan, pernah menempa mental dan pengetahuanku khususnya dalam semangat menulis dan minat pada jurnalistik: Kak Siswoyo, Kak Edi Prasetyo, Kak Andry Kurniawan, Kak Arif, Kak Supendi 'Pepy', Kak Fathoni, Kak Beny, Kak Riki P. Marly, Mbak Dwi Kuswatuti, Mbak Ni'matu Shaumi, Mbak Nur, Mbak Nelly, dan senior lainnya. Khusus Angkatan 37 : Dian WK, Agnes L, Reno B, Alvindra, Nadia, Anggun, Zee gong, Esti, Blorong, Arif, Agung, dan yang lainnya. Terimakasih..! Tetap Berfikir Merdeka !

Kamerad BO : Rudi Hartono dan Ulfa Ilyas yang tak lagi berpasangan dalam hidup, semoga komitmen perjuangan kalian membawa portal **berdikarionline.com** kian

berkembang, sukses menghancurkan hegemoni media kapitalis yang anti pada cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terimakasih sudah memberi ruang untuk belajar menulis dengan segala keterbatasanku selama ini.

Kamerad LMND : Semoga selalu tumbuh berkembang menjadi rahim produktif bagi pemuda yang berjiwa progresif revolusioner dan teguh menempa diri layaknya intelektual organik yang haus pengetahuan dan menghendaki perubahan. Terutama kepada kalian pelanjut angkatan: Rismayanti, Raga Gapilau, Cindy Moyna, Ricky Satriawan, Devin Prastya, Reza Fadlie, Andi Irawan, Agung Azhari, Lisa Nurjanah, Dwi Jayanti, Made, Arphan, Ari, Wayan Some, Dona, dan semuanya yang akan terus berdatangan ikut membangun.

Kawan-kawan sezaman dan satu pandangan: Togar Harahap, Isnan Subkhi, Nyoman Adi Irawan, Mujahidin, Aditya Albar, Riskon Fatria, Uolphayani, Mira Desnawati, Yayuk Hidayah. Juga yang pernah bersama bergerak di wilayah lain: Edi Susilo, Arham Tarawang, Ruudj Arif Fachrudin, Vivi Nur Fitria di mana saja berada, Fuad Kurniawan, Asri di Sumsel, Hendri Kurniawan, Moelyadi, Umar Khotob di Jatim, Jono, Damar, Caisar, di Jateng, Vivin, Minaria yang dulu di Sumut, Sofyan dari Kaltim, Ardy, Sinar, Inay, Kholis, Medi, Panji, Beta di Yogyakarta. Terimakasih dan semoga ilmu yang pernah kita dapatkan senantiasa dapat teramalkan.

Kamerad PRD: *Comandante* Rakhmat Husein DC, *Bung* Rahmad, *Cak* Ahmad Muslimin, *Suhu Acong* Joni Fadli, dan *Bli* Gusti Kade Artawan yang daya tempur

berpraktiknya di Lampung sangat mengagumkan juga menginspirasi. Semoga PRD dapat terus tumbuh berkembang dan menang, mewujudkan cita-cita kemerdekaan ekonomi-politik bagi kaum marjinal tertindas korban penghisapan sistem bobrok kapitalisme-neoliberal sebagaimana diharapkan.

Kepada mereka yang patut dikagumi dengan keteguhannya berjuang di pusat negara: Agus “Jabo” Priono, Dominggus Oktavianus, Antun Joko Susmana, Binbin Firman Tresnadi, Tejo Priyono, Tari Adinda, Wahida Baharudin Uppa, Jakfar, Iskohar, Alif Kamal, Harris Sitorus, Lukman Hakim. Semoga sehat berbahagia..!

Kamerad lainnya yang setelah saling mengajarkan justru harus berpisah untuk tidak saling memukul: Badri, Abu Hasan, Purnomo, Ali Akbar, Lamén Hendra Saputra, Amir Harmidhan, Aris Setyanto, Fredy Muchtar, Dede Kurniawan, Novelia Sanggem, Solichin, Donna Sorenty Moza, Roby Weldan ES, Dompok Red Flag. Kepada mereka yang dikenal lewat jalan sejarah: Aziz Satria Jaya, Laela Ahmad, Asep Supriyanto, Ferry Susanto, Yozi Rizal, Nopriansyah, Putra Budi Anshori, Cahyalana, Eko Khubu, Gatra. Juga yang pernah bersama lalu berpisah: Eko Susanto, Gontar, Sakai, Agung Ruliansyah, Binsar Hamonangan, Dedy Tornando, Gunes Nurani, Ibu Lubis, Ibu Amah & Pak Harto, Burhan. Semoga sehat jiwa dan raga..!

Begitupun kepada semua kaum tani, kaum buruh, kaum miskin perkotaan, dan seluruh elemen rakyat tertindas di Indonesia, terimakasih untuk semua pelajarannya, semoga revolusi adalah hari depan yang akan kita jemput kedatangannya.

❖ **Inspirator Pengetahuan**

Para **Guru Spiritual** yang kepada “mereka” juga lah saya mencari pencerahan dalam pelarian kontemplatif : Muhammad, Sang Rasul Allah, yang berjasa mengajarkan agama Islam pada umat manusia. Karl Heincrich Marx, manusia biasa yang mengabdikan hidup untuk menyusun karya ilmiah pembongkar sistem kekuasaan penindas peradaban. Imam Besar Pidi Baiq lewat karya tulisnya dan nada-nada musikal *The Panas Dalam* berbalut akrobat kata-kata namun sarat makna. Abah Mukti Mukti lewat nada dan lirik musik *balaad* nya yang menyejukkan setiap kali hati gelisah. Gus Dur yang mengajarkan nilai-nilai pluralitas kebangsaan dengan tingkah polah nyelenehnya semasa hidup. Wiji Thukul yang dihilangkan penguasa, terimakasih atas rekaman suara cedalmu, karya puisi, dan kisah perjuangan yang membangkitkan hati nurani. Larry Gonick yang piawai membuat gambar kartun pengusik imaji dan akal sehat memahami peradaban. Pramoedya Ananta Toer, yang setiap karya sastranya selalu membunuh keraguan dan ketuaan dalam hidup.

Para **Pemasok Buku Online** semoga usaha mencerahkannya senantiasa maju dan jaya dengan harga murah seraya berbakti pada kemajuan bangsa : Syech Prang/Sinar Atjeh (Aceh), Kana Nagareboshi (Padang); Marjin Kiri, Sarinah Pangab, Velodroom, Yayasan Obor, Komunitas Bambu, Delani, Staline, Jejak Ratu Adil, JAKKER Shop, Akal Buku, Bakoel Didiet, Merdeka, Rak Buku Langka, Poestaka Lmaga (Jabodetabek); Ultimus, Ara Mantra, Dian Cipta, Lapak Tualang, Fahmi Book, Lapangan Merah (Jabar); Oemah Buku, Resist Book, LKiS, Bintang Nusantara,

Multatuli, Kios Datuta, Pustaka Nusantara, Gumilar's, Segala Referensi, Sindikat Boekoe (Yogya); Bulang Sukoharjo, Rio Buku, Budi Elang Semeru (Jateng); Denny's Jatmiko, Buruh Membaca, Sibuk Main, Mbah Dimas, Amin's, Ribut Wijoto, Trisna Toktok, Cahaya Pustaka (Jatim), dan banyak lainnya. Semoga kian Berjaya..!

Para **Sosiolog Indonesia** yang kiprahnya menjadi panutan: Hassan Shadily, Arief Budiman, Thamrin Amal Tomagola, Hotman M. Siahaan, George Junus Aditjondro, Iwan Gardono Sujatmiko, Robertus Robert, Arie Sudjito, Novri Susan, Rachmad Dwi K Susilo, Wahyu Sardono (Dono Warkop), Wahyu Budi Nugroho, Melly G. Tan, Devie Rahmawati, Tia Pamungkas, Radhar Panca Dahana, Ariel Haryanto, dst.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini sungguh-sungguh dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Terimakasih, dan salam hormat.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

M. Saddam S.S.D. Cahyo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
HALAMAN MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Ideologi	16
2.1.1 Sejarah dan Pengertian Ideologi	16
2.1.2 Ideologi Sebagai Fakta Sosial dalam Sosiologi.....	22
2.1.3 Teori Analisis Ideologi	25
2.2 Tinjauan Tentang Sosialisme	29
2.2.1 Sejarah dan Pengertian Sosialisme	29
2.2.2 Varian Tradisi Ideologi Sosialisme	34
2.2.3 Sosialisme Indonesia dan Riwayatnya di Indonesia.....	45
2.3 Penelitian Terdahulu	53
2.3.1 Kritik Marxisme-Leninisme Terhadap Kegagalan PKI	53

2.3.2 Pengaruh Marxisme dalam Pemikiran Marhaenisme Soekarno.....	53
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	54
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pilihan Metode	57
3.2 Setting Penelitian	60
3.3 Informan Penelitian.....	61
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.5 Teknik Analisis Data.....	68
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Profil dan Perjalanan Sejarah PRD	70
4.1.1 PRD dalam Pusaran Sejarah Politik Bangsa	70
a. Bergerak Setelah Kudatuli Berdarah	73
b. Reformasi, People Power yang Meleset	78
c. Pasang Surut Usai Runtuhnya Orba	82
4.1.2 Menengok Ke belakang, Ke Arah Pancasila	89
a. Ketika Azas Pun Berganti.....	90
b. Manifesto Politik Menegaskan Posisi.....	94
c. Menjawab Lewat Gerakan Nasional Pasal 33	97
d. Tentang Anggaran Dasar, Logo, dan Struktur	98
4.1.3 Mengepak Sayap Sampai Lampung	101
a. Lahir dari Embrio Gerakan Mahasiswa	102
b. Lampung Sebagai Basis Andalan PRD	103
c. Setelah Stratak Perjuangan Harus Diubah	105
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Sosialisme Indonesia yang Dianggakan PRD.....	114
5.1.1 Azas Sebagai Cerminan Zaman bagi Ideologi.....	114
5.1.2 Menyelami Pancasila yang Lama Ditenggelamkan.....	121
5.1.3 Memahami Indonesia Melalui Masyarakat dan Politiknya	127
5.1.4 Modus Operandi Sosialisme Indonesia <i>ala</i> PRD.....	134
5.2 Bangun, Bergerak menapaki Mimpi Sosialisme.....	137
5.2.1 Membangun Jaringan, Menebar Pengaruh	142

5.2.2 Meniti Pembangunan Organisasi Partai.....	147
5.2.3 Menguji Diri, Bertarung di Panggung Elektoral.....	154
5.2.4 Menalar Tradisi Ideologi Sosialisme PRD	161

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	176
6.2 Saran	182

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Strategi Penyebaran Ideologi Menurut John B. Thompson	28
2.2 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2006 di Amerika Latin	44
3.1 Daftar Informan Penelitian.....	63
3.2 Pedoman Pengumpulan Data	66
3.3 Pedoman Wawancara Informan	66
4.1 Periodisasi Struktur Pimpinan dan Azas PRD	101
4.2 Struktur Pimpinan dan Jumlah Anggota KPK PRD Lampung	111
4.3 Periodisasi Struktur Pimpinan KPW PRD Lampung.....	113
5.1 Identifikasi Strategi Ideologisasi PRD dengan Teori Thompson.....	137
5.2 Karakteristik Ideologi Sosialisme Indonesia Perspektif PRD.....	174

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1	Skema Pembentukan Ideologi Menurut Seta Basri.....	24
2.2	Varian Tradisi Ideologi Sosialisme.....	45
2.3	Kerangka Pikir Penelitian	56
3.1	Konsep <i>Social Situation</i> Menurut James Spradley	60
4.1	Suasana Deklarasi PRD 22 Juli 1996.....	71
4.2	Suasana Kerusuhan 27 Juli 1996	73
4.3	Suasana Kampanye Mega-Bintang-Rakyat.....	76
4.4	Aktivis PRD yang Hilang Diculik Semasa Reformasi.....	78
4.5	Suasana Kampanye PRD Saat Pemilu 1999	79
4.6	Suasana Pembebasan Tahanan Politik PRD	81
4.7	Suasana Dukungan PRD pada Referendum Timor-Timur.....	82
4.8	Suasana Aksi Menuntut Pembubaran Golkar	83
4.9	Pembentukan partai POPOR untuk Pemilu 2004	85
4.10	Pembentukan PAPERNAS untuk Pemilu 1999	87
4.11	Taktik Intervensi PRD di dalam PBR pada Pemilu 2009	88
4.12	Kampanye Hentikan Neoliberalisme di Pemilu 2009.....	89
4.13	Kampanye Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945.....	98
4.14	Bagan Struktur Organisasi PRD	100
4.15	Logo Bendera Partai Rakyat Demokratik	100
4.16	M. Yusuf Rizal dan Suasana Demonstrasi Tolak UU PKB	103
4.17	Suasana Aksi Programatik PRD	104
4.18	Suasana Aksi Tuntut Kegagalan SBY	105
4.19	Suasana Aksi Demonstrasi PRD Lampung.....	106
4.20	Gerakan Nasional Pasal 33 PRD di Lampung	107
4.21	Suasana Kerja Politik Atas PRD di Tingkat Lokal.....	108
4.22	Suasana Vergadering dan Diskusi Publik PRD	109
4.23	Suasana Rapat Akbar dan Launching Sikap Politik PRD.....	109
4.24	Sekretariat KPW PRD Lampung Tampak Depan.....	110
4.25	Bagan Struktur Pengurus KPW PRD Lampung.....	110
4.26	Suasana Pendidikan dan Kaderisasi Anggota PRD Lampung	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian ilmiah mengenai sosialisme di Indonesia sampai sekarang ini hampir selalu dilakukan dalam pengertiannya yang peyoratif, ditambah dengan tingginya resistensi ilmuwan sosial untuk mengkajinya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh stigma yang menyebut bahwa sosialisme sama sekali tak berbeda dengan komunisme, sebuah ideologi politik yang diidentikkan dengan golongan masyarakat *anti-theis* dan dituduh pernah berupaya mengkhianati Pancasila ideologi resmi negara.

Stigma komunisto-phobia terutama muncul sejak Jenderal Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kedua pada 12 Maret 1967, dan kemudian menjabat selama 31 tahun lebih hingga 21 Mei 1998, dan periode itu disebut dengan Orde Baru. Indonesianis Max R. Lane (2007: 61) menyebutnya sebagai rezim kontra-revolusi yang otoriter dan efektif melakukan distorsi sejarah demi melanggengkan kekuasaan yang dibangun melalui pengorbanan jiwa jutaan rakyatnya, yang dituding terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Stigma tersebut secara sistematis semakin terpelihara setelah terbitnya TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan berkembangnya ideologi Marxisme/komunisme. Situasi ini didukung juga dengan adanya suatu kebijakan pembangunan politik Orde Baru yang disebut *floating mass* atau politik massa mengambang sebagai upaya depolitisasi dan demobilisasi masyarakat. Menurut Jeffrey A. Winters (1999: 17) kebijakan *floating mass* merupakan praktek politik penyingkiran oleh pihak penguasa terhadap kelompok-kelompok oposisi yang berpotensi mengusik *status quo*, dimana hak politik masyarakat untuk berpartisipasi, berserikat, dan menyatakan pendapat secara terbuka diatur ketat dengan disertai ancaman hukum subversif demi menjaga stabilitas keamanan bagi pemerintah dan investasi modal di dalam negeri.

Adapula kebijakan penunjang lain seperti Normalisasi Keadaan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK), Paket 5 UU Politik dan dwi fungsi ABRI, fusi/penyederhanaan parpol, azas tunggal Pancasila bagi seluruh lembaga, P4 (Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), kurikulum Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB), peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, pemberlakuan sensor ketat media massa, pemberangusan bacaan kiri dan Soekarnois, hingga adanya kaum *exile* atau pelarian politik di luar Negeri, dan seterusnya. Rangkaian kebijakan ini dilakukan secara otoriter, simultan, dan konsisten selama lebih dari tiga dasawarsa, dengan tujuan membentuk kesadaran politik masyarakat Indonesia yang pasif dan apolitis (Lane, 2007: 65-76).

Dalam konteks ini, rezim Orde Baru mempercayakan penyusunan ulang sejarah nasional kepada Lembaga Pusat Sejarah ABRI sebagai pemegang peran sentral,

terutama melalui terbitan karya-karya ilmiah yang *stereotype* terhadap seluruh ideologi politik kiri termasuk sosialisme, dan begitu jauh menyajikan superioritas militer (Soyomukti, 2010: 92). Dampak dari praktek distorsi sejarah nasional ini adalah substansi positif dari sosialisme di Indonesia pun direduksi sedemikian rupa, dan nyaris menghilang dalam ranah kajian ilmu-ilmu sosial kita. Sejak itu, kehidupan ilmu sosial turut mengalami depolitisasi dengan hanya diarahkan untuk mengembangkan paradigma positivisme dan teori modernisasinya yang diejawantahkan dalam prinsip *developmentalisme* demi kepentingan melanggengkan *status quo* saja.

Sedangkan jika merujuk pada catatan-catatan sejarah bangsa ini, tersurat jelas bahwa sosialisme pernah menjadi tema ideologi yang sangat dominan baik dalam praktek kehidupan politik masyarakat mau pun kajian ilmu sosialnya. Konsep ini juga berperan besar dalam proses pembangunan bangsa menuju puncak kemerdekaan dan hingga periode awal pemerintahan. Besarnya pengaruh gagasan sosialisme bisa dengan mudah dicermati pada pemikiran-pemikiran yang tertulis dalam berbagai literatur karya para *founding fathers*, seperti HOS. Tjokroaminoto, Tan Malaka, Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, Ki Hadjar Dewantara, dan sebagainya. Jika ditarik benang merah dari beragam pemikiran tokoh tersebut, maka terdapat cita-cita universal yang sama-sama diharapkan, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang bergotong royong, adil dan makmur. Cita-cita universal ini sangatlah selaras dengan esensi atau karakter fundamental yang terkandung dalam gagasan sosialisme, yakni komitmennya untuk membangun masyarakat egalitarian yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan, masyarakat yang demokratis, solidaritas sosial yang

tinggi, serta memiliki kesadaran politik yang aktif dan partisipatif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum (Newman, 2006: 244).

Tak hanya mewarnai wacana pemikiran para tokoh kemerdekaan, sosialisme di Indonesia juga tercatat pernah dipraktekkan secara dominan dalam kehidupan politik yang memuncak pada era Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan ini memiliki ciri utama yakni peningkatan mobilisasi massa dalam kehidupan politik sebagai sesuatu yang dianggap perlu untuk memperkuat perlawanan terhadap elemen-elemen dalam masyarakat Indonesia yang bersekutu dengan kepentingan penjajah imperialisme barat. Soekarno meyakini *machtvorming* atau mobilisasi massa adalah kunci perubahan menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian demi melapangkan jalan transformasi menurut cita-cita sosialisme Indonesia (Lane, 2012: 34 - 36).

Pemerintahan Soekarno juga memiliki serangkaian konsep yang disusun sistematis untuk menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan nasional adalah untuk mewujudkan sosialisme *ala* Indonesia. Dimulai dengan gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang mengharapkan penyatuan semangat perjuangan dari tiga kelompok aliran politik terbesar dalam masyarakat Indonesia saat itu. Gagasan ini kemudian dihubungkan dengan konsensus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang tertuang dalam naskah resmi Pembukaan UUD 1945. Dokumen Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) disusun sebagai dasar dari perencanaan program pembangunan yang dilengkapi pula dengan suatu Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai perangkat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang disebut Manipol/ USDEK,

akronim dari beberapa konsep yakni Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sementara perangkat hukum yang menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang sosialis semisal amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai haluan dasar ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, dan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai upaya pemerataan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam bagi setiap warga negara (Abdulgani, 1964: 57-64).

Sosialisme di Indonesia juga pernah direpresentasikan oleh banyak partai politik peserta Pemilu 1955 melalui azas yang dianutnya, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan azas Marxisme-Leninisme; Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan azas sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi atau Marhaenisme; Angkatan Komunis Muda (Acoma) dengan azas komunisme; Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan azas Sosialisme Kerakyatan; Partai Murba dengan azas Anti Fasisme, Imperialisme, dan Kapitalisme; dan beberapa lainnya. Keseluruhan partai politik berhaluan ideologi sosialisme ini saat itu mampu memiliki anggota aktif berjumlah jutaan jiwa. Terutama PKI yang masuk peringkat empat besar perolehan suara pemilu legislatif tahun 1955, anggotanya pun banyak yang menjabat posisi eksekutif dan birokrasi di daerah (Saksono, 2009: 18-39).

Ditinjau dari fakta sejarah yang demikian, maka menjadi ahistoris dan apriori rasanya jika ilmuwan sosial Indonesia masih menempatkan kajian bertema sosialisme dalam makna yang peyoratif. Terlebih kehidupan politik masyarakat Indonesia pasca Reformasi 1998 telah memasuki babak baru yang disebut transisi demokrasi atau keterbukaan politik. Era ini cenderung memberi keleluasaan

kepada warga negara untuk berfikir dan bertindak tentang arah masa depan bangsa tanpa pengekangan dan pemaksaan yang berlebihan dari pihak pemegang *status quo* kekuasaan selagi bukan sebuah tindakan makar.

Namun, sosialisme memang perlu terlebih dahulu dikaji ulang baik dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya agar tidak terjebak dalam heroisme pendukungnya mau pun aprioritas penentangannya. Mengingat dampak laten dari stigmatisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru selama tiga dasawarsa lebih pada masa lalu telah begitu mengaburkan maknanya, hingga menjadi sulit untuk melakukan kajian yang objektif. Pada umumnya, diskursus sosialisme di Indonesia mengalami stagnansi atau kebuntuan.

Dalam khasanah ilmu sosial secara global memang lahir banyak kajian yang memandang bahwa penghujung abad ke-20 merupakan akhir dari era politik ideologis. Sosiolog kontemporer seperti Francis Fukuyama, Ralf Dahrendorf, Daniel Bell, Anthony Giddens, dan Peter L. Berger dikenal cukup vokal menegaskan bahwa marxisme dan varian interpretasi ideologi sosialisme lainnya sudah gagal, dan dunia mutlak dimenangkan oleh kapitalisme. Sementara ilmuwan sosial dari mazhab postmodernisme seperti Jean Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michael Foucault, dan Jean Baudrillard bergerak lebih jauh, secara dekonstruktif menggugat eksistensi seluruh narasi agung berupa ideologi politik apa pun, dan menganggapnya sudah tidak relevan dalam kehidupan masyarakat global yang kian absurd ini (Agger, 2005: 92-93).

Wacana seperti itu kian merebak terutama pasca runtuhnya Uni Soviet sebagai poros gerakan politik komunis internasional secara mengejutkan hingga terpecah

menjadi beberapa negara merdeka di tahun 1989. Negeri-negeri utama komunisme lain seperti Republik Rakyat Tiongkok/Cina pun mulai berbalik arah dalam menghadapi tuntutan globalisasi yang sulit dihindari, dengan menerapkan sistem ekonomi pasar bebas. Di Eropa Barat ajaran komunisme jauh lebih dulu ditinggalkan, dengan memilih poros sosialisme demokrat yang memperjuangkan tercapainya kemenangan reformis bagi kaum buruh melalui jalur parlemen dan negara kesejahteraan. Sedangkan di Asia, Afrika, dan negara pasca kolonial lainnya, ajaran Marxisme maupun komunisme kian tergusur oleh beragam konflik horizontal yang tak berujung. Semisal terus meluasnya kesadaran sukuisme, regionalisme, fundamentalisme agama, atau pun korupsi sistemik-birokratis yang pada waktu bersamaan berkelindan kusut dengan desakan budaya liberalisme barat, mau pun campur tangan negara dunia pertama yang berlomba menghegemoninya sebagai pasar potensial (Suseno, 2005: 1-3).

Sementara itu, kondisi kehidupan Bangsa dan Negara ini sesungguhnya tengah menghadapi situasi yang pelik, meski sudah 69 tahun merdeka. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik itu bahan tambang energi dan mineral, hutan dan laut, dengan flora dan faunanya, mau pun keindahan alam yang subur dan asri. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, yakni lebih dari 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49 % per tahun. Namun, statusnya di kancah dunia justru stagnan berada dalam posisi negara dunia ketiga atau kategori berkembang. Ironis taraf hidup masyarakatnya pun masih terbilang rendah dengan angka kemiskinan mencapai 28,28 juta jiwa atau 11, 25% pada Maret 2014, angka ini

bahkan meningkat sekitar 110 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Sementara provinsi Lampung berada di urutan ke-10 termiskin dari total 34 provinsi, dengan catatan angka mencapai 1,143 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 14,28%, dan menempati urutan ke tiga di kepulauan Sumatera setelah provinsi Aceh dan Bengkulu (Lampung Post, 22 Agustus 2014). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitiannya pada Februari 2012 menyebut terdapat sekitar 57% pekerja informal dan 26,2% pekerja formal yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan tingginya harga barang kebutuhan hidup (Merdeka.com, 11 Agustus 2014).

Perekonomian negara nyaris tak lagi kokoh dan mandiri, setiap warganya menanggung utang lebih dari Rp. 9 juta per tahun karena utang negara dalam satu dasawarsa terakhir terus melonjak, dari sebesar Rp.1.299,5 triliun pada tahun 2004 hingga tercatat sebesar Rp. 2.500,92 triliun pada Juli 2014, meski dengan rasio terhadap PDB yang masih terbilang normal yakni 25,5% . Meningkatnya utang negara ini terutama disebabkan oleh besarnya kesenjangan pendapatan dengan kewajiban belanja dalam APBN. Misalkan dalam APBN 2014 lalu yang mencapai Rp. 1.842,5 triliun rupiah, sementara pendapatan negara tahun hanya kisaran Rp. 1.667,1 triliun rupiah, dan untuk mengatasi defisit sebesar Rp. 175,4 triliun rupiah itu adalah melalui penambahan utang luar negeri (Finance.detik.com, 17 Agustus 2014). Persoalannya jumlah utang negara yang rutin bertambah itu bukan dipakai untuk membiayai program pembangunan produktif sehingga terus menumpuk.

Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari sistem neoliberalisme yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Neoliberalisme merupakan sistem ekonomi politik yang dicapai oleh kapitalisme global sejak akhir 1980-an. Dimana negara-negara dunia pertama dan jejaring korporasi raksasa multinasional menyimpulkan bahwa model negara kesejahteraan atau *welfare state* itu sudah tidak efektif. Intervensi negara terhadap perekonomian rakyat terus dibatasi dan dihilangkan, sebaliknya mekanisme pasar yang sangat dibebaskan. Alih-alih menghindari keterpurukan negara karena beban pembiayaan subsidi rakyatnya, sistem ini justru menggenapi eksploitasi atas negara berkembang sebagai target pasar, penghasil bahan baku, dan penyedia buruh murah (Fakih, 2010: 23-28).

Dalam perdebatan klasik ideologi politik, apa pun yang berunsur kapitalisme akan menemukan posisi yang *vis a vis* saling berhadapan dengan sosialisme. Di tengah situasi ini, terdapat kelompok politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sudah turut mewarnai kehidupan politik masyarakat Indonesia sejak dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1996 yang lalu. PRD merupakan organisasi politik skala nasional yang berbentuk partai dan didirikan oleh jaringan aktivis mahasiswa maupun gerakan sosial multi sektor rakyat seperti kaum miskin perkotaan, buruh, petani, dan seniman dari berbagai daerah di Indonesia (KPP PRD, 1999: 12). Sejak awal kiprahnya PRD mengambil sikap sebagai oposisi terhadap *status quo*, dalam hal ini rezim Orde Baru yang dianggapnya otoriter, anti demokrasi, dan sudah sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. PRD aktif memelopori dan memimpin berbagai aksi protes atau demonstrasi yang selama beberapa dasawarsa sebelumnya sangat dilarang. Sikap politik PRD terbilang radikal karena selalu mengharapkan dan mendorong

terjadinya perubahan total dan sistemik pada Negara Indonesia yang dianggapnya sudah sangat menyimpang dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam dokumen resmi UUD 1945 dan falsafah Pancasila (Miftahuddin, 2004: 56-59).

Keberpihakan PRD kepada golongan masyarakat lemah yang dimarjinalkan haknya oleh sistem kekuasaan, dirasa sangat merongrong rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama tiga dasawarsa, ini membuatnya dituduh sebagai gerakan komunis gaya baru. Beberapa hari setelah kerusuhan 27 Juli 1996 di depan kantor PDI pimpinan Megawati di Jakarta yang dikenal sebagai peristiwa kudatuli, PRD dituduh sebagai dalang kerusuhan sehingga para pengurusnya ditangkap dan organisasinya secara resmi dilarang oleh Pemerintahan Soeharto melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 210 – 221 Tahun 1997 tentang Pembubaran dan Pelarangan Organisasi Partai Rakyat Demokratik tertanggal 30 September 1997. Namun, kader-kader PRD yang tidak ditangkap saat itu menjalankan taktik *clandestine* bawah tanahnya dengan terus mengkonsolidasikan gerakan perlawanan rakyat menuntut demokratisasi.

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada akhirnya lengser melalui proses gerakan reformasi pada 21 Mei 1998. PRD kembali dideklarasikan secara terbuka pada bulan Maret 1999 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Departemen Kehakiman Nomor 129/A/PP-PARPOL/II/1999 tertanggal 24 Februari yang mengakui PRD sebagai partai politik. Bahkan saat itu PRD bersama 47 parpol lainnya lolos verifikasi tim 11 dan ikut bertarung pada pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 dengan nomor urut 16 (Saksono, 2009; 114 -115).

Saat awal didirikan melalui Kongres I di Yogyakarta pada bulan April 1996 PRD menetapkan penggunaan azas sosial-demokrasi kerakyatan, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang secara substansial selaras dengan falsafah Pancasila. Menurut PRD, sebuah tatanan kekuasaan yang demokratik hanya bisa dilembagakan melalui sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik hasil koalisi kelas sosial, kelompok sektoral, serta kelompok progresif di Indonesia. Baru kemudian melalui Kongres VII di Salatiga Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2010, Pancasila resmi dijadikan azas yang melandasai perjuangan politik PRD. Dalam manifesto politik hasil Kongres tersebut dijelaskan bahwa azas Sosial Demokrasi Kerakyatan masih dinilai positif dalam makna perjuangan bagi demokrasi dan keadilan sosial, namun kurang mengekspresikan semangat kebangsaan dan kepentingan nasional yang telah menjadi kebutuhan obyektif bagi masyarakat Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil pendiskusian dan pemahaman yang mendalam atas hakikat Pancasila yang dimaksud oleh pencetus utamanya Ir. Soekarno maupun yang dipahami oleh para *founding father* di masa awal kemerdekaan, yakni sebagai perwujudan cita-cita sosialisme Indonesia yang otentik (KPP PRD, 2011: 4-6).

Dalam khasanah ilmu sosiologi, ideologi politik tergolong sebagai fakta sosial yang dapat dikaji layaknya suatu sistem keyakinan atau pandangan hidup dari kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana juga saat ilmu sosiologi melihat fenomena agama, maupun nilai-nilai tertentu yang dianut masyarakat (Ritzer, 1992:16-18). Sebagai fakta sosial, ideologi atau sosialisme dalam konteks ini merupakan fenomena yang mudah ditemukan dalam kehidupan politik

masyarakat. Biasanya ideologi diinterpretasikan sebagai seperangkat nilai berupa cita-cita luhur yang hendak dicapai dan diperjuangkan bersama-sama demi kepentingan yang dianggap baik oleh para pengikutnya. Ideologi direpresentasikan dengan munculnya kelompok-kelompok sosial yang saling berdinamika dan bertindak untuk menggapai kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat (Takwin, 2003:7-8).

Kelompok-kelompok politik yang ideologis ini pada dasarnya memiliki kesamaan visi yang universal yakni untuk mewujudkan kehidupan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, masing-masing kelompok memiliki perbedaan yang seringkali sangat bertentangan dalam memandang persoalan masyarakat dan jalan keluar yang harus diambil untuk menyelesaikannya. Penelitian tentang fenomena ideologi sosialisme Indonesia merupakan ranah kajian sosiologi politik, dalam hal ini perspektif makro sosiologi dipergunakan sebagai pendekatan untuk membedah secara historis hal-hal apa yang melatari terbentuknya konsep ideologi tersebut, menelusur sejarah aktualisasi dan perkembangannya hingga sekarang ini, termasuk juga mengkomparasikannya dengan varian ideologi lain yang masih dalam satu rumpun paradigma sosialisme.

PRD menjadi menarik bagi penulis dibandingkan organisasi politik lain semacamnya dikarenakan kiprahnya yang berliku dalam sejarah reformasi 1998 dan masih eksis sampai sekarang ini. PRD juga konsisten menjadi gerakan politik yang digolongkan kiri karena mengusung ideologi berhaluan sosialisme dengan mengusung Pancasila sebagai azas organisasinya. PRD sekarang ini juga

menghadapi situasi objektif yang sama sekali berbeda dengan masa awal kemunculannya. Dimana organisasi ini sempat mendapatkan momentum dan peluang politik sebagai pembaharu yang berwatak kerakyatan. Sementara di era sekarang ini struktur politik elit sudah kian meluas dan menguat, bahkan dengan sistem politik yang berlaku semisal peraturan tentang parpol, pemilu, dan otonomi daerah memberikan ruang yang ideal bagi kaum elit untuk membentuk jejaring oligarki yang kokoh di setiap daerah.

Selain itu, wacana ideologi sebagai dinamisator dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia masih sangat menarik untuk dikaji mengingat negeri ini sudah memasuki fase demokratisasi yang lebih lanjut, namun varian ideologi politik yang ada justru hanya berkembang seragam ke arah moderatisme. Situasi terkini di Indonesia adalah terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 – 2019. Hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini ialah momentum tahun politik atau rangkaian pemilihan umum legislatif dan presiden telah memunculkan kembali wacana nasionalisme *ala* Soekarno atau yang bernuansa semangat kemerdekaan khususnya tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa. Ditandai dengan signifikannya kemenangan partai-partai politik yang selama ini mengambil sikap resisten terhadap terbitnya kebijakan-kebijakan khas neoliberal oleh pemerintah sebelumnya. Pileg 9 April lalu menghasilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbanyak yakni 18,95%, Partai Gerindra di posisi ketiga dengan raihan suara 11,81%, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang meski pun masih baru tetapi berhasil masuk di urutan delapan dengan meraih suara 6,72%.

Dua kandidat yang maju sebagai capres di Pilpres 9 Juli, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, keduanya merupakan representasi dari parpol-parpol nasionalis yang dalam visi misinya selama kampanye mengusung semangat yang sama. Semisal Joko Widodo dengan gagasan Tri Sakti Bung Karno, sementara Prabowo Subianto dengan gagasan UUD 1945 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Secara substansial keduanya telah meramaikan kembali wacana anti neoliberalisme atau eksploitasi modal asing, serta membangkitkan optimisme dan partisipasi politik di kalangan masyarakat awam Indonesia.

Berangkat dari analisa awal atas realitas fenomena inilah, timbul skeptisisme yang mendorong rasa ingin tahu cukup besar bagi penulis, untuk menyusun skripsi dan membuat penelitian mengenai ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan sejauh manakah ideologi tersebut mempengaruhi gerakan politiknya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD) Komite Pimpinan Wilayah Lampung?
2. Bagaimanakah Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung mempraktekkan ideologi sosialisme Indonesia dalam gerakan politiknya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD) Komite Pimpinan Wilayah Lampung.
2. Mengetahui dan menganalisis praktek ideologi sosialisme Indonesia oleh Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung dalam gerakan politiknya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian makro sosiologi khususnya ranah sosiologi politik dan teori kritis yang berkaitan dengan ideologi, khususnya sosialisme di Indonesia. Diharapkan pula agar dapat merangsang munculnya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mapan demi perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat untuk berpikir dan bersikap terbuka sekaligus kritis, terutama terhadap muncul berkembangnya fenomena kelompok-kelompok politik yang mengusung ideologi tertentu dalam konteks mendewasakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Ideologi

2.1.1. Sejarah dan Pengertian Ideologi

Ideologi secara etimologi berasal dari kata *ideos* yang berarti pemikiran tentang kebenaran, dan *logos* yang berarti perangkat pengetahuan atau ilmu dalam bahasa Latin. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Perancis, Antoine Destutt de Tracy di akhir abad ke-18, untuk mendefinisikan cabang ilmu pengetahuan yang netral tentang ide-ide besar dari para teorikus yang lahir sebagai dasar bagi ketertiban sosial. Upaya ini dilatari oleh geliat zaman Pencerahan (*Enlightenment/Aufklärung*) di wilayah Eropa Barat, yang ditandai dengan diunggulkannya penggunaan rasio dan ilmu pengetahuan. Era ini melahirkan begitu banyak teorikus legendaris seperti Rene Descartes dengan rasionalismenya, Pierre Bayle dengan Skeptisismenya, Benedict Spinoza dengan panteismenya, Francis Bacon dan John Locke dengan empirismenya, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, dan sebagainya (Lelland, 2005: 8-9).

Konsep ideologi juga bisa dirunut lebih jauh, yakni dalam konsep *idea* dan dunia *idea* dari Plato, filsuf era Yunani Kuno sekitar abad ke-3 sebelum

Masehi. Plato berpandangan bahwa *idea* di dunia *idea* merupakan sebuah kebenaran yang sejati, rujukan bagi segala hal material yang ada di dunia fisik yang didiami oleh manusia sekarang ini. Setiap hal yang ada di dunia merupakan tiruan yang bersifat maya dan fana dari *idea*-nya masing-masing di dunia *idea* yang bersifat kekal. Manusia terdiri atas jiwa dan tubuh, jiwa berasal dari dunia *idea* yang hadir ke dunia fana di dalam tubuh manusia dengan membawa segala pengetahuannya tentang *idea* di dunia *idea*. Karenanya kebaikan ataupun pohon yang ada di dunia ini hanyalah tiruan dari *idea* kebaikan dan *idea* pohon di dunia *idea*. Dengan pengertian ide sebagai kebenaran yang hakiki seperti ini, maka ideologi adalah hukum tentang kebenaran yang sejati (Takwin, 2009: 8-9).

Pada awal kemunculannya ideologi memiliki arti yang positif dan optimistik, yakni sebagai penyelidikan rasional terhadap asal-usul pikiran, yang terbebas dari prasangka agama dan metafisika, tentang angan-angan akan masyarakat yang adil dan damai sebagaimana diterangkan oleh Tracy. Semisal George Lukacs teorikus asal Hungaria yang beraliran Marxis namun pandangannya justru menyebut ideologi sebagai sesuatu yang positif, yakni suatu kesadaran kelompok yang akan mengarahkan kelompok tersebut menuju ke arah kesejahteraan hakiki dalam kehidupannya (Thompson, 2014: 167-171).

Setelah Napoleon Bonaparte berkuasa di Perancis pada 1804, makna ideologi berkembang menjadi lebih negatif. Napoleon menganggap ideologi membuat manusia menjadi tidak realistis, menempatkan tujuan-tujuan ideal tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan materiil yang dibutuhkan

masyarakat. Pertentangan kedua tokoh sezaman ini memiliki peran historis bagi perubahan makna ideologi dari sekedar ilmu yang objektif tentang ide-ide menjadi suatu aliran pemahaman yang lebih subjektif (Lelland, 2005: 10).

Karl Heinrich Marx adalah orang yang kemudian ikut mengembangkan pemikiran bahwa ideologi merupakan sesuatu yang negatif karena bersifat mengelabui kesadaran manusia. Marx mengenalkan terminologi *false consciousness* atau kesadaran palsu sebagai hakikat dari ideologi karena sifatnya yang distorsif, memutarbalikkan realitas, dan membutakan manusia dari kenyataan yang sesungguhnya. Bagi Marx ideologi merupakan pikiran-pikiran irasional yang menimbulkan suatu pemahaman yang salah tentang dunia. Dengan pemahaman yang salah itu manusia penganut ideologi tertentu memahami dunia dan pemahaman itu menimbulkan suatu kesadaran tertentu tentang dunia. Karena pemahaman itu salah, maka kesadaran tentang dunia yang didasari oleh pemahaman itu juga salah, atau dengan kata lain bersifat palsu karena tidak sesuai dengan kenyataan dunia yang sebenarnya. Kesadaran palsu ini menyebabkan manusia terasing dari dunianya. Semakin manusia asyik dengan pikirannya yang didasari kesadaran palsu, maka akan semakin terasing pula ia dari kenyataan dunia (Takwin, 2009: 57-63).

Pandangan Marx kemudian juga diadopsi oleh Antonio Gramsci namun dengan berbagai modifikasi. Gramsci melihat bahwa negara juga melakukan penindasan serta represi terhadap rakyat. Namun, menurutnya penindasan itu tidak melulu berbentuk tindak kekerasan. Negara menggunakan juga pendekatan-pendekatan persuasif melalui berbagai media dan aspek kehidupan

rakyat. Negara berusaha menguasai rakyat lewat berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, agama, dan elemen-elemen budaya lainnya. Negara berusaha menguasai rakyat dengan cara mempengaruhi rakyat lewat segala sendi kehidupan terutama pola pikir. Usaha penguasaan rakyat oleh negara sampai ke dalam pola pikir dan nilai-nilai setiap individu disebut dengan istilah hegemoni (Takwin, 2009: 72-74).

Pandangan Marx dan Gramsci ini kemudian mempengaruhi Louis Althusser. Namun pemikiran Marx dan Gramsci oleh Althusser dipadukan dengan pendekatan strukturalisme. Tujuannya untuk membebaskan pemikiran Marx dari konsepsi ideologi sebagai “spekulasi murni” atau kesadaran yang palsu. Untuk menolak ideologi sebagai kesadaran palsu, strukturalisme harus memisahkan konsepsi ideologi dari pandangan yang menyatakan ‘subyek ikut serta dalam asal mula pembentukan ideologi’. Sebaliknya, materilah yang membentuk kesadaran subyek sehingga mengadopsi suatu ideologi. Ideologi bukan representasi palsu dari realita karena sumbernya bukan subyek tetapi realitas materil (Althusser, 2008: 42-47).

John B. Thompson (2015: 74-77) merangkumnya ke dalam dua bentuk umum konsepsi ideologi: (1) Konsepsi netral ideologi, yang bersifat positif dengan tugas pokoknya mengkategorisasikan fenomena sebagai ideologi ataupun bersifat ideologis tanpa secara langsung menyebutnya sebagai sesuatu yang menyesatkan, ilusif, dan sarat kepentingan. Tokohnya adalah Destutt de Tracy, VI Lenin, George Lukacs, Karl Manheim; dan (2) Konsepsi kritis ideologi, yang bersifat negatif, kritik, dan peyoratif karena fenomena yang dicirikan

bersifat ideologis adalah sesuatu yang dianggap menyesatkan, ilusif dan satu-sisi (*one-sided*) yang seharusnya diperangi dan dieliminasi. Tokohnya adalah Napoleon Bonaparte, Karl Marx, Antonio Gramsci, Louis Althusser.

Saling silang pemahaman antara konotasi positif dan negatif ini kemudian menjadi karakteristik dari keseluruhan sejarah konsep ideologi. Terry Eagleton (dalam Takwin, 2009: 2-4) mengatakan belum ada satu pun definisi yang baku atas terminologi ideologi dalam rumpun ilmu sosial, tapi dalam batasan-batasan tertentu kita selalu bisa saling menyepakatinya. Setidaknya beberapa pengertian ideologi yang umum beredar, antara lain :

- a. Proses produksi makna-makna, tanda-tanda, dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial;
- b. Sekumpulan karakteristik idea tau pikiran dari sebuah kelompok atau kelas tertentu;
- c. Ide-ide yang membantu melegitimasi kekuatan politik yang dominan;
- d. Ide-ide palsu yang membantu melegitimasi kekuatan politik dominan;
- e. Distorsi komunikasi yang sistematis;
- f. Sesuatu yang menempatkan subjek dalam posisi tertentu;
- g. Bentuk pikiran yang dimotivasi oleh interes sosial;
- h. Pemikiran tentang identitas;
- i. Ilusi sosial yang niscaya;
- j. Perpaduan (*conjuncture*) diskursus dengan kekuasaan;
- k. Media tempat aktor-aktor sosial yang sadar memahami dunia;
- l. Serangkaian kepercayaan yang menjadi orientasi bagi tindakan;
- m. Ketidakjelasan antara realitas linguistik dengan realitas fenomenal;
- n. Akhir pemaknaan dalam proses semiotik;
- o. Medium yang sangat penting bagi individu untuk menjalani hubungan-hubungan mereka dalam struktur sosial;
- p. Proses terjadinya ‘pengubahan’ kehidupan sosial menjadi realitas alamiah.

Namun, pengertian dan realitas ideologi sebagai konsep sosial yang begitu luas dan kompleks ini dalam perkembangannya seringkali direduksi menjadi sekedar ideologi politik ansikh. Terutama sebagai dampak dari ketegangan politik ideologis di dunia sepanjang abad ke-20. Terlebih di Indonesia yang memiliki situasi khusus, yakni trauma politik ideologis pasca Tragedi 30 September 1965, dimana masyarakat pada umumnya diwajibkan menerima doktrin negara akan ancaman bahaya ideologi politik tertentu. Ini membuat wawasan umum tentang ideologi di Indonesia begitu kabur dan kaku.

Konsep ideologi yang dipergunakan dalam penelitian ini justru akan lebih mengikuti pengertian yang serupa, yakni ideologi sebagai ideologi politik. Dalam konteks ini, ideologi dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir yang diyakini menjadi panduan hidup bagi kelompok sosial tertentu, dalam bertindak untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggapnya ideal. Ideologi merupakan dasar bagi usaha pembebasan manusia dari segala belenggu penindasan yang dihadapinya. Ideologi berkaitan dengan cita-cita, keyakinan, identitas, panduan, kerangka aksi, aturan-aturan, hingga nilai tentang hal-hal yang dianggap baik dan benar atau buruk dan salah. Atau yang dalam pandangan John B. Thompson (2015:14-15) disebut sebagai konsepsi netral ideologi, yang dipandang sebagai sistem pemikiran, sistem keyakinan, atau sistem simbol yang berhubungan dengan tindakan sosial dan praktik politik. Gambaran yang menjiwai ideologi hadir dalam setiap program politik dan menjadi ciri dari setiap gerakan organisasi politik tersebut. Ideologi cenderung dilihat sebagaimana istilah 'isme' seperti konservatisme, komunisme, Marxisme, Fordisme, dan sebagainya.

2.1.2. Ideologi Sebagai Fakta Sosial dalam Sosiologi

Konsep ideologi juga seringkali tereduksi karena dianggap sebagai domainnya kajian ilmu politik saja, padahal ideologi politik hanyalah satu aspek dari kajian ilmu sosial khususnya sosiologi sebagai induknya. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan dinamikanya tidaklah hanya mengkaji gejala-gejala sosial yang kasat mata, melainkan juga ranah pola berpikir masyarakat yang memicu hadirnya perubahan sosial. Dari keseluruhan konsep ilmu sosial, ideologi merupakan konsep yang paling kabur karena mempersoalkan dasar dan validitas gagasan paling fundamental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.

Fakta sosial merupakan salah satu paradigma dalam sosiologi dengan lingkup pengkajian yang berasal dari atribut eksternalitas, yakni mencakup struktur sosial, norma kebudayaan, sistem kepercayaan, mau pun nilai-nilai sosial. Fakta sosial bila menurut konsepsi Emile Durkheim (dalam Ritzer, 1992: 16-18) terdiri atas dua macam: (1) Berbentuk material, yaitu barang sesuatu (*thing*) yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi seperti arsitektur dan norma hukum; (2) Berbentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*), ini bersifat inter-subjektif yang hanya muncul dalam kesadaran manusia seperti egoisme, altruisme, opini, dan sebagainya.

Fakta sosial non material ini memang tak semudah memahami yang berbentuk material. Membutuhkan pembuktian yang serius dan spesifik untuk dapat menyatakan bahwa suatu fenomena itu nyata dan berpengaruh (*external and coercive*) terhadap kehidupan manusia. Durkheim menyebut meski tak kasat

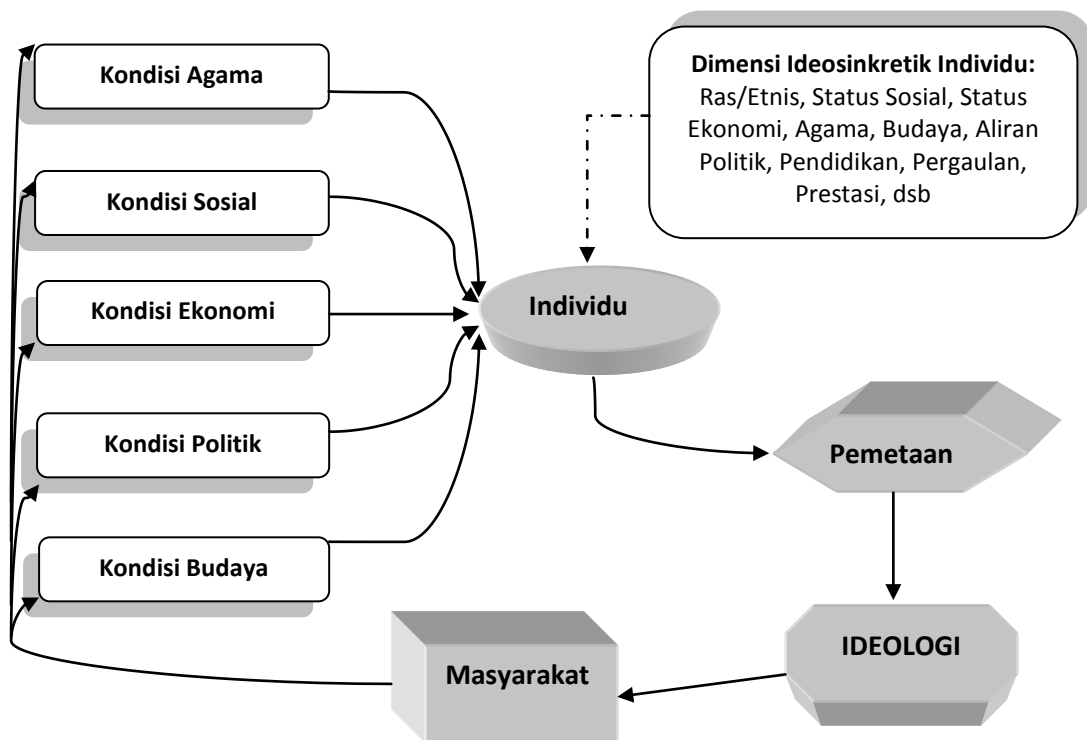
mata, fakta sosial ini dinyatakan atau dianggap pula sebagai barang sesuatu (*thing*) yang nyata karena bisa diuji eksistensinya. Sementara Peter Blau menegaskan paradigma fakta sosial mencakup realitas pranata sosial yakni norma dan nilai yang mengitari aktivitas manusia, serta struktur sosial yakni jaringan hubungan sosial dimana proses interaksi berlangsung dan terorganisir hingga dapat dibedakan dalam sub-sub kelompok (Ritzer, 1992: 21-23).

Masalah ini kemudian menarik minat para sosiolog terhadap kekhawatiran adanya kesenjangan antara yang ideal dengan yang bersifat materi, yang direpresentasikan oleh tindakan organisasi-organisasi sosial dan para pengikutnya, misalkan dalam hal antara norma-norma yang disetujui secara sosial dengan kenyataan dalam praktik-pratik yang bersifat aktual. Dalam konteks inilah, ideologi patut dijadikan sebagai objek studi ilmu sosiologi karena kompleksitasnya sebagai fakta sosial yang melibatkan dinamika masyarakat. Mengingat ideologi sebagai suatu sistem keyakinan bagi kelompok tertentu yang menganutnya dapat menimbulkan implikasi berupa tindakan sosial maupun politik, baik secara individu maupun kolektif yang dapat mempengaruhi dan memicu perubahan dalam situasi sosial tertentu.

Max Weber yang termashur dengan kajian fakta sosial non material berupa etika kaum protestan penganut Calvinisme yang beririsan dengan pembangunan spirit ekonomi kapitalisme di Eropa Barat pada abad ke 19, memperkenalkan istilah askese. Askese merujuk pada pemaknaan spirit tertentu yang diejawantahkan dalam etos hidup yang nyata dan disiplin dalam keseharian oleh kelompok manusia tertentu (Weber, 2006: 182-183).

Ada pun Seta Basri (2011: 167) menyebut dalam kehidupan manusia biasanya terdapat kondisi nyata seputar agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mudah diserap oleh individu dengan dimensi ideosentrik atau latar belakang yang beragam. Dimensi ini kemudian mempengaruhi kemampuan pemetaan berpikir individu terhadap kondisi-kondisi nyata tersebut. Proses pemetaan yang dilakukan pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan ideologi, yang kemudian disebarluaskan oleh individu tersebut, terutama kepada kelompok masyarakat yang berpotensi mendukungnya untuk mengubah kondisi-kondisi nyata tadi menjadi sesuai dengan tujuan dari ideologinya tersebut.

Gambar 2.1. Skema Pembentukan Ideologi Menurut Seta Basri.



(Sumber: Seta Basri, 2011)

2.1.3. Teori Analisis Ideologi

John B. Thompson merupakan sosiolog Inggris yang cukup kosen dalam kajian ideologi politik, dia mengemukakan bahwa setiap fenomena ideologi selalu memiliki pola umum yang dapat diamati dan dianalisis, terutama dalam hal strategi penyebarannya. Menurut John B. Thompson (2014: 183-184) terdapat 5 modus operandi dan strategi penyebaran ideologi, yaitu :

- a. Legitimasi, menurut Max Weber hubungan dominasi yang dibentuk dan dipertahankan harus memiliki legitimasi, dalam arti memiliki kesan bahwa hubungan dominasi secara sosial tersebut harus di pandang sebagai sesuatu yang baik dan layak di dukung. Penilaiannya bisa didasari oleh aspek hukum, politik, moral, religius, budaya atau keseluruhan aspek tersebut. Strategi-strateginya mencakup: Rasionalisasi, yaitu strategi konstruksi simbolik yang membentuk serangkaian penalaran yang cenderung mempertahankan atau membenarkan sebuah hubungan sosial atau lembaga sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk mendukungnya. Universalisasi, yaitu strategi konstruksi yang berusaha menjadikan susunan kelembagaan yang melayani interst sekelompok orang sebagai sesuatu yang seolah-olah melayani interest semua orang. Susunan kelembagaan ini ditampilkan terbuka bagi semua orang yang memiliki kemampuan dan keinginan berhasil didalamnya. Narativisasi, strategi konstruksi untuk menghasilkan klaim-klaim akan legitimasi di dalam kerangka cerita/narasi yang didalamnya masa lalu dan masa kini di tampilkan seolah-olah bagian dari tradisi yang abadi dan agung. Tradisi-

tradisi ini sering kali di ciptakan untuk membentuk *sense of belonging* dalam komunitas dan sejarah bersama sehingga mengatasi dan melampaui pengalaman konflik, perbedaan, dan perpecahan.

- b. Disimulasi, merupakan usaha untuk mendistorsi atau mengubah realitas dengan cara mengaburkan, menyembunyikan, menutup-nutupi realitas atau memberi pemaknaan lain bagi realitas. Perbuatan ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengalihkan perhatian dari kondisi yang sesungguhnya. Perbuatan ini dapat di capai dengan strategi: Pemindahan, strategi untuk mengalihkan perhatian dari satu objek ke objek lainnya, sehingga konotasi negatif atau positifnya yang ada pada objek pertama beralih pada objek kedua. Objek merupakan segala sesuatu yang dapat dipersepsikan manusia dalam kenyataan. Penghalusan, dengan strategi ini membuat sesuatu yang buruk di perhalus sedemikian rupa sehingga kesan negatifnya hilang berganti dengan kesan yang positif. *Trope*, strategi dengan menggunakan bahasa figuratif, seperti sinekdok (pergeseran semantik antara bagian dengan keseluruhan), metonimi (penggunaan bentuk simbolik yang mewakili karakteristik dari suatu hal untuk memaknai hal itu sendiri) dan metafora (penerapan suatu bentuk simbolik pada suatu obyek atau tindakan). Bentuk-bentuk ini di tampilkan sedemikian rupa sehingga menampilkan kesan positif yang baik, dan negatifnya menjadi tertutupi.
- c. Unifikasi, merupakan usaha untuk menyatukan proses dan hasil pemaknaan terhadap realitas. Hubungan dominasi dapat dibentuk dengan cara membentuk suatu kesatuan pada tingkat simbolik (kesatuan

pemahaman makna) dalam identitas kolektif, tanpa menghiraukan perbedaan dan perpecahan yang ada. Strategi untuk menerapkan ini adalah Standarisasi yaitu strategi yang kegiatannya terdiri dari usaha-usaha penyesuaian bentuk-bentuk simbolik pada kerangka standar / baku yang dianggap milik bersama dan di pandang sebagai dasr pertukaran simbolik. Simbolisasi kesatuan, strategi yang berupa konstruksi simbol-simbol kesatuan, identitas kolektif, dan identifikasi kolektif yang mengatasi kelompok atau pluralitas kelompok-kelompok.

- d. Fragmentasi, merupakan aktivitas memecah-mecah suatu hal menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini kelompok yang dominan dapat memecah individu-individu atau kelompok yang menentang sehingga hubungan dominasi dapat di bentuk. Bentuk lain dari fragmentasi adalah mengarahkan kekuatan dari kelompok oposisi ke sasaran yang di proyeksikan sebagai jahat, berbahaya, atau mengancam. Strategi yang dapat di gunakan adalah: Diferensiasi, strategi ini menekankan perbedaan antar individu atau antar kelompok serta memusatkan pada karakteristik yang memecah belah mereka agar tidak menentang system sosial yang ada. Penolakan terhadap yang lain, strategi ini menggambarkan sebuah kelompok sebagai kelompok yang jahat, mengancam, atau berbahaya sehingga individu-individu atau kelompok secara kolektif melawan atau menolaknya. Strategi ini merupakan cara untuk menciptakan musuh bersama.
- e. Reifikasi, merupakan kegiatan yang merepresentasikan (menggambarkan) suatu kondisi yang bersifat sementara sebagai kondisi yang bersifat

permanent atau alamiah. Kegiatan ini dapat dicapai dengan : Naturalisasi, strategi konstruksi simbolik yang menggambarkan suatu kondisi histories dan sosial sebagai kondisi alamiah atau hasil dari proses alamiah. Eternalisasi, strategi konstruksi simbolik yang menghilangkan aspek histories dari suatu gejala sosio-historis sehingga gejala itu dapat di gambarkan sebagai sesuatu yang permanent, tidak dapat berubah dan selalu berulang. Nominalisasi, strategi konstruksi simbolik dengan mengubah kalimat-kalimat atau bagian dari kalimat yang merujuk pada tindakan atau individu-individu yang terlibat dalam tindakan menjadi kata benda yang berkesan netral. Pasifisasi, strategi konstruksi simbolik yang merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nominalisasi dan pasifisasi merupakan strategi konstruksi simbolik yang menghilangkan tanggung jawab sang pelaku tindakan dan merepresentasikan suatu proses dengan benda. Modus dan strategi ini merupakan kegiatan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya (saling melengkapi). Strategi dan modus ini tidak bersifat baku dan konstruksi simboliknya tidak bersifat permanent tergantung dari kondisi-kondisi yang di hadapi.

Tabel 2.1. Strategi Penyebaran Ideologi Menurut John B. Thompson.

5 MODUS UMUM	Strategi Konstruksi Simbolik
<p>Legitimasi</p> <p>Membuat kesan bahwa relasi dominasi itu secara social adalah absah, baik dan layak didukung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rasionalisasi ○ Universalisasi ○ Narativisasi

<p>Disimulasi</p> <p>Upaya mendistorsi/mengubah realitas dengan cara mengaburkan, menutup-nutupi, atau menyematkan makna lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengalihan/Displacement ○ Euphemisasi ○ <i>Trope figurative</i> /metafora
<p>Unifikasi</p> <p>Usaha menyatukan proses dan hasil pemaknaan terhadap realitas dalam tataran simbolik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standarisasi ○ Simbolisasi kesatuan
<p>Fragmentasi</p> <p>Upaya memilah-milah hingga mengarahkan pandangan akan baik dan buruk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diferensiasi ○ <i>Expurgation of the other</i>/ penolakan
<p>Reifikasi</p> <p>Usaha merepresentasikan situasi yang sementara menjadi seolah permanen dan alamiah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Naturalisasi ○ Eternalisasi ○ Nominalisasi ○ Pasifisasi

(Sumber: John B. Thompson, 2014)

2.2. Tinjauan Tentang Sosialisme

2.2.1. Sejarah dan Pengertian Sosialisme

Secara terminologis, Michael A. Lebowitz (2009: 102-107) menerangkan bahwa sosialisme merupakan sebuah cita-cita universal yang mengharapkan terbangunnya peradaban masyarakat baru dengan prinsip emansipatif, egaliter, partisipatoris, protagonistik, asosiatif, kooperatif, dan berkeadilan sosial agar manusia mampu mengembangkan potensi serta kemampuannya secara utuh. Namun, gagasan sosialisme sudah muncul sejak awal abad ke-16 Masehi, terutama setelah terbitnya novel *Utopia* karya Thomas More pada tahun 1516

di Inggris. Baru berkembang lebih konkret dalam bentuk gerakan sosial dan politik pada kisaran abad ke-18 sampai awal abad ke-19 Masehi sebagai reaksi atas perkembangan dominasi sistem hidup kapitalisme yang ditandai dengan munculnya gerakan revolusi industri di Eropa Barat, yang dianggap melenceng dari cita-cita abad pencerahan dan malah berpotensi destruktif bagi nilai-nilai kemanusiaan serta peradabannya.

Sosialisme sebagai cita-cita universal pada akhirnya melahirkan banyak varian interpretasi dan tradisi dalam proses memperjuangkannya selama tiga abad terakhir, sebut saja Kaum Utopia, Anarkisme, Marxisme, Sosial Demokrasi, Komunisme, dan Kiri Baru (Newman, 2006: 1-3). Belakangan dikenal juga tradisi Sosialisme Abad 21 yang berkembang di beberapa negara dunia ketiga khususnya di wilayah Amerika Latin seperti Venezuela, Argentina, Uruguay, Brazil, Bolivia, Nikaragua, Ekuador, dan Peru. Berbeda dari tradisi revolusi di abad sebelumnya yang identik dengan metode pemberontakan bersenjata, tradisi baru ini metode perjuangan politiknya lebih mengedepankan revolusi melalui jalan demokrasi prosedural seperti pemilihan umum atau parlementer untuk mencapai kekuasaan (Soyomukti, 2007: 46-50).

Marxisme sendiri merupakan salah satu varian sosialisme yang berangkat dari pemikiran Karl Marx dan rekannya Friederich Engels di abad ke-19 Masehi, Mereka menghasilkan apa yang kemudian disebut sosialisme ilmiah (*scientific socialism*), ini dianggap paling komprehensif dalam mengkritik kapitalisme dan merefleksikan cara mewujudkannya. Berbeda dari para pendahulunya yang disebut kaum sosialis utopis, Marx menganggap perjuangan mewujudkan

sosialisme tak bisa dengan cara hanya menghayalkannya, melainkan harus dilakukan dari dalam sistem kapitalisme itu sendiri dengan mengandalkan kekuatan perlawanan atau resistensi politik kaum buruh atau proletar sebagai kelas sosial yang paling tertindas. Marx juga menerangkan kapitalisme sebagai sistem hidup anomalis yang sarat akan kontradiksi internal dan akan menggiringnya mencapai titik katastrofi hingga meruntuhkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya peradaban manusia akan memasuki tahap baru menuju sistem hidup sosialistik yang sama sekali berbeda dari tahapan yang pernah ada sebelumnya. Marxisme pada perkembangannya menjadi tradisi pemikiran sosialis yang paling dominan melalui teori materialisme historis dan dialektikanya (Lorimer, 2013: 30-53).

Awal abad ke-20 Masehi, Partai Buruh faksi mayoritas Bolsyevik meraih kemenangan politik yang mutlak di Rusia dengan mengalahkan kekuatan politik feodal Tsar dan kelas elit borjuasi sebelumnya. Sejak itu istilah komunisme selalu diidentikkan dengan tradisi pemikiran Marxisme-Leninisme yang telah menghasilkan suatu Revolusi Proletariat pertama di dunia, tepatnya negeri Rusia pada Oktober 1917. Terbentuklah negara Uni Soviet, yang kemudian menjadi poros utama bagi negara-negara komunis lain di dunia yang berdiri setelahnya hingga tahun 1991. Komunisme difahami sebagai cita-cita mewujudkan peradaban masyarakat ideal tanpa adanya relasi penindasan akibat stratifikasi kelas sosial, yakni dengan dihapuskannya hak milik privat. Namun, prosesnya terlebih dahulu harus ada penyatuan seluruh gerakan politik kaum buruh di dalam naungan sebuah partai revolusioner tunggal yang memimpin pemerintahan negara berbentuk diktator proletariat. Sistem ini

menggunakan prinsip sentralisme-demokratik sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan negara yang nantinya wajib dilaksanakan oleh setiap warga negaranya (Suseno, 2005: 4-6).

Sejak itu pula pengertian sosialisme semakin kabur tercampur dengan komunisme atau pun Marxisme, bahkan generalisasi yang lebih jauh lagi menyamakannya dengan atheisme. Padahal masing-masing memiliki perbedaan yang spesifik secara fundamental, meski dalam beberapa hal terdapat irisan yang selaras. Namun, perlu diakui wacana dan diskursus mengenai sosialisme memang tak bisa terlepas dari konsepsi *scientific socialism* yang digagas Karl Marx, sekalipun sudah banyak mengalami perubahan interpretasi yang sangat variatif. Franz Magnis Suseno menyebut:

“Meski kekuatan komunisme sudahlah pudar, pemikiran Karl Marx tetap saja menantang, karena bukan saja menjadi inspirasi dasar bagi Marxisme sebagai ideologi perjuangan kaum buruh, dan bukan saja menjadi komponen inti dalam ideologi komunisme, pemikirannya justru jadi salah satu rangsangan terbesar bagi perkembangan ilmu sosiologi, budaya, ekonomi, politik, dan filsafat kritis di seluruh dunia.. Satu unsur khas dari pemikiran Marx adalah tidak tinggal dalam wilayah teori, melainkan menjadi sebuah kekuatan sosial bahkan politik. Hanya Marx yang berhasil mengembangkan suatu pemikiran yang pada dasarnya filosofis namun kemudian menjadi teori perjuangan bagi sekian banyak ragam generasi gerakan pembebasan” (Suseno, 2005).

Perkembangannya belakangan, sosialisme sebagai suatu ideologi politik cukup banyak dikaji ulang. Jules Townshend (2003: 318-320) bahwa keruntuhan Uni Soviet dan satelitnya hanya mengakhiri sebuah eksperimen sosialisme, karena negara tersebut bukanlah sosialisme yang sesungguhnya. Teori sosialis sedang proses revisi mengakui kebutuhan akan pasar, demokrasi yang bertanggung jawab dan pertimbangan untuk tidak hanya mengutamakan kaum proletar.

Sementara Dipo Negoro (2013: 1-3) menerangkan perlu diketahuinya apa yang dimaksud dengan kaum sosialis dan perbedaannya dengan penganut ideologi politik yang lain. Pertama, kaum sosialis adalah mereka yang sangat peduli terhadap penderitaan manusia, maupun pencemaran lingkungan hidup di dunia yang terjadi akibat konsekuensi logis penindasan dan ketidakadilan yang terkandung sistem kapitalisme. Kedua, tidak hanya menyadari dan memiliki kepedulian, kaum sosialis juga percaya memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk mengubah keadaan tersebut. Posisi ideologi politik sosialisme dengan demikian memang selalu berada dalam posisi yang *vis a vis* atau bertolak belakang dengan sistem kapitalisme yang melatari peradaban industrial yang berlangsung saat ini.

Posisi yang demikian mengarahkan pandangan bahwa sosialisme sebagai ideologi politik merupakan salah satu representasi utama dari politik sayap kiri di dunia. M. Rolip Saptamaji (2014: 14-15) menerangkan bahwa istilah kiri adalah euphemisme atau penghalusan kata dari berbagai tindakan dan pemikiran radikal mengenai perubahan sosial.

“Kiri mewakili berbagai spektrum ideologi yang menentang dominasi minoritas terhadap mayoritas. Kiri merupakan penanda perubahan yang dipertentangkan dengan kanan penanda kestabilan”, (Saptamaji, 2014).

Sosialisme biasanya identik dengan upaya penentangan terhadap stabilitas *status quo* atau kekuasaan yang sedang berlangsung dan bersifat menindas, karenanya ideologi ini dan berbagai variannya paling utama dikategorikan kiri. Namun, dikotomi seperti ini tidak dapat dilangsungkan secara kaku, karena dalam beberapa kasus juga ditemukan pengusung ideologi sosialisme yang berkuasa dan menindas.

2.2.2. Varian Tradisi Ideologi Sosialisme

Sebagaimana disinggung sebelumnya ideologi politik sosialisme di dunia memiliki cukup banyak varian sejak awal perkembangannya hingga sekarang. Penelitian tentang kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini membutuhkan gambaran ringkas tentang berbagai varian tradisi interpretasi dan praktek sosialisme yang cukup berpengaruh secara politik. Ini diperlukan terutama sebagai panduan memahami inspirasi maupun arah gerakan politik PRD yang mengaku telah mengusung sosialisme sebagai ideologinya di Indonesia. Beberapa varian yang dimaksud, diantaranya :

- a. Anarkisme, meski kurang berkenan dikategorikan dalam rumpun yang sama dengan sosialisme, karena ikut memandang kabur terhadap generalisasi Marxisme. Namun, ideologi anarkisme terbukti tak bisa dipisahkan baik secara historis maupun esensial dari cita-cita universal sosialisme. Anarkisme memiliki sebuah cita-cita yang disebut *anarkhia*, yakni keadaan tanpa adanya kekuasaan yang memaksa (Suseno, 2005:241-243). Pandangannya terhadap negara hakekatnya hanya sebagai kekuatan despotik atau pemaksa dan penindas, apapun bentuknya: monarki, republik, bahkan sosialis sekalipun. Anarkisme menghendaki penataan ekonomi secara adil dan melenyapkan sama sekali bentuk formal negara. Politik bagi anarkisme adalah jalan menyesatkan, ia lebih mengedepankan penguatan aliansi atau komunitas yang melakukan gerakan huru-hara, pemboikotan, vandalisme, hingga teror terhadap simbol-simbol negara seperti lembaga maupun bangunan tertentu (Plekhanov, 2006: 87-89).

Secara historis, anarkisme tumbuh beriringan dengan Marxisme, keduanya sama-sama berpijak dari kebuntuan gagasan sosialisme utopis para pendahulunya. Mikhail Bukanin sebagai tokoh utamanya adalah salah seorang anggota Internationale I, sebuah jejaring gerakan sosialisme internasional yang pertama kali dibentuk di abad ke 19. Karl Marx yang kemudian melahirkan tradisi Marxisme terlibat sebagai salah satu tokoh kunci dalam gerakan tersebut, di sanalah mereka kerap bertentangan hebat hingga berujung pada perpecahan antar dua kelompok di tahun 1872. Kelompok-kelompok pengusung anarkisme lebih banyak berbentuk komunitas anti kemapanan yang menolak langsung eksistensi negara terhadap dirinya. Beberapa contohnya seperti sindikat komunitas Punk, dan Skinhead yang kerap mendapat stigma buruk sebagai orang liar.

- b. Komunisme, bagi Karl Marx merupakan gambaran bentuk corak produksi dan peradaban masyarakat di masa depan yang dibangun lewat revolusi kekuatan tenaga produktif kapitalisme, yakni kaum buruh atau kerap disebut kelas proletariat (Ritzer, 2013: 78-80). Elemen kunci dalam mewujudkan komunisme lewat jalan revolusi itu selalu berkaitan dengan peran kaum buruh dan peran sebuah partai politik (Newman, 2006: 44-45). Kelas proletariat dianggap sebagai satu-satunya kelas sosial yang menjadi mayoritas dan paling sadar akan ketertindasan dirinya dalam sistem kapitalisme, karenanya gerakan pembebasan yang dilakukan olehnya akan mengarah pada terbentuknya sebuah partai politik. Partai ini kemudian yang akan tampil menjadi instrument utama untuk memelopori revolusi, menciptakan perubahan cepat, dan radikal, termasuk dengan cara-cara

kekerasan. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara diktator proletariat yang bertugas menyiapkan segala sesuatunya untuk menggapai cita cita komunisme yang sejati. Secara sederhana kerap dikisahkan dengan perkataan: “Dari setiap individu dengan kemampuannya, untuk setiap individu berdasarkan kebutuhannya!”.

Meski prediksi awalnya revolusi komunisme akan terwujud di negeri kapitalis yang paling maju tingkat industrialisasinya seperti Inggris, Perancis, Jerman, justru revolusi pertamanya terjadi tahun 1917 di negeri Rusia dalam wilayah Eropa Timur, yang notabene dikenal belum matang industrialisasinya. Komunisme yang radikal dengan V.I. Lenin sebagai tokoh pelopornya menjadi praktek sosialisme yang paling mendominasi selama abad 20. Bahkan konsepnya terus berkembang mengikuti situasi objektif dimana ideologi itu dipraktekkan, sebagaimana tampak dari gerakan komunis di Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Tse Tung atau di Vietnam dengan Ho Chi Minh sebagai pimpinannya.

Tatiana Lukman (2013: 97-103) menerangkan di Tiongkok memiliki ciri khusus, yakni mempercayakan revolusi kepada kaum tani yang biasanya dipandang remeh sebagai kelas tertindas sisa peradaban feodal dan identik dengan keterbelakangan. Dibandingkan kaum buruh yang lebih terdidik, disiplin, dan memiliki pola hidup terorganisir yang akan lebih efektif pula pengorganisasian gerakannya dalam mengusung sebuah revolusi. Namun, gerakan komunisme di Tiongkok berhasil memahami situasi objektif peradabannya hingga membuktikan kaum tani sebagai sekutu andalan kaum buruh dengan tercapainya revolusi di tahun 1947.

c. Sosial Demokrasi, kerap juga disebut dengan *Euro Communism* karena pertama kali dipraktekkan di masa pasca Perang Dunia Pertama oleh kaum Marxis di negeri-negeri Eropa Barat yang dikenal paling dahulu menjadi basis revolusi industri di dunia sebagai reaksi atas revolusi dan praktek komunisme di Rusia. Diterangkan Jules Townshend (2003: 101-105) secara historis, sejak masa organisasi Internationale II dan III kemudian berlanjut di era Vladimir Illych Lenin dan Karl Kautsky di awal abad 20, sudah terjadi perdebatan sengit antar dua kubu besar kaum Marxis di dunia dalam memperjuangkan sosialisme yang ilmiah. Kekuatan yang menghendaki perubahan radikal secara evolusioner dengan jalan damai melalui jalur parlementer dalam negara borjuis, dengan kekuatan yang menghendaki perubahan radikal secara revolusioner dan bertujuan langsung menghancurkan negara borjuis.

Thomas Meyer (2003: 217-222) menerangkan asal mula istilah atau penamaan sosial-demokrasi merupakan sebagai upaya untuk membedakan diri dari apa yang disebut dengan komunisme. Kedua kelompok inilah yang sebelumnya pernah berjuang bersama mewujudkan cita-cita dari sosialisme ilmiah sedunia yang digagas oleh Karl Marx. Namun, perbedaan yang mencolok dan tak terdamaikan dalam hal strategi dan taktik perjuangan justru menimbulkan perpecahan diantaranya, sehingga masing-masingnya melakukan identifikasi diri dengan penamaan gerakan dan ideologinya. Sebelumnya di era Marx hidup, memang secara tidak konsisten dipergunakan istilah *democratic-socialism* maupun *communism* bagi penamaan ideologi sosialisme ilmiah tersebut.

Sosial demokrasi yang kerap disingkat sosdem, berpijak pada pandangan yang sama dengan kaum Marxis ortodoks, bahwa sudah menjadi tugas luhur bagi kaum buruh atau kelas proletar untuk merebut kekuasaan dari kelas borjuis. Namun, terkait strategi parlementer yang menjadi ciri utamanya, John Molyneux (2000: 47-49) menerangkan, ini berangkat dari keyakinan bahwa sosialisme otomatis akan hadir sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi di dalamnya menyebabkan pertumbuhan kuantitas kelas proletar, inilah yang menjadi basis material dukungan bagi partai politik berhaluan sosdem untuk meraih posisi mayoritas di dalam parlemen. Negara merupakan alat kekuasaan kaum borjuis untuk menindas, karenanya kelas proletar harus sadar dan merubah wataknya. Partisipasi proletariat dalam parlementer merupakan alat yang efektif untuk mengangkatnya dari kesengsaraan ekonomi, sosial, dan moral. Partai milik kaum buruh ini harus menjadi oposisi dan tidak berkoalisi dengan partai-partai borjuasi, hingga akhirnya berhasil menjadi mayoritas dan bisa membangun pemerintahan sendiri.

- d. Kiri Baru, atau *New Left* marak berkembang pasca berakhirnya era perang dingin yang membagi politik dunia dalam dua kutub di abad 20. Secara bertahap dominasi komunisme dan sosial demokrasi atas konsep-konsep sosialisme kian terkikis. Terjadi arus eksodus keanggotaan dari partai-partai politik sayap kiri dan gerakan buruh yang dianggap mengalami kebuntuan. Baik karena kecenderungan otoritarian dan ortodoksi komunis, maupun ambiguitas sosdem dalam membangun politik transformatif atas kapitalisme (Newman, 2006: 148-154).

Keutamaan peran kelas proletar yang terorganisir dan determinasi ekonomi politik atau corak produksi dalam revolusi sosialis menjadi gugatan utama *New Left*. Diyakini tidak ada pembacaan yang paling mutlak benar atas Marx untuk mencapai tujuan politiknya di masa akhir ataupun postmodern dari kapitalisme. Namun, *New Left* belum pernah menjadi sebuah gerakan politik yang koheren. Terjelma dalam berbagai bentuk gerakan sosial, ide-ide intelektual, dan kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dari tradisi Marxis dominan. Penekanannya pada kesadaran atas konsep-konsep kunci Marxisme dan pengembangannya, seperti: dialektika, ideologi, alienasi, fetisisme komoditas, dominasi subjek tertindas sebagai sumber transformasi sosial (Agger, 2005: 18-19).

New Left merupakan wujud nyata pluralitas interpretasi dan praktek dari ideologi sosialisme. Keyakinannya bahwa bentuk-bentuk dominan dari teori dan praktek sosialis sudah tidak lagi memadai karena memarjinalkan atau mengabaikan isu-isu dan persoalan yang juga nyata dalam masyarakat selain perjuangan kelas. Gerakan sosial yang termasuk semisal gerakan feminisme, ekologis, hak asasi manusia, ataupun komunitas pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam gerakan intelektual berkembang paradigma teori sosial kritis yang menentang persepsi bebas nilai seperti: Mazhab Frankfurt, neo-Marxian/post-Marxis, kajian gender, *cultural studies*, analisis wacana, psikoanalisa. post-kolonialisme. Namun, keberagaman fokus dan isu tersebut menurut Michael Newman (2006: 155) juga dapat dipandang sebagai wujud fragmentasi atau desentralisasi yang memecah-belah konsentrasi kaum sosialis sedunia.

e. Sosialisme Abad 21, merupakan tradisi gerakan politik sosialis yang baru berkembang terutama di wilayah Amerika Latin. Inilah penekanannya, bahwa sorotan utama praktek sosialisme di abad lalu berada dalam determinasi Eropa atau negeri-negeri yang besar secara ekonomi-politik. Sementara yang disebut sebagai tradisi Sosialisme Abad 21 mengarah pada praktek sosialisme di negeri-negeri kecil, yang bahkan kerap dipandang hanya punya potensi menjadi satelit dari poros besar.

Dugaan trend sosialisme di abad ke-21 akan didominasi keruntuhan segala bentuk partai atau gerakan politik dan beralih dalam gerakan-gerakan sosial variatif, ternyata juga meleset. Nurani Soyomukti (2008: 65-80) menguraikan penganut paradigma teori kritis yang mengklaim telah mengevaluasi dan memberi makna baru terhadap proyek emansipatoris Marxisme, justru bergerak ke arah utopia karena cenderung apatis kapitalisme bisa dikalahkan. Meski dibangun tradisi intelektual organik yang mewajibkan kajian akademik harus berani melebur langsung dalam realitas persoalan yang dihadapi masyarakat tertindas, tanpa dikerucutkan dalam perjuangan politik terorganisir untuk mengambil alih kekuasaan, justru menjadi modus selubung ideologis atau manipulasi dari pihak-pihak yang menyelenggarakan penindasan.

Realitas penindasan sistem kapitalisme di negeri-negeri dunia ketiga dan bekas kolonial memang memiliki perbedaan yang signifikan ketimbang negeri-negeri maju yang dijuluki dunia pertama. Apa yang disebut sebagai posmodernisme sebagai tahap paling mutakhir dari kapitalisme menjadi sangat kabur dan bahkan tidak relevan. Alih-alih hanyut dalam segala

absurditas budaya kapitalisme, di negeri-negeri terbelakang justru timbul gejala resistensi yang keras terhadap fenomena yang disebut neokolonialisme atau penjajahan gaya baru dalam topeng neoliberalisme dan globalisasi. Sebagaimana dikatakan Hugo Chavez (dalam Harnecker, 2007: 184-190) yang menyadari betapa masih relevan dan krusialnya pembangunan partai politik bagi gerakan revolusioner:

“Kami mengatakan, sebuah bangsa tak cukup hanya dengan adanya jumlah rakyat puluhan juta, harus terdapat suatu rasa identitas, mimpi, dan proyek bersama, tanpa kesadaran itu mereka hanya orang-orang tanpa arah dan harapan.. Kini kebangkitan itu sendiri belum cukup, terpenting agar rakyat mengorganisir dirinya, penting agar kekuatan kerakyatan itu dipersatukan dan diperkuat.. Alih-alih bergerak ke depan dengan ribuan individu dengan jalurnya masing-masing, rakyat akan menemukan sebuah arah bersama,” (Chavez dalam Harnecker, 2007).

Mengapa di awal millennium ke tiga ini berlangsung arus baru dalam perjuangan mewujudkan sosialisme di Amerika Latin, tidaklah terlepas dari kekhususan latar historis yang panjang. Tradisi kiri dalam sejarah politik di kawasan benua ini memang kuat, bahkan nilai-nilainya sudah turut menjadi fondasi masyarakat sejak abad ke-19 hingga 20. Secara umum terbagi dalam empat kategori: (1) Partai-partai komunis tradisional dan ortodoks, berdiri sejak tahun 1920-an di daerah urban dan menjadi satelit Uni Soviet; (2) Kelompok kiri populis dan nasionalis, identik dengan pemimpin kharismatik dan organisasi massa. Seperti Juan Domingo Peron, Presiden Argentina tahun 1946 yang dikenal karena mengajukan konsep *third position*; (3) Organisasi politik dan militer, bercirikan perjuangan bersenjata sebagaimana dimenangkan Fidel Castro

di Kuba tahun 1959; (4) Kelompok-kelompok kiri reformis, yang memilih jalan damai lewat politik formal seperti kemenangan Presiden Salvador Allende di Chili tahun 1970 (Soyomukti, 2007: 41-49).

Namun, perjuangan sosialisme di kawasan ini juga mengalami depresi berat sejak komunisme internasional mengalami krisis dan runtuh. Ditambah reorganisasi kekuatan dunia telah menguatkan Amerika Serikat sebagai poros hegemoni kapitalisme-neoliberal yang menjadikan kawasan ini sebagai halaman belakangnya, atau dengan kata lain sasaran utama eksploitasi ekonomi-politik (Sugiono, 2006: 61-63). Latar ini pula yang menjadikan perlawanan dan pengorganisasian rakyat tertindas lebih kuat dibanding kawasan lain, seperti Asia dan Afrika.

Tradisi baru ini memang dipelopori Venezuela dengan kepemimpinan Hugo Chavez Frias yang memenangi 58% suara di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1998. Setelah hampir seperempat abad, perekonomian negeri yang kaya akan minyak bumi itu berada dalam keadaan buruk. Selain tekanan besar dari kepentingan modal asing, juga menghadapi korupsi yang merasuk ke seluruh lembaga negara, hingga jurang kemiskinan struktural diderita warganya. Keunikan kasus Venezuela selain membalikkan proses, yakni merebut kekuasaan lebih dulu secara konstitusional, baru menjalankan revolusi. Digunakannya ketokohan Simon Bolivar dijuluki Sang Pembebas dalam sejarah perjuangan Amerika Latin terhadap kolonialisme sebagai pemikat dan pemersatu. Tampak dari penyematan nama baru Republik Bolivarian Venezuela, dan penyusunan Konstitusi Bolivarian (Lebowitz, 2009: 175-179).

Sementara Freddy J. Mello (dalam Lukman, 2013: 310-311) menyebutkan lima ciri pokok jalan revolusi Venezuela: (1) Pemberian karakter nasional kepada revolusi melalui penggunaan nama pahlawan; (2) Dimasukkannya unsur-unsur dan simbol religiusitas; (3) Penekanan karakter pasifis revolusinya, transformasi sosial radikal bisa ditempuh secara damai dan demokratis; (4) Mempersatukan kekuatan pokok revolusi melalui pengembalian kesadaran cinta tanah air pada Angkatan Bersenjata; (5) Sosialisme Abad 21 dicapai melalui demokrasi partisipatoris, dengan rakyat yang memainkan peran pokoknya. Mello juga mengingatkan pembangunan sosialisme bukanlah proses instan, yang berarti kubu kapitalis dan sosialis akan hidup berdampingan untuk saling berlomba dalam jangka waktu yang panjang.

Keistimewaannya bahwa proses pembangunan sosialisme tersebut meluas hingga mendominasi kecenderungan politik yang mendelegitimasi neoliberalisme di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Bukan hanya mengincar kemenangan reformis di parlemen seperti sosdem, tradisi ini gigih mengupayakan dimenangkannya posisi pemerintahan untuk melancarkan revolusi yang konstitusional. Seolah bersambut semangat zaman, di tahun 2006 beberapa negara di kawasan tersebut secara beruntun menyelenggarakan pemilu. Hampir seluruhnya dimenangkan para kandidat politik sayap kiri, ini yang kemudian melancarkan konsolidasi pembentukan ALBA (*Alternativa Bolivariana par alas Americas*) untuk menandingi pasar bebas kawasan yang disponsori kepentingan Amerika Serikat (Soyomukti, 2007: 36-38).

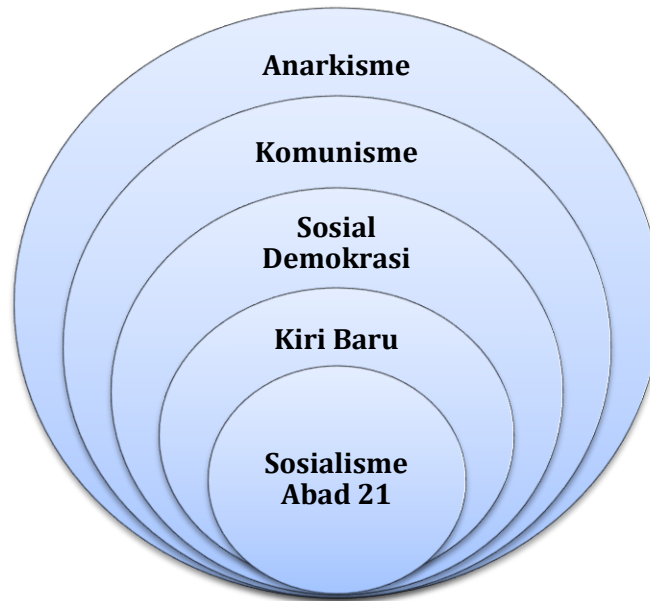
Tabel 2.2. Hasil Pemilu Presiden Tahun 2006 di Amerika Latin

Negara	Pelaksanaan Pemilu	Suara Kandidat Sayap Kanan (%)	Suara Kandidat Sayap Kiri (%)	Partisipasi Pemilih Terdaftar (%)
Bolivia	18 Desember 2005	28,6	53,7	84,5
Chile	15 Januari 2006	46,5	53,5	87,7
Kostarika	5 Februari 2006	3,5	40,9	65,2
Haiti	7 Februari 2006	12,4	51,2	59,3
Kolombia	28 Mei 2006	62,3	22,0	45,1
Peru	4 Juni 2006	52,6	47,4	87,7
Meksiko	2 Juli 2006	36,4	35,5	58,9
Brazil	29 Oktober 2006	39,2	60,8	81,0
Nikaragua	7 November 2006	29,0	38,1	61,2
Ekuador	26 November 2006	43,3	56,7	75,5
Venezuela	3 Desember 2006	36,9	62,9	74,9

(Sumber: Nurani Soyomukti, 2008)

Salah seorang teorikus utama dari tradisi ini, Martha Harnecker (2015: 82-91) mengingatkan untuk tidak memandang proses di Amerika Latin sudah bersifat final. Mengingat kawasan tersebut merupakan tempat pertama kalinya kebijakan neoliberalisme diberlakukan, dampak berupa kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, ataupun kerusakan alam telah begitu parahnya menggerogoti rakyat. Kebanyakan kekuatan politik sayap kiri belum berhasil memenangkan negara, baru pemerintahan yang dikuasai. Ini baru sebagian kecil, mengingat kekuasaan negara tak terbatas pada cabang eksekutif, tapi mencakup legislatif, yudisial, angkatan bersenjata, dan badan-badan pemerintahan lokal. Kembali pada asumsi sosialisme harus berakar dalam masyarakat tertentu. Meski ada tujuan bersama, titik tolak, langkah, juga tindakan yang diambil dalam proses transisi harus disesuaikan dengan kondisi khas di setiap negara.

Gambar 2.2. Varian Tradisi Ideologi Sosialisme



(Sumber: Data Sekunder, 2015)

2.2.3. Sosialisme Indonesia dan Riwayatnya di Indonesia

Ideologi sosialisme di Indonesia pernah mendapatkan tempat yang cukup istimewa dalam kehidupan politik Bangsa ini juga karena didukung situasi peta politik dunia saat itu yang sedang terbelah dalam dua kutub besar ideologi kanan seperti liberalisme, kapitalisme, dan konservatisme, versus ideologi kiri seperti komunisme, sosialisme, dan anti kolonialisme.

Menurut Jeanne S. Mintz (2003: 17-19) diperkuat juga oleh dua latar situasi objektif yang inheren dalam *landscape* atau *setting* sosial masyarakatnya. Pertama, fakta penjajahan/ kolonialisme oleh Bangsa asing selama beberapa abad yang telah begitu menyengsarakan. Dalam situasi itu, gagasan sosialisme yang dibawa masuk oleh para politikus Partai Sosial Demokrat Belanda dalam bentuk ajaran marxisme, dirasa mampu menjawab secara utuh bagaimana relasi penindasan dalam sistem kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda.

Sebagai dampak dari perkembangan pesat sistem hidup kapitalisme di Eropa Barat yang menuntut persaingan pelipatgandaan laba antar negara bangsa dengan cara memperebutkan perluasan wilayah koloni penghasil bahan baku, tenaga kerja, sekaligus pasar bagi produk yang dihasilkan oleh industri mereka.

Terlebih lagi dengan hadirnya penjelasan Lenin tentang sistem imperialisme modern yang menunjukkan bahwa dominasi asing seperti itu bukanlah perwujudan hubungan yang kekal, alamiah, dan kodrati antara orang kulit putih dan berwarna itu tidak setara, melainkan sekedar pencapaian fase sejarah tertentu dari sistem kapitalisme. Dengan demikian gagasan sosialisme terutama dalam bentuk Marxisme dianggap hadir tepat di saat masyarakat Hindia Belanda mengalami masa genting pembentukan identitas kebangsaan atau nasionalismenya, sehingga membangkitkan optimisme bahwa penjajahan bangsa asing pasti akan bisa diakhiri.

Setting sosial kedua yang turut menentukan adalah tradisi hidup masyarakat Indonesia pada umumnya, yakni prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat. Nilai yang terkandung dalam dua tradisi tersebut memang dapat dipandang selaras dengan esensi dalam sosialisme, yang memiliki semangat membangun sistem masyarakat kolektif, mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kemakmuran, dan prosesnya diselenggarakan melalui kesadaran politik yang sentralisme demokratis.

Masyarakat kita juga mengenal banyak macam kisah epik dari berbagai daerah semisal tentang Ratu Adil ataupun cerita pewayangan lain, yang mengharapkan kelak akan terbangun susunan masyarakat yang *tata tentrem*,

kerta rahardja, gemah ripah, loh jinawi. Dipa Nusantara Aidit (1962: 27) menerjemahkan gagasan Bung Karno dalam banyak kesempatan pidato kenegaraan itu sebagai suatu cita-cita sosial yang tumbuh di dalam sanubari rakyat Indonesia agar negaranya mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram, ramah-tamah, kekeluargaan, dan tanahnya subur.

Namun, secara umum terdapat lima kategori aliran politik yang berkembang dominan dalam masyarakat Indonesia pada era tersebut sebagaimana diterangkan Herbert Feith (dalam Nasikun, 2006: 65), yakni: (1) Nasionalisme Radikal, sebagai reaksi atas ratusan tahun penjajahan kolonialisme bangsa asing; (2) Islam, baik yang modernis maupun konservatif sebagai agama mayoritas; (3) Komunisme, yang diserap dari pemikiran Barat untuk mengisi kemerdekaan dengan pemerintahan rakyat jelata; (4) Sosialisme Demokrat, oleh kelompok terpelajar yang terinspirasi pemikiran barat tentang negara kesejahteraan; dan (5) Tradisionalisme Jawa, yang menjadi prinsip hidup kebanyakan masyarakat sipil.

Sistem kepartaian di Indonesia pada era itu memiliki dasarnya yang kuat dalam struktur masyarakat yang majemuk, hingga corak ideologi yang dianut sangatlah variatif, tak seperti sekarang yang cenderung homogen. Namun, ini kerap pula menjadi sebab timbulnya konflik-konflik sosial bersifat *cross cutting* atau saling-menyilang, yang mendorong tumbuhnya integrasi sosial di atas landasan koersif. Di lain pihak, proses integrasi juga berlandaskan konsensus bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai fundamental tertentu, seperti

Nasionalisme Pancasila yang sejak awal mampu menjadi daya pikat moralitas dan terandalkan untuk mempersatukan bangsa ini (Nasikun, 2006: 93-95).

Namun, ide sosialisme secara resmi diperkenalkan baru di tahun 1914, ketika didirikannya Serikat Sosial Demokrasi Hindia Belanda atau ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) oleh H.J.F. Marie Sneevliet, J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma. Keempatnya adalah tokoh sosialis radikal yang datang ke Hindia setelah perpecahan dengan kelompok revisionisme di Belanda (Kasenda, 2014: 5-11).

Baru setelah Perang Dunia Pertama selesai di tahun 1918, ISDV gencar mengembangkan sayap dengan merekrut anggota dari kalangan pribumi, dan membuka cabang di beberapa kota. Mendirikan surat kabar *Het Vrije Woord* dan mengembangkan metode infiltrasi dengan mengizinkan keanggotaan ganda. Ini yang kemudian bersambut dengan perpecahan yang terjadi di dalam tubuh Sarekat Islam (SI) yang sebelumnya sudah berkembang pesat sebagai organisasi pergerakan. Terbentuklah kelompok SI Merah yang dipimpin oleh kalangan pemuda seperti Semaoen, Darsono, Mas Marco Kartodikromo, dan H. Misbach yang membawa SI semakin radikal menentang pemerintah kolonial. Akhirnya setelah tahun 1918, poros ini membangun Partai Komunis Hindia yang pada bulan Mei 1920 bersama ISDV resmi melebur menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mencerminkan aktualisasi kebutuhan gerakan politik (Munasichin, 2005: 71-75).

Kesadaran tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan terhadap kolonialisme semakin berkembang dalam paradigma yang sama-sama dipengaruhi oleh

wacana ideologi sosialisme. Sejarah mencatat meletusnya pemberontakan antikolonial yang pertama kali, yakni pada tahun 1926/1927, hingga menginisiasi peristiwa Proklamasi pada 17 Agustus 1945, tidak lain dimotori oleh orang-orang kiri yang tergabung dalam berbagai kelompok politik. Gagasan sosialisme menjadi suatu kesepakatan bersama yang tak terelakkan dalam khasanah pemikiran para *founding father* Republik Indonesia. Namun, perbedaan interpretasi dan pilihan metode pergerakan juga berlangsung keras, hingga timbul fragmentasi yang kadang tak terdamaikan. Ada banyak organisasi berhaluan kiri di masa itu, yang terus bertumbuhan hingga di penghujung pemerintahan Soekarno yang disebut era Demokrasi Terpimpin. Semisal yang paling berpengaruh adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Murba (Onghokham, 2013: 89-97).

Sosialisme Indonesia merupakan konsepsi yang menegaskan praktek ideologi sosialisme dalam konteks situasi objektif dan kekhasan Indonesia. Masa pemerintahan Soekarno yang didaulat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, menjadi masa paling ideal bagi pengembangan konsep tersebut. Soemartono Mertolojo (1961: 8-14) mengatakan kata sosialisme Indonesia sejak tahun 1959 telah dipergunakan secara resmi dalam dokumen-dokumen kenegaraan, sebagai sinonim bagi penyebutan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maupun tuntutan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia (Naskah Ampera).

Roeslan Abdulgani (1964: 53-62) menerangkan bahwa revolusi Indonesia saat itu dianggap sudah mencapai taraf baru dalam pembangunan menuju masyarakat sosialis Indonesia. Ditandai dengan disusunnya perencanaan konsentrasi anggaran sebagaimana naskah yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) tahun 1961. Didalamnya mencakup gambaran cita-cita dari tata masyarakat sosialis Indonesia dengan unsur pokok:

- a. Menjamin cukup makanan, pakaian, dan perumahan yang layak bagi warga negaranya sehingga tidak mengalami kecemasan menghadapi hari esok.
- b. Menjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warga negaranya supaya dapat menunaikan tugas dan hak sebaik-baiknya.
- c. Menjamin hari tua setiap warganya sehingga tak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan.
- d. Menjamin agar setiap warga negara dapat menikmati, mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kerohaniannya sehingga terpelihara kehidupan lahir dan batin.

Sementara cita-cita tentang manusia sosialis Indonesia berisi gambaran tentang seorang manusia yang mendasarkan cipta, rasa, karsa, dan karyanya atas landasan sebagai berikut:

- a. Kepribadian dan kebudayaan Indonesia
- b. Semangat patriot komplit
- c. Azas Pancasila
- d. Semangat gotong royong
- e. Jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta)
- f. Susila dan budi luhur
- g. Kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran
- h. Kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak
- i. Kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi
- j. Kerelaan berkorban dan hidup hemat
- k. Azas Demokrasi Terpimpin
- l. Azas Ekonomi Terpimpin
- m. Disiplin
- n. Kepandaian menghargai waktu

- o. Cara berpikir rasional dan ekonomis
- p. Kesadaran bekerja untuk membangun dengan kerja keras

Cita-cita tentang politik sosialis Indonesia berisi gambaran tentang negara yang bersatu padu dan seiya-sekata rakyat dan pemerintahnya, dan berpokok pada pikiran sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada pengabdian kepada kepentingan rakyat.
- b. Menganjurkan dan member tempat yang luas pada inisiatif rakyat yang sanggup dan mau menyumbang pada perbaikan masyarakat dan negara.
- c. Bertindak cepat karena insyaf akan ketinggalan zaman yang harus dikejar.
- d. Menanam sebanyak mungkin uang dalam kegiatan pembangunan, bukan administrasi.
- e. Berani bertindak terhadap kekuasaan imperialisme dan feodalisme.
- f. Berjalan jujur dan hemat, karena didorong oleh rasa tanggung jawab guna segera memperbaiki taraf hidup rakyat banyak.
- g. Memelihara hubungan baik dengan semua bangsa di dunia.
- h. Ikut berusaha secara positif mengakhiri penindasan dan penghisapan di seluruh dunia.
- i. Ikut menyumbang ke arah kebahagiaan seluruh Indonesia.

Cita-cita tentang ekonomi sosialis Indonesia menggambarkan tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berpedoman pada pokok pikiran berikut:

- a. Segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan negara ataupun swasta, harus ditujukan sebagai pengabdian pada kepentingan rakyat.
- b. Seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa, sehingga barang keperluan sehari-hari dapat sampai dengan cepat, merata dan murah di tangan rakyat.

- c. Segala kegiatan pertanian dan perindustrian dibawa pada tingkatan, dimana ekspor Indonesia meningkat menjadi barang-barang jadi, yang berarti menambah kesempatan kerja bagi rakyat, dan keuntungan bagi negara.
- d. Segala kegiatan impor ditujukan pada barang-barang yang dapat menambah produksi dalam negeri.
- e. Kegiatan ekonomi seperti itu jika diselaraskan dengan baik dan bijaksana akan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menaikkan tingkatan kehidupan rakyat.
- f. Negara harus memulai pembangunan industri agar tidak bergantung pada sumber-sumber di luar negeri.
- g. Dengan tata produksi seperti terurai di atas, akan menghasilkan kekayaan umum yang melimpah. Dan dengan tata distribusi itu pula akan menghasilkan pembagian yang merata dan adil, sehingga tercapailah cita-cita tata masyarakat sama rasa sama rata.

Sosialisme di Indonesia yang sama sekali tidak tuntas itu kemudian mengalami pemberangusan secara sistematis oleh negara, setelah pemerintahan diambil alih oleh Mayor Jenderal Soeharto setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kemudian menjadi sebuah rezim berjudul Orde Baru (Orba) yang berkuasa penuh hingga akhirnya ditumbangkan gerakan Reformasi di tahun 1998. Namun, sosialisme sebenarnya mulai kembali mewarnai kehidupan politik masyarakat Indonesia beriringan dengan pertumbuhan beragam bentuk organisasi gerakan masyarakat sipil di penghujung era 1980-an. Namun, hingga saat ini ideologi sosialisme di Indonesia masih lebih banyak berbalut kabut stigma ketimbang dipandang secara objektif.

2.3. Penelitian Terdahulu

2.3.1. Kritik Marxisme-Leninisme Terhadap Kegagalan Partai Komunis Indonesia dalam Ideologisasi Komunisme di Indonesia oleh M. Harya Ramdhoni Jz pada 2004.

Penelitian M. Harya Ramdhoni memiliki banyak fokus, yakni: (1) Konsepsi Marxisme-Leninisme yang sesungguhnya; (2) Letak kegagalan PKI di Indonesia; (3) Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya; (4) Pengaruh kegagalan itu terhadap pendidikan politik pemilih dan kader PKI; (5) Korelasi antara kehancuran PKI di tahun 1965-1966 dengan kegagalan ideologisasi Marxisme-Leninisme di Indonesia. Kesamaan dengan penelitian ini adalah meneliti ideologi politik berhaluan sosialisme yang ada di Indonesia. Namun, Ramdhoni tertarik pada konsep Marxisme-Leninisme yang dipraktekkan oleh Partai Komunis Indonesia hingga tahun 1965, dan menelusur faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya. Sedangkan penelitian ini menyoroti fenomena kontemporer, yakni ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan menganalisis sejauh mana ideologi itu mempengaruhi praktek politiknya.

2.3.2. Pengaruh Marxisme dalam Pemikiran Marhaenisme Soekarno oleh Pranindita Kusumawangi pada 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Pranindita Kusumawangi terhadap literatur-literatur primer yang ditulis langsung oleh Soekarno, ia menemukan Marxisme atau gagasan sosialisme ilmiah yang dikemukakan Karl Marx menjadi rujukan utama bagi Soekarno. Ini menyimpulkan pengaruh Marxisme dalam pemikiran

Marhaenisme Soekarno sangatlah besar dan signifikan. Persamaan antara rencana penelitian ini adalah juga ketertarikannya pada fenomena ideologi politik berhaluan sosialisme yang berkembang di Indonesia.

Namun, Pranindita mengambil ideologi Marhaenisme dari Soekarno yang eksistensinya cukup mendominasi kehidupan politik Indonesia di era awal kemerdekaan sebagai objek studinya. Perbedaannya pada fokus dan metode penelitian, dengan perspektif filsafat politik sebagai pisau analisa, dan penggunaan metode penelitian literatur tanpa observasi empirik terhadap kelompok politik tertentu. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada upaya mengidentifikasi ideologi sosialisme Indonesia perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD) Komite Pimpinan Wilayah Lampung, dan menganalisis sejauh mana pengaruhnya bagi gerakan politik yang dilakukan.

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

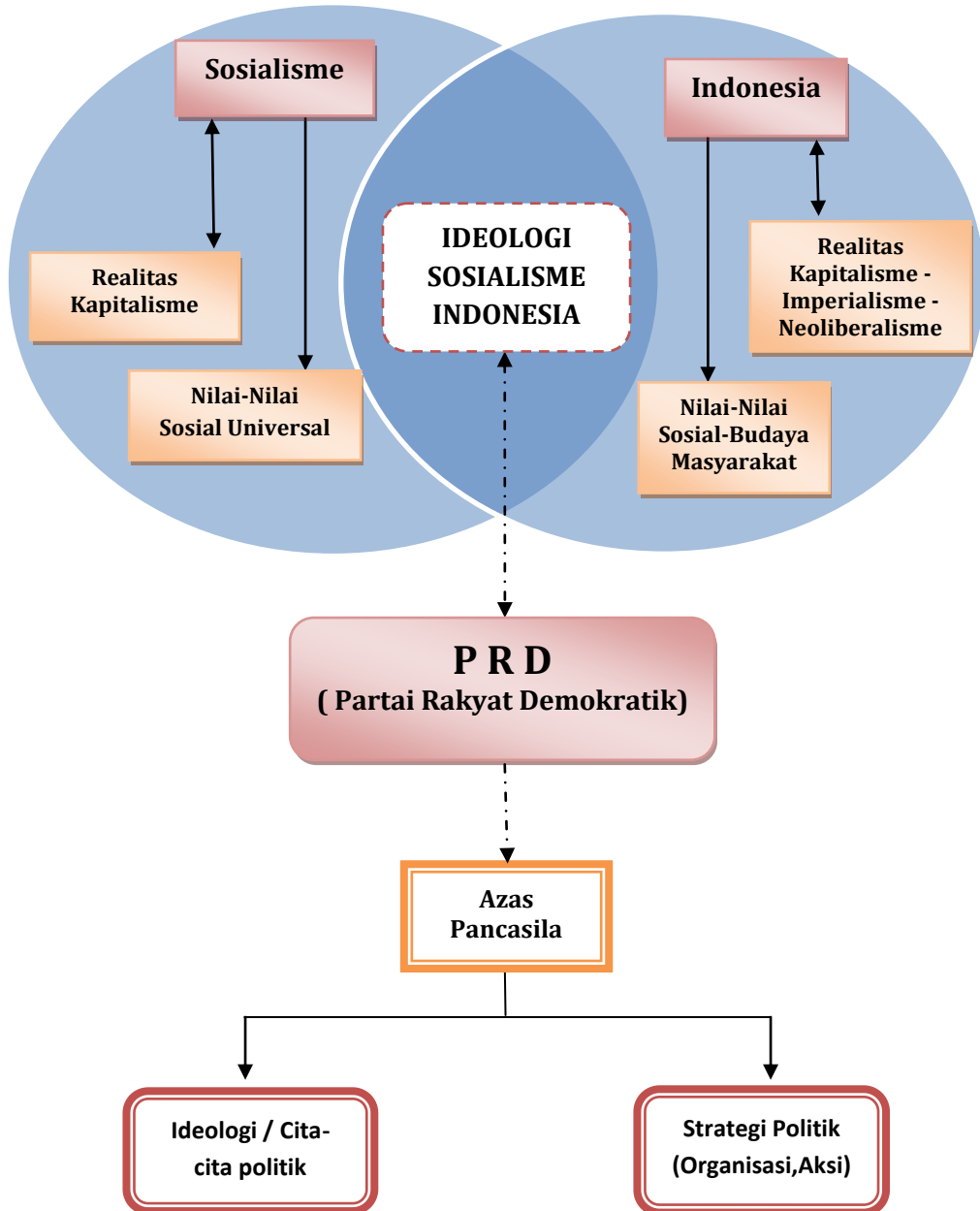
Ideologi sosialisme Indonesia merupakan fakta sosial yang direpresentasikan oleh kelompok politik Partai Rakyat Demokratik (PRD). Konsep ideologi sosialisme Indonesia merupakan irisan dari interaksi ideologi sosialisme dengan Bangsa Indonesia. Antara keduanya terdapat nilai-nilai universal yang saling berkesesuaian dan menghadapi situasi yang senada, yakni realitas kapitalisme yang hegemonik. Kesesuaian itu akhirnya saling berinteraksi dan membentuk konsep baru yang disebut sosialisme Indonesia.

Eksistensi ideologi sosialisme Indonesia sesungguhnya sudah hadir dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia sejak era perjuangan kemerdekaan

dari kolonialisme. Banyak kelompok politik di era itu gandrung pada ideologi berhaluan sosialisme dengan beragam varian interpretasi dan bentuknya. Semisal hadirnya berbagai partai politik maupun tokoh-tokoh nasional yang secara eksplisit mengemukakan sosialisme sebagai tujuan akhir bagi masyarakat Indonesia merdeka. Ideologi ini kian berkembang dan mendapat legitimasi yang kuat selama pemerintahan Soekarno berkuasa hingga tahun 1965. Namun, popularitas ideologi sosialisme di Indonesia jatuh tenggelam sejak pemerintahan Soeharto berkuasa, terutama karena dilekatkannya berbagai stigma negatif yang mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Menjelang peristiwa Reformasi tahun 1998, hadir satu kelompok politik baru bernama Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mengusung sosialisme sebagai pilihan ideologinya. PRD meyakini ideologi sosialisme masih relevan untuk diperjuangkan di Indonesia karena pandangannya terhadap situasi objektif di negara ini. Terdapat realitas kapitalisme yang mendominasi pandangan hidup masyarakat dan negara hingga menimbulkan berbagai problem ketimpangan di segala aspek kehidupan. Sejak tahun 2010, PRD merubah azasnya dari sosial demokrasi kerakyatan menjadi Pancasila sebagai representasi dari ideologi sosialisme Indonesia yang dianutnya.

Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pilihan Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memandang realitas sosial tidak sebatas apa yang tampak teramati saja. Realitas dipandang secara *holistic*, lebih mendalam sebagai sesuatu yang tidak tunggal, dinamis, dan penuh makna. Realitas merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya. Metode ini memandu peneliti mengungkap segala yang berkaitan dengan emosi, motivasi, pemikiran, simbol, serta aspek subjektif lain dalam kehidupan alamiah masyarakat, dengan memfokuskan pada bahasa dan makna yang muncul dari individu terhadap pengalamannya (Garna, 2009: 47-48).

Ideologi Sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik yang menjadi masalah utama penelitian ini sangat mensyaratkan dipergunakannya metode kualitatif yang sedemikian rupa untuk tidak hanya menemukan fakta-fakta tetapi juga mengupas realita dari permasalahan yang diteliti. Terlebih metode ini dilakukan pada situasi obyek yang natural tanpa dimanipulasi oleh peneliti, meski interaksi subjektif *reciprocal* yang saling mempengaruhi juga dianjurkan. Peneliti merupakan instrumen kunci yang harus memiliki bekal

wawasan dan teori yang sesuai agar mampu bertanya dan menganalisis secara memadai. Mengingat proses pengumpulan data dilakukan secara simultan sejak sebelum memasuki lapangan hingga penelitian berakhir, dengan teknik triangulasi yang beragam (Sugiyono, 2008: 2-3).

Peneliti sejak awal proses penelitian sudah membekali diri dengan wawasan yang memadai terkait permasalahan penelitian agar peranannya sebagai instrument kunci dapat berlangsung maksimal. Penelitian terhadap ideologi sosialisme Indonesia ini mendorong peneliti untuk masuk dan bersentuhan langsung dengan aktivitas organisasi Partai Rakyat Demokratik di Wilayah Lampung selama masa penelitian berlangsung. Ini dimaksudkan agar mendapatkan ruang interaksi yang lebih terbuka dan alamiah, yang dapat memungkinkan diperolehnya data-data yang diharapkan sekaligus untuk menguji reliabilitas dari data itu sendiri.

Analisis data yang telah terkumpul dilakukan secara induktif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, lalu dikonstruksikan hingga menjadi hipotesis maupun teori yang menjelaskan kenyataan. Metode kualitatif sangat menekankan proses dan bersifat deskriptif, yakni pengumpulan dan penyajian data mengambil bentuk uraian kata-kata dan gambar daripada angka-angka. Metode ini tidak melakukan generalisasi tapi mengharapkan adanya *transferability*, dimana hasil penelitian dapat diterapkan di tempat lain manakala kondisinya memiliki kesamaan karakteristik (Creswell, 2010: 19-21).

Sebagaimana penelitian kualitatif yang lainnya, penelitian tentang ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik ini juga diuraikan melalui rangkaian uraian yang naratif-deskriptif, dengan alur yang

runtut, detail, dan sistematis. Mengingat dari pengambilan masalah penelitian ini, dan kompleksnya pemahaman dan pikiran manusia-manusia terhadap konsep-konsep ideologi yang diyakininya, memang tidak memungkinkan untuk melakukan uraian yang statistikal.

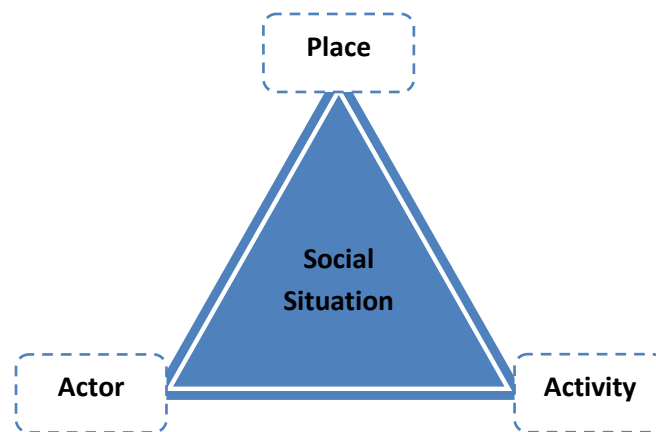
Sementara pendekatan fenomenologi dalam metode penelitian kualitatif memfokuskan pada bagaimana memahami makna dari pengalaman tertentu yang telah dialami oleh manusia, dan bagaimana pengalaman itu mereka interpretasikan sebagai suatu konsep. Peneliti harus dengan cermat mengamati, berinteraksi, dan turut berpartisipasi dalam jangka waktu yang memadai saat mengumpulkan data yang diharapkan (Emzir, 2010: 22-23).

Atas dasar itu metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi ini dianggap paling tepat dipilih sebagai panduan bagi peneliti untuk dapat mencapai tujuan penelitian, yakni untuk mengidentifikasi ideologi sosialisme Indonesia dalam perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD) Komite Pimpinan Wilayah Lampung, dan menganalisis sejauh mana gagasan tersebut dipraktekkan dalam gerakan politik yang dilakukannya. Terlebih organisasi politik PRD yang berdiri sejak tahun 1996 telah mengalami beragam pengalaman dialektis yang pasang surut, terutama terkait perubahan azas perjuangannya dari semula sosial demokrasi kerakyatan menjadi Pancasila yang diklaim sebagai perwujudan dari Sosialisme Indonesia.

3.2. Setting Penelitian

Penelitian ini juga mengacu pada konsep *social situation* yang dikemukakan oleh James Spradley (dalam Sugiyono, 2008: 20-21) untuk mendapat gambaran akan setting lokasi dan fokus dari penelitian yang dilakukan. Terlepas dari penelitian dilakukan pada masyarakat yang sederhana dan berlingkup mikro ataupun yang kompleks dan makro, situasi sosial setidaknya terdiri atas tiga elemen utama: yakni aktor, tempat, dan aktivitas yang saling berinteraksi secara sinergis.

Gambar 3.1. Konsep *Social Situation* Menurut James Spradley



(Sumber: Sugiyono, 2008)

Penelitian ini dilakukan terhadap organisasi politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) Komite Pimpinan Wilayah Lampung, yang sekretariatnya berada di Jalan Teuku Umar, Gang Langgar, Nomor 30, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Di provinsi Lampung ini, PRD sudah berkembang sejak tahun 1997, basis dan strukturnya saat ini ada di lima daerah, yakni: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro. PRD di Lampung aktif melakukan advokasi terhadap berbagai bentuk konflik vertikal seperti sengketa agraria antara masyarakat dengan

perusahaan dan pemerintah, atau beragam persoalan sosial-ekonomi normatif seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta terus menyokong demokratisasi melalui pendidikan politik kritis.

Guna menghindari bias yang menjauhi pencapaian tujuan, penelitian ini difokuskan pada organisasi PRD di Lampung hanya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2015. Pembatasan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa dalam rentang periode itulah secara objektif organisasi PRD baru mengalami perubahan azas dan konsepsinya tentang ideologi sosialisme Indonesia. Kongres VII Tahun 2010 di Salatiga, Jawa Tengah, menetapkan garis ideologi politik PRD adalah sosialisme Indonesia yang dimanifestasikan dalam azas Pancasila dengan rujukan Soekarnoisme. Sedangkan di periode-periode sebelumnya, PRD yang juga berhaluan politik sosialisme lebih memilih azas sosial demokrasi kerakyatan dan banyak merujuk teori Marxisme-Leninisme. Fokus ini dipilih karena potensi untuk mendapatkan informan ataupun arsip dokumentasi menjadi lebih memungkinkan, karena peristiwanya baru saja berlangsung dan tidak akan bercampur dengan riwayat panjang organisasi PRD.

3.3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yakni informan dipilih secara terarah berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jumlahnya pun ditentukan oleh pertimbangan kedalaman perolehan informasi dan dianggap cukup apabila data telah sampai pada taraf *redundancy* atau jenuh (Sugiyono, 2008: 53-54).

Informan penelitian berjumlah sepuluh orang, dan sembilan diantaranya merupakan anggota aktif di organisasi politik PRD Lampung periode 2010-2015. Terdiri dari pengurus Komite Pimpinan Wilayah Lampung, perwakilan Komite Pimpinan Kota/Kabupaten, serta kader anggota. Dipilih dengan pertimbangan memiliki pemahaman secara memadai terhadap masalah penelitian yang diangkat. Faktor kesediaan diri dan waktu luang para informan yang membantu proses pengumpulan data juga dipertimbangkan agar data yang diperoleh lebih baik, lengkap, dan valid. Teknik *snowball* juga dipakai mengingat dalam proses penelitian ditemukan nama informan baru yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan merupakan pengurus Komite Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Peranannya sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Kaderisasi dianggap sebagai poros ideologis internal kerap disarankan oleh informan lainnya di Lampung untuk mendapatkan perspektif yang lebih orisinil tentang ideologi sosialisme Indonesia bagi PRD.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan material kasar yang yang membentuk dasar-dasar analisis dan dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang ia teliti sebagai bukti empiris. Jenis data yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya (Sugiyono, 2008: 62) adalah :

1. Data Primer, yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian, seperti hasil wawancara mendalam dengan para informan maupun catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti selama proses observasi.

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Status Keanggotaan PRD
1	Rahmad	Laki-laki	39	S1	Aktivis/ Wiraswasta	Sekretaris KPW PRD Lampung
2	Ahmad Muslimin	Laki-laki	46	SMA	Aktivis/Wiraswasta	Kepala Biro Administrasi dan Organisasi KPW PRD Lampung
3	Joni Fadli	Laki-laki	42	S1	Aktivis/Peneliti Lepas	Kepala Departemen Pendidikan dan Kaderisasi KPW PRD Lampung
4	Rismayanti	Perempuan	24	S1	Mahasiswa/ Jurnalis	Kader Anggota
5	Ahmad Loni	Laki-laki	53	SMA	Petani & Wiraswasta	Sekretaris KPK PRD Lampung Tengah
6	Gusti Kade Artawan	Laki-laki	28	S1	Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Fraksi Partai Gerindra	Ketua KPK PRD Pesisir Barat
7	Nyoman Adi Irawan	Laki-laki	27	S1	Aktivis/Buruh	Ketua KPK PRD Lampung Tengah
8	Isnain Subkhi	Laki-laki	29	S1	Aktivis/Wiraswasta	Ketua KPK PRD Metro
9	Rakhmat Husein DC	Laki-laki	38	S1	Tenaga Ahli Walikota Bandar Lampung Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Ketua Deputy Politik KPW PRD Lampung
10	Rudi Hartono	Laki-laki	32	S1	Aktivis/Jurnalis	Kepala Departemen Pendidikan dan Kaderisasi KPP PRD

(Sumber: Data Primer, 2015)

2. Data Sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari informan penelitian, seperti arsip-arsip, gambar, halaman portal resmi organisasi, maupun dokumen hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, namun setelah memperoleh fokus yang lebih jelas dan mulai memasuki lapangan, dibutuhkan beberapa instrumen pelengkap dalam proses pengumpulan data agar lebih efektif. Tambahannya adalah teknik pengamatan atau observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen yang harus terus dilakukan secara simultan hingga proses penelitian dianggap selesai (Emzir, 2010: 37-61).

Secara rinci tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengamatan Berperan (*Participant Observation*)

Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian atau gejala secara apa adanya. Penelitian ini secara khusus memilih teknik observasi partisipan, dimana peneliti harus melakukan pengumpulan data sambil turut berperan aktif dalam aktivitas informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini memiliki keunggulan terkait reliabilitas yakni keterpercayaan data dan kelengkapannya. Selain itu juga memberi peluang lebih besar bagi peneliti untuk mengamati aspek-aspek yang tersembunyi secara langsung hingga mempermudah proses pembacaan dan pemahaman atas makna-makna.

Observasi partisipan dilakukan di lingkungan organisasi politik PRD Komite Pimpinan Wilayah Lampung, yakni dengan mengikuti berbagai aktivitas organisasi tersebut terutama yang secara aktif melibatkan para informan, agar data yang berkaitan dengan ideologi sosialisme Indonesia dapat terkumpul sebanyak mungkin.

2. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi verbal untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara dua orang secara langsung, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara mendalam sangat berguna dalam upaya menemukan fokus masalah yang akan diteliti, atau untuk mengetahui hal-hal tertentu yang ingin dikumpulkan dari informan secara lebih detail. Meneliti pemaknaan seseorang atau kelompok terhadap dunianya seperti ideologi sosialisme Indonesia bagi anggota PRD, teknik wawancara terbuka dirasa tepat karena memberi kesempatan mengajukan pertanyaan tanpa membatasi informan dalam memberikan jawaban, sejauh masih sesuai dengan masalah penelitian. Pedoman wawancara yang disusun juga sempat dipergunakan dengan teknik *Forum Discussion Group* (FGD) terhadap seluruh informan sekaligus beserta anggota PRD lainnya ketika ada momentum diselenggarakannya pendidikan dasar. Informan terakhir yang berkedudukan di Jakarta, wawancara dilakukan tidak dengan tatap muka melainkan lewat dua cara yakni telepon dan korespondensi.

3. Studi Dokumen (*Document Analysis*)

Diperlukan juga pengumpulan data melalui berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian agar informasi yang dikumpulkan lebih lengkap dan terpercaya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat berbentuk arsip tulisan, gambar, video, atau karya-karya monumental lainnya. Namun tidak semua dokumen memiliki kredibilitas tinggi, maka penting bagi peneliti untuk memastikan keaslian dan keobjektifan dokumen - dokumen tersebut. Dalam hal ini dapat berupa halaman portal resmi organisasi, buku, surat-surat, notulensi, kliping media, dan foto yang berhubungan dengan ideologi sosialisme Indonesia PRD.

Tabel 3.2. Pedoman Pengumpulan Data

No	Jenis Data	Teknik
1	Profil dan Sejarah Organisasi PRD	Studi Dokumen dan Wawancara Mendalam
2	Pergantian azas PRD menjadi Pancasila sebagai perwujudan sosialisme Indonesia	Studi Dokumen dan Wawancara Mendalam
3	Pemahaman anggota PRD atas konsep ideologi sosialisme Indonesia	Observasi partisipan, dan Wawancara Mendalam
4	Pengaruh ideologi terhadap gerakan politik PRD	Observasi partisipan, dan Wawancara Mendalam

(Sumber: Data Primer, 2015)

Tabel 3.3. Pedoman Wawancara Informan

No	Jenis Data	Pertanyaan
1	Profil dan Sejarah Organisasi PRD	1) Kapan organisasi PRD didirikan? 2) Situasi seperti apa yang melatarinya didirikannya PRD? 3) Bagaimana PRD terbentuk? 4) Bagaimana perjalanan organisasi PRD hingga

		<p>sekarang?</p> <p>5) Sejak kapan PRD juga berdiri di Lampung?</p> <p>6) Bagaimana terbentuknya PRD di Lampung?</p> <p>7) Bagaimana struktur organisasi dan keanggotaan PRD di Lampung?</p> <p>8) Apa program politik yang PRD usung?</p>
2	Pergantian azas PRD menjadi Pancasila sebagai perwujudan sosialisme Indonesia	<p>1) Bagaimana pandangan PRD tentang azas sosial demokrasi kerakyatan yang dipakai sejak pertama berdiri hingga tahun 2010?</p> <p>2) Bagaimana pandangan PRD tentang azas Pancasila yang dipakai sejak tahun 2010?</p> <p>3) Apa yang melatari PRD mengganti azas organisasinya dari sosial demokrasi kerakyatan menjadi Pancasila?</p> <p>4) Bagaimana konsep sosialisme Indonesia yang dimaksudkan oleh PRD?</p>
3	Pemahaman anggota PRD atas konsep ideologi sosialisme Indonesia	<p>1) Bagaimana pandangan PRD tentang kondisi politik Indonesia?</p> <p>2) Bagaimana pandangan PRD tentang kondisi masyarakat Indonesia?</p> <p>3) Bagaimana pandangan PRD tentang gerakan sosial di Indonesia?</p> <p>4) Bagaimana pandangan PRD tentang Rezim Pemerintah saat ini?</p> <p>5) Bagaimana pandangan PRD terhadap momentum pemilu lima tahunan?</p> <p>6) Bagaimana perspektif kekuasaan politik yang dikehendaki untuk dicapai oleh PRD?</p>
4	Pengaruh ideologi terhadap gerakan politik PRD	<p>1) Bagaimana strategi PRD untuk menyebarkan pandangan politiknya kepada masyarakat luas?</p> <p>2) Bagaimana strategi perluasan organisasi dan kaderisasi PRD?</p> <p>3) Bagaimana hubungan PRD dengan elemen organisasi gerakan sosial lainnya?</p> <p>4) Bagaimana hubungan PRD dengan partai politik lainnya?</p> <p>5) Bagaimana hubungan PRD dengan pemerintah?</p> <p>6) Bagaimana respon politik PRD terhadap momentum pemilu 2014?</p> <p>7) Bagaimana stratak PRD untuk memperluas jaringan politik untuk mempengaruhi kebijakan negara?</p>

(Sumber: Data Primer, 2015)

3.5. Teknik Analisis Data

Sebagai *human instrument*, peneliti kualitatif juga harus berpegang pada prinsip *emic*, yakni mengupayakan agar data yang diperoleh memang berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh informan, bukan karena kehendak peneliti. Terdapat tiga alur teknik analisis data yang pada umumnya dipergunakan secara simultan untuk menentukan arah, isi dan kesimpulan akhir, yakni teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan tiga alur teknik analisis data menurut Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (2009: 16-21) yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan sejak awal pengambilan data hingga penelitian dianggap selesai, misalkan dengan menyusun apa saja yang harus diamati, ditanyakan, dan dicari dokumennya. Merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, hingga lebih jauh lagi menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Pada umumnya data kualitatif disajikan dalam bentuk laporan naratif. Namun, bentuk ini seringkali mempersulit peneliti untuk menemukan pola-pola sederhana darinya, untuk itu ada baiknya jika penyajian data dibentuk matriks, grafik, ataupun bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih saat proses analisis berlangsung. penelitian ini menyajikan data-datanya dengan cara naratif-deskriptif, tabel-tabel, gambar foto, serta gambar bagan.

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi (*Concluding Drawing / Verification*)

Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menentukan apakah makna dari sesuatu yang diteliti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi yang muncul. Namun, kesimpulan akhir hanya akan terjadi jika semua proses sudah selesai, sementara verifikasinya dapat melalui peninjauan ulang atas data maupun lintasan pemikiran yang muncul, ataupun melalui konsensus inter-subjektif dengan rekan sejawat. Proses ini dilakukan agar makna yang muncul dari data teruji kualitas validitasnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Profil dan Perjalanan Sejarah Partai Rakyat Demokratik (PRD)

4.1.1. PRD dalam Pusaran Sejarah Politik Bangsa

Partai Rakyat Demokratik atau yang disingkat PRD merupakan sebuah organisasi berbentuk partai politik yang pertama kali dideklarasikan pada tanggal 22 Juli tahun 1996 di gedung YLBHI, Jakarta Pusat. Sebelumnya organisasi ini merupakan payung bersama bagi organisasi perlawanan rakyat dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, tani, seniman, dan kaum miskin kota yang disebut Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) dan terbentuk pada tanggal 2 Mei tahun 1994.

Persatuan Rakyat Demokratik yang diketuai oleh Sugeng Bahagio dan Tumpak Sitorus sebagai sekretaris jenderal terbentuk dilatari oleh kesadaran akan kebutuhan bersama untuk menyatukan kekuatan, mengingat di masa itu pemerintah Orde Baru semakin bereaksi represif terhadap protes rakyat. Semisal kasus tewasnya Marsinah, buruh yang mengorganisir pemogokan di pabrik PT.CPS di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia diculik aparat dan ditemukan tewas penuh luka mengenaskan di hutan Dusun Jegong pada 8 Mei 1993, setelah tiga hari menghilang (Suyanto, 1995: 50-51).

Dinamika politik nasional berkembang kian terbuka, ditandai bermunculannya kaum oposisi yang mendirikan ormas atau pun parpol, seperti YLBHI dipimpin Adnan Buyung Nasution, SBSI dipimpin Mochtar Pakpahan, atau PUDI dipimpin Sri Bintang Pamungkas. Menyikapi situasi ini, Persatuan Rakyat Demokratik yang merupakan buah radikalisme kaum muda, membulatkan tekad untuk mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan.

Kongres I di Sleman, Yogyakarta pada bulan Mei 1996 menetapkan dibentuknya Partai Rakyat Demokratik, serta memilih Budiman Sudjatmiko dan Petrus H. Hariyanto sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Komite Pimpinan Pusat (KPP). Kongres ini juga menetapkan sosial demokrasi kerakyatan sebagai azas organisasi PRD. Sementara inti dari semua keputusan Kongres berupa naskah “Manifesto PRD” yang dibacakan saat deklarasi menyatakan bahwa tidak ada demokrasi di Indonesia. Program politik PRD saat itu adalah: (1) Gulingkan Soeharto; (2) Cabut Dwifungsi ABRI; (3) Cabut paket 5 UU Politik (UU Pemilu, UU Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR, UU Parpol dan Golkar, UU Referendum, UU Ormas); dan (4) Referendum untuk rakyat Maumere (Miftahuddin, 2004: 82-85).



Gambar 4.1. Suasana Deklarasi PRD 22 Juli 1996
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 1996)

Max Lane (2014: 194-200) menyebut gagasan pendirian PRD juga merupakan reaksi atas kebuntuan gerakan mahasiswa era 1978 dan gerakan NGO. Serta kelemahan gerakan oposisi politik terhadap Orde Baru di era sebelumnya yang dipandang masih setengah hati, seperti Petisi 50, Forum Demokrasi (Fordem), Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI). PRD memandang bahwa kegagalan gerakan-gerakan itu dalam menciptakan transformasi adalah karena: (1) Tidak punya prioritas yang memadai dalam hal penerbitan koran propaganda yang bisa diakses massa; (2) Cenderung eksklusif dengan tidak melandasi perjuangannya pada kekuatan rakyat atau pembangunan basis massa yang kuat; (3) Lemahnya dukungan internasional.

Sementara Budiman Sudjatmiko (2013: 415-417) yang terpilih sebagai ketua umum pertama menerangkan, gerakan PRD saat itu banyak terinspirasi oleh model “*People Power*” yang berlangsung di Filipina, dan terutama yang di Korea Selatan. Namun, ketimbang model Filipina yang mendapat dukungan penuh kekuatan kapitalisme global, situasi Indonesia lebih dekat dengan model Korsel. Kemiripannya terletak pada: (1) Rezim Orde Baru sangat ramah pada kekuatan kapitalisme global; (2) Lemahnya kesadaran berlawanan masyarakat yang telah lama ditekan oleh politik massa mengambang. Satu-satunya pilihan bagi PRD saat itu adalah menjadi gerakan politik pelopor yang inklusif dengan mengajak berjuang bersama seluruh elemen masyarakat. Namun, semangat inklusivitas PRD kerap bertumburan dengan berbagai perdebatan internal tentang metode perjuangan, maupun situasi represi negara yang justru cenderung mengarahkan gerakan politik PRD menjadi sangat eksklusif.

a. Bergerak Setelah Kudatuli Berdarah

Berselang lima hari pasca PRD dideklarasikan, tepatnya tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan besar. Terdapat sekelompok massa berjumlah ratusan orang yang mengaku pendukung Soerjadi mengamuk dan menyerang kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat yang sedang ditempati oleh massa pendukung Megawati. Peristiwa berdarah yang menimbulkan korban jiwa 5 orang, 149 orang luka berat dan ringan, 23 orang hilang, dan ratusan lainnya dipenjara itu di kemudian hari dikenal dengan sebutan “Kudatuli” (Kerusuhan 27 Juli) atau “Sabtu Kelabu” yang merujuk pada tanggal dan hari kejadiannya.



Gambar 4.2. Suasana Kerusuhan 27 Juli 1996
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 1996)

Situasi pada saat itu yakni PDI sebagai salah satu dari dua parpol resmi di luar Golongan Karya yang diakui negara, sedang menunjukkan dinamika oposan yang menarik. Dimana Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993 secara aklamasi resmi memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Namun, hasil ini tak disenangi pemerintah Orde Baru mengingat adanya potensi kebangkitan gerakan politik Soekarnoisme yang selama beberapa dekade sebelumnya telah dikucilkan. Secara tersembunyi pemerintah

yang khawatir kepemimpinan Megawati akan merongrong kekuasaannya menuju pemilu 1997 itu mendorong timbulnya konflik internal PDI, dengan mengesahkan kepemimpinan Soerjadi yang dipilih dalam Kongres rekayasa di Medan tahun 1996. Kubu Megawati menolak, dan ratusan massa pendukungnya selama berhari-hari bertahan di kantor DPP PDI sambil menggelar mimbar bebas sebagai panggung politik bersama bagi seluruh elemen gerakan pro-demokrasi (Sudjatmiko, 2013: 432-442).

PRD memandang dinamika itu sebagai momentum politik yang seharusnya diinjeksi secara massif untuk mendorong laju perubahan politik yang lebih radikal, yakni perubahan sistem politik Indonesia menuju demokrasi multi partai kerakyatan dan tergulingnya Presiden Soeharto yang sudah terlalu lama memimpin. Keputusannya PRD harus ikut bersolidaritas dan mengambil peranan bersama dengan elemen pro-demokrasi lainnya untuk mendukung kubu Megawati yang dianggap mewakili visi pembaruan. Bagi PRD, kemunculan Megawati saat itu merupakan fenomena kepemimpinan politik yang sama sekali baru, terutama semenjak kebijakan penyederhanaan jumlah parpol diterapkan oleh pemerintah Orba. Paket 5 UU Politik Orde Baru secara sistematis telah begitu mengekang dan mereduksi peranan parpol menjadi sekedar mesin politik bagi pemerintah untuk melanggengkan *status quo*. Sementara Megawati tampil membawa isu-isu hak asasi manusia dan demokratisasi yang selama bertahun-tahun sebelumnya marak disuarakan oleh gerakan pro-demokrasi ekstra-parlementer, namun selalu diabaikan oleh elit partai-partai politik lainnya (KPP PRD, 1997: 18-21).

Pemerintah Orde Baru segera menuding PRD sebagai kambing hitam yang harus bertanggung jawab karena dianggap telah menggerakkan kerusuhan. Dampaknya 30 orang pimpinan dan aktivis PRD diburu, ditangkap, dan divonis hukuman antara 1,5 hingga 13 tahun penjara atas tuduhan subversif, meski persidangan tidak berhasil memberikan bukti-bukti yang akurat. Setelahnya resistensi pemerintah Orba terhadap PRD justru berlanjut semakin represif. Secara resmi melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 201-221 Tahun 1997, PRD dinyatakan bubar dan dianggap sebagai Organisasi Terlarang, lantas dituding sebagai gerakan makar komunis gaya baru karena tidak berasaskan Pancasila (Saptamaji, 2014: 93-95).

Konsekuensi logisnya adalah PRD terpaksa harus membanting stir memilih taktik *underground* atau gerakan bawah tanah untuk mempertahankan eksistensi perlawanannya terhadap Orde Baru. Setelah pimpinan PRD menjadi tahanan politik, kepemimpinan organisasi di luar penjara secara kolektif dimandatkan sementara kepada Andi Arief, Nezar Patria, dan Faisol Reza. Represivitas pemerintah berkuasa saat itu semakin membabi-buta terhadap PRD sehingga harus kehilangan pimpinan, penyusutan basis-basis massa di desa, kampung buruh, dan mahasiswa, menghadapi stigma komunis, dan teror penculikan intelejen. Namun, PRD memutuskan tetap bergerak secara tertutup tanpa sama sekali mengendurkan perlawanan pada praktek kekuasaan otoritarian Orba. Konsentrasinya pembangunan ulang basis massa, mobilisasi aksi besar dengan atribut PRD dihindari, tetapi aksi kecil yang tersebar di berbagai daerah dengan atribut komite aksi lokal diintensifkan untuk mendorong perluasan wacana protes (Sudjatmiko, 2014: 218-229).

Menjelang pemilu 1997 situasi politik nasional semakin memanas, diwarnai banyak kerusuhan yang berbau rasial maupun politis, dan tersulut di beberapa kota. Sebagian besar kekuatan PDI pro Megawati merapatkan dukungan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muncul koalisi politik yang disebut “Mega-Bintang” merujuk pada paduan nama Megawati Soekarno Putri dengan lambang PPP yang berbentuk bintang. PRD bawah tanah saat itu melihatnya sebagai momentum politik yang kembali harus dimajukan agar perspektif perubahan tidak terbatas hanya dengan cara bersatunya elit politik, melainkan juga dengan melibatkan partisipasi rakyat.

PRD bawah tanah mendorong kampanye aliansi “Mega-Bintang-Rakyat untuk Demokrasi” melalui ratusan ribu selebaran. Selama musim kampanye timbul inisiasi massa untuk berani secara terbuka menegasikan Golkar lewat mobilisasi besar pendukung PPP ke jalan raya, yang sesungguhnya sangat dibatasi Undang-Undang. Pemilu 1997 meski hasil akhirnya dimenangkan oleh Golkar yang meraih suara mutlak 70% suara, namun justru menjadi titik tolak kehancuran dinasti kekuasaan Orba (Lane, 2014: 252-261).



Gambar 4.3. Suasana Kampanye Mega-Bintang-Rakyat 1997
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 1997)

Selama masa itu pula aksi-aksi protes dari berbagai elemen terhadap Orba semakin meluas dan beragam bentuknya. Rolip Saptamaji (2014: 93-95) menyebut represivitas yang diterima PRD pun semakin menjadi, terutama pasca terjadinya ledakan bom berdaya rendah di Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta Selatan pada bulan Januari 1998. Ledakan ini menimbulkan spekulasi baik di dalam maupun di luar PRD, dan pemerintah segera menuding PRD sebagai pihak yang bertanggungjawab telah merencanakan teror. Meski pimpinan PRD menyatakan peristiwa ini hanyalah rekayasa rezim, tertangkapnya seorang kader PRD di lokasi kejadian membuat tuduhan ini sulit dibantah. Budiman Sudjatmiko yang saat itu ketua umum dan dalam keadaan dipenjara bersama pimpinan lainnya sangat terkejut dan marah. tampak dari petikan memoarnya (2014: 309-311) berikut:

“Bukan strategi kami untuk melakukan tindakan kekerasan bersenjata dalam perjuangan. Tidak terpikir sama sekali! Kami memang ingin Soeharto jatuh, tapi melalui people power, gerakan massa rakyat! Bukan bedil-bedilan apalagi bom-boman!.. Jika ada orang yang diindikasikan sebagai PRD terlibat, itu di luar garis perjuangan partai. Namun jika memang ini keputusan pemimpin operasional lapangan PRD yang ada di luar penjara, kami akan ambil alih tanggung jawab.. Sejarah yang mulai kami rasakan berpihak sekarang seperti pergi terbirit-birit karena heroism kekanak-kanakan telah diumbar.. Sejak itu, jejaring PRD menjadi sasaran represi baru yang lebih keras seperti yang dialami saat 27 Juli. Basis-basis, markas-markas dikoyak-koyak dan dokumen-dokumen jatuh ke tangan intelejen.”

Wilson (2012: 116-120) berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) tercatat setidaknya di masa itu terdapat 24 orang aktivis gerakan pro-demokrasi yang diculik dan mengalami penyiksaan oleh aparat. Sembilan orang diantaranya telah dipulangkan dengan kondisi lemah dan traumatik, sedangkan 14 orang lainnya dihilangkan tanpa ada kejelasan

statusnya hingga saat ini. Empat orang diantaranya yang dihilangkan dalam rangkaian operasi penculikan itu merupakan kader pimpinan pusat PRD, yakni: Bimo Petrus, Suyat, Herman Hendrawan, dan Wiji Thukul yang populer lewat petikan puisinya: “Hanya ada satu kata, lawan!.”



Gambar 4.4. Aktivis PRD yang Hilang Diculik Semasa Reformasi
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2000)

b. Reformasi, People Power yang Meleset

Peristiwa Reformasi di tahun 1998 sendiri bagi PRD tidaklah sesuai dengan harapan awalnya, yakni menjelma sebagai *people power* atau gerak perubahan politik yang radikal dan melibatkan partisipasi rakyat secara total. Kegagalan ini diyakini karena secara subjektif kondisi internal organisasi PRD saat itu sama sekali sedang tidak berada dalam posisi siap dan kondusif untuk tampil mendorong transisi itu menjadi lebih berwatak revolusioner. Budiman Sudjatmiko (2014:312-313) dalam memoarnya menyebut:

“Seandainya basis-basis massa (PRD) di kota-kota besar (terutama perkampungan kumuh) tetap dalam jejaring yang solid, kami yakin masih ada peluang terciptanya people power saat Mei 1998, bukan sekedar students power. Hasilnya tentu akan beda bagi masa depan demokrasi Indonesia. Mundurnya Soeharto bukan sekedar peralihan kekuasaan dari satu faksi Orba ke faksi Orba yang lain. Dengan people power, transisinya akan melahirkan kekuasaan demokratis yang sepenuhnya dalam kendali gerakan-gerakan sipil pro-demokrasi, berbasis kelompok Nasionalis, Islam moderat, dan gerakan sosial kerakyatan.”

Setelah Orde Baru bersama Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade resmi ditumbangkan oleh gerakan reformasi pada 21 Mei 1998, datanglah momentum kelonggaran bagi PRD untuk menyusun ulang barisan, dan konsep strategi-taktik perjuangan. Bulan September 1998, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan PRD terhadap Menteri Dalam Negeri, sehingga SK pelarangan organisasi PRD dapat dinyatakan batal demi hukum. Tanggal 22 Februari 1999, PRD resmi mendaftar ke Departemen Kehakiman dan dinyatakan sebagai parpol yang legal melalui SK Menteri Kehakiman Nomor 129/A/PP-PARPOL/II/1999 tertanggal 24 Februari. Setelahnya hadir momentum percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum yang semestinya dijadwalkan pada tahun 2002 menjadi tahun 1999 karena besarnya gelombang tuntutan rakyat akan perubahan struktur politik legislatif dan eksekutif bentukan Orba. PRD bersama 47 parpol lainnya berhasil lolos verifikasi dan terdaftar sebagai peserta Pemilu yang diselenggarakan pada 7 Juni 1999, dengan nomor urut 16 (Miftahuddin, 2004: 152-153).



Gambar 4.5. Suasana Kampanye PRD Saat Pemilu 1999 (Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 1999)

Hasil yang diraih PRD dalam pertarungan elektoral tahun 1999 mungkin bisa dikatakan gagal. Perolehan suaranya hanya sebanyak 78.730, sementara anggota PRD sendiri saat itu paling banyak hanya 1000 orang dari 15 cabang provinsi, dan 150 lebih cabang kota/kabupaten. Jumlah ini terhitung hanya 0,07%, sementara ambang batas suara atau *parliamentary threshold* adalah 2%, sehingga PRD tidak berhasil memperoleh satupun kursi legislatif di pusat. Namun, di daerah sebenarnya PRD meraih 1 kursi di DI. Yogyakarta ,yang akhirnya diputuskan untuk ditinggalkan begitu saja.

Uraian Max Lane (2014: 452-454) menyimpulkan beberapa faktor yang melatarinya, yaitu: (1) Terdapat perdebatan klasik tradisi sosialis yang sengit di internal PRD sejak 1998, terkait pilihan taktik harus ikut mengintervensi pemilu atau tidak, hingga menghasilkan slogan partai yang ambigu, yakni: “Bersama Mahasiswa dan Rakyat Coblos PRD atau Boikot Pemilu!”; (2) Berbeda dengan parpol lainnya, sebagai partai gerakan, dana yang dimiliki PRD untuk melakukan kampanye terbuka yang massif sangatlah minim, sehingga hanya sanggup mengandalkan profil politik organisasi dan tokoh-tokohnya yang sudah cukup dipopulerkan media massa; (3) Sayangnya trauma politik rakyat terhadap setiap kelompok berhaluan kiri dan sosialis masih begitu kuat, sehingga PRD yang sejak awal gencar distigmakan sebagai PKI gaya baru oleh Orba terkena dampaknya; (4) Terlalu sempitnya waktu yang dimiliki untuk melakukan kampanye elektoral, mengingat di tahun-tahun sebelumnya PRD yang mendapatkan represi dan teror luar biasa dari penguasa Orba harus memfokuskan segenap kekuatannya untuk bergerak secara klandestin, tertutup serapat mungkin.

Setelah momentum pemilu multi-partai perdana pasca Orba terselenggara, PRD berusaha mengkonsolidasi kekuatan untuk kembali hadir terbuka di hadapan public dengan menegaskan: (1) Meski diktator Soeharto sudah mundur, reformasi belumlah menghasilkan transformasi total karena masih menyisakan struktur kekuasaan warisan Orba; (2) Supremasi militer masih setia dan dapat dengan mudah dikuasai pihak Soeharto yang telah mewariskan kursi kepresidenan pada BJ. Habibie; (3) Di tingkat bawah, rakyat masih dirundung keresahan karena belum ada perbaikan kehidupan yang nyata pasca krisis moneter; (4) Keterbukaan politik dengan berdirinya partai-partai baru tidaklah menjamin demokratisasi karena banyaknya kelompok politik oportunistis dan reformis gadungan yang sama sekali tidak memperjuangkan kepentingan rakyat (KPP PRD, 1999: 27-30).

Keadaan semakin membaik dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Persis pada peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di tanggal 10 Desember 1999, Presiden resmi mengeluarkan amnesti pembebasan bagi enam orang tahanan politik pimpinan PRD yang belum bebas, ini tertuang dalam Keppres Nomor 159/1999.



Gambar 4.6. Suasana Pembebasan Tahanan Politik PRD
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2000)

PRD di masa awal reformasi juga menjadi organisasi politik yang mendukung penuh perjuangan rakyat Maumere (Timor-Timur), yang menuntut pemerintah Indonesia memberikan hak referendum menentukan nasibnya sendiri. Landasannya adalah pendudukan tanah Timor Timur oleh operasi militer Indonesia di tahun 1975-1977, yang diakhiri dengan terintegrasinya wilayah bekas jajahan Portugis itu sebagai provinsi ke-27 Indonesia adalah bentuk penjajahan bangsa terhadap bangsa. Tak terhitung jumlah korban jiwa, psikis, dan materi yang diderita rakyat Timor-Timur, mengingat pendekatan pemerintah Orde Baru sangat militeristik. Tidak hanya itu, PRD yang sejak awal konsentrasinya menentang segala bentuk militerisme yang terbukti sangat menindas rakyat sipil, juga aktif menuntut dihentikannya pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Aceh dan Papua Barat (Uhlen, 1998: 224-225).



Gambar 4.7. Suasana Dukungan PRD pada Referendum Timor Timur
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 1999)

c. Pasang Surut Usai Runtuhnya Orba

Lepas dari hingar-bingar pasca pemilu 1999, PRD memutuskan untuk meninggalkan taktik intra-parlementer dan kembali melakukan perjuangan ekstra-parlementer yang massif demi menuntaskan tugas reformasi secara

total. PRD memandang bahwa pemerintahan hasil pemilu 1999 masih memberi ruang bagi sisa-sisa Orba terutama militer dan Golkar untuk kembali melakukan konsolidasi kekuatan politik. Faktanya memang Golkar sebagai representasi politik warisan Orba masih menjadi partai terbesar kedua yang mendominasi parlemen, sehingga segala upaya progresif yang diusulkan oleh Presiden Gus Dur selalu dimentahkan parlemen. Agenda reformasi total yang menjadi tuntutan PRD diantaranya: (1) Pengadilan Soeharto dan kroninya; (2) Pencabutan dwi fungsi ABRI; (3) Pembubaran Golkar; (4) Membangun pemerintahan persatuan demokratik (KPP PRD, 2013: 75-81).



Gambar 4.8. Suasana Aksi Menuntut Pembubaran Golkar
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2000)

Miftahuddin (2004: 153-157) mencatat pada tanggal 21 Februari 2000, lebih dari 700 anggota PRD melakukan aksi massa besar-besaran pertama di depan Istana Negara untuk menentang kebijakan pemotongan subsidi BBM dan Listrik yang akan menambah beban hidup rakyat. Tiga orang pimpinan PRD sebagai perwakilan berhasil diterima masuk menemui Presiden Gus Dur yang menjelaskan bahwa meski dirinya sepakat dengan argumentasi PRD, namun pencabutan subsidi tetap harus dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan suntikan dana bantuan dari International Monetary Fund (IMF).

Tahun 2001, Kongres PRD memilih kepengurusan pimpinan pusat yang baru dengan Haris Rusly Moty sebagai ketua umum dan Natalia Scholastika sebagai sekretaris jenderal. Konsentrasi gerakan politik PRD saat itu adalah ekstra-parlementer dengan melanjutkan program utama menuntut diwujudkannya reformasi total. PRD juga aktif mengusung program politik menuntut penarikan pasukan militer Israel dan mendukung penuh gerakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, sasaran utamanya aksi massa di Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai negara sekutu utama Israel.

Setelah pergantian kekuasaan dari Presiden Gus Dur ke Presiden Megawati pada 23 Juli tahun 2001 melalui Sidang Istimewa MPR, PRD kembali tegas menjadi oposisi pemerintah. Sikap ini diambil karena pemerintahan Megawati dianggap tidak konsisten mewujudkan perubahan, terlalu kompromis dan inferior terhadap kepentingan modal kapitalisme global. Tampak dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disertai naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok, hingga privatisasi dan penjualan asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang menimpa Indosat. Terjadi pula empat kali amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang hasilnya justru mengesahkan segala praktek liberalisasi, terutama dengan ditambahkannya pasal-pasal karet yang multi tafsir dan dihapuskannya bagian penjelasan umum (Miftahuddin, 2004: 158-163).

Menjelang datangnya momentum pemilu tahun 2004, PRD memutuskan untuk menjajaki kembali strategi parlementer. Kali ini PRD mencoba membangun koalisi bersama elemen gerakan sosial oposan lainnya yang memiliki

kesamaan *platform*, yakni isu program populis radikal dan anti neoliberalisme. Koalisi ini melahirkan Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR) yang dideklarasikan pada tanggal 27 Juli 2003, dengan ketua umum terpilihnya Yusuf Lakaseng. POPOR sekalipun tidak dibekali modal yang besar saat itu terbilang cukup berani karena mengajukan calon presiden alternatif, yakni Dita Indah Sari. Namun, POPOR menghadapi kendala serius dalam memenuhi syarat administrasi sehingga gagal lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. PRD segera melakukan gerakan menolak hasil pemilu 2004 yang dianggap penuh kecurangan. Selain itu dua parpol pemenang yakni PDI Perjuangan dan Golkar dianggap terbukti tidak dapat dipercaya karena hanya memberi ruang bagi naiknya kembali kekuatan militer (Saptamaji, 2014: 98-99).



Gambar 4.9. Pembentukan Partai POPOR untuk Pemilu 2004
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2003)

Tahun 2003 itu pula, Kongres PRD kembali memilih struktur pimpinan yang baru yakni Yusuf Lakaseng sebagai ketua umum dan Zelly Ariane sebagai sekretaris jenderal. Selain aktif mengusung gerakan anti reformis gadungan dan penghancuran sisa-sisa politik Orba, PRD juga menyentuh isu lain seperti perempuan. PRD menggugat UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) khususnya perihal pasal yang mengatur tentang poligami. PRD memandang

praktek poligami sebagai budaya patriarki yang melanggengkan penindasan manusia atas manusia dan tidak semestinya lagi terus dipertahankan. Isu-isu anti neoliberalisme, pasar bebas dan globalisasi, menolak IMF, World Bank, dan utang luar negeri, politik upah murah, sistem kerja kontrak dan *outsourcing*, komersialisasi pendidikan dan kesehatan, pencabutan subsidi sosial, subsidi bibit dan pupuk pertanian, serta reforma agraria kerap menjadi tema sentral dalam gerakan politik PRD (Miftahuddin, 2004: 164-169).

Sekalipun sesungguhnya secara administratif PRD masuk dalam kategori partai *gurem*, atau partai non parlemen yang eksistensinya masih diakui. Namun, karena latar belakangnya adalah organisasi gerakan maka PRD tegas mengambil sikap untuk kembali bergerak layaknya organisasi gerakan sosial, tidak layaknya partai *gurem* yang rutin membangun koalisi elektoral terutama menjelang momentum pemilu. Ciri khasnya adalah mobilisasi massa rakyat untuk melakukan demonstrasi dengan berbekal tuntutan-tuntutan sosial-ekonomis ke pusat-pusat pemerintahan. Sebab itulah PRD kerap dipandang tidak selayaknya partai politik, melainkan sebagai Organisasi Masyarakat (ormas) atau malah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kongres PRD tahun 2005 memilih Dita Indah Sari sebagai ketua umum dan Agus “Jabo” Priono sebagai sekretaris jenderal. Periode ini PRD melakukan upaya konsolidasi yang lebih luas dan serius terhadap elemen-elemen gerakan untuk menyatukan kekuatan dan ikut bertarung melawan kekuatan-kekuatan politik *mainstream* di ajang pemilu 2009. Bagi PRD, kebebasan politik yang sudah dimenangkan oleh rakyat seharusnya bisa dimanfaatkan untuk

pembangunan wadah-wadah perjuangan hingga mengembangkan bentuk-bentuk perjuangannya. Gerakan rakyat yang pasang surut dan masih secara sporadis namun rutin melancarkan aksi-aksi massa di berbagai daerah, dengan isu-isu yang juga beragam seharusnya dapat dipersatukan guna meng-*counter* restrukturisasi kekuatan politik elit yang mendominasi parlemen, baik di tingkat nasional maupun di tingkatan daerah.

Puncaknya adalah deklarasi partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) pada 22 Juli 2006, dengan Agus “Jabo” Priono sebagai ketua umum dan Harris Sitorus sebagai sekretaris jenderal. PAPERNAS merupakan partai koalisi luas yang mencakup puluhan organisasi gerakan dari beragam sektor rakyat, seperti ormas tani, ormas buruh, ormas kaum miskin kota, jejaring seniman, ormas mahasiswa, maupun tokoh perorangan. Partai ini mengusung program utama yang disebut “Tri Panji Persatuan Nasional”, yakni: (1) Nasionalisasi perusahaan dan sumber daya alam yang dikuasai asing; (2) Hapus utang luar negeri; (3) Bangun industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat (Saksono, 2009: 116-118).



Gambar 4.10. Pembentukan Partai PAPERNAS untuk Pemilu 2009 (Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2007)

PAPERNAS dikategorikan sebagai partai sayap-kiri yang cukup mengundang simpati, setahun dari deklarasi ia sudah mampu menghimpun 1000 orang anggota aktif di seluruh Indonesia. Namun, sayangnya PAPERNAS menemui kegagalan untuk lolos verifikasi, karena perubahan UU Pemilu yang semakin mempersulit partai-partai gerakan dan terkesan hanya memberi ruang bagi partai-partai elit. Kegagalan ini menimbulkan perdebatan internal dalam menentukan taktik politik yang harus diambil. PRD memilih untuk tetap mengintervensi pemilu legislatif 2009 dengan jalan ikut menumpang pada parpol kecil yang lolos verifikasi pemilu tetapi hanya memiliki sedikit perwakilan di parlemen, dengan syarat tercapainya kesepakatan politik tertentu. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin Bursah Zanubi membuka tawaran kerjasama dengan landasan terdapat keselarasan dengan partainya yang berideologi sosialisme religius. Lebih dari itu, PRD bersama PBR yang ditumpangnya juga aktif mengusung tema kemandirian nasional sebagai solusi dari krisis ekonomi bangsa, dan mengusung nama Rizal Ramli sebagai calon presiden alternatif. Namun, sayangnya perolehan suara PBR pada pemilu legislatif tahun 2009 pun tidak berhasil menembus ambang batas parlemen, yakni hanya 1.264.333 suara atau 1,21% (Lane, 2014: 464-468).



Gambar 4.11. Taktik Intervensi PRD di dalam PBR pada Pemilu 2009 (Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2008)

Menjelang pemilu presiden di tahun 2009, PRD gencar melakukan kampanye *counter-hegemoni* terhadap neoliberalisme yang semakin kuat mencengkeram bangsa, dengan menuding kandidat *incumbent* sebagai rezim pro asing dan pasar bebas yang menyengsarakan rakyat. Slogan “Lanjutkan!” yang diusung oleh kekuatan politik *incumbent* Soesilo Bambang Yudhoyono di-*counter* oleh kampanye “Hentikan!” oleh PRD. Harapannya agar dapat memassifkan kesadaran anti neoliberalisme di benak rakyat sebagai objek konstituen dalam pemilu, sehingga mampu menganalisis komitmen dari para kandidat capres lainnya untuk turut mengambil sikap yang sama. Upaya ini secara politik cukup berhasil dengan terangkatnya wacana anti neoliberalisme sebagai isu bersama dari berbagai kalangan, terutama media massa.



Gambar 4.12. Kampanye Hentikan Neoliberalisme di Pemilu Presiden 2009 (Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2009)

4.1.2. Menengok Ke Belakang, Ke Arah Pancasila

Tahun 2010 merupakan tahun yang bersejarah bagi organisasi Partai Rakyat Demokratik, mengingat adanya gebrakan sejarah yang secara internal mereka lakukan. Kongres Ke-VII di Salatiga, Jawa Tengah pada bulan Maret tidak hanya menghasilkan struktur kepemimpinan baru, tetapi juga strategi dan taktik perjuangan, serta azas yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Ketua umum terpilih adalah Agus “Jabo” Priono dan I Gede Sandra sebagai sekretaris

jenderalnya. Namun, dalam perjalanannya sekjend terpilih harus digantikan dengan Dominggus Oktavianus Kiik pada akhir tahun 2011. Terkait perubahan fundamental dalam organisasi PRD disebutkan dalam modul pendidikan dasar anggota (2012:35) sebagai berikut:

“Kongres ini menjadi bersejarah karena memutuskan hal-hal yang sangat krusial, menyangkut ideologi organisasi. Partai mengubah azas dari Sosial Demokrasi Kerakyatan menjadi Pancasila untuk memberikan landasan perjuangan dalam menghadapi neokolonialisme dan imperialisme. Mengambil ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno sebagai pemandu filsafat dan gerakan partai. Serta perubahan dari partai kader menjadi partai terbuka sebagai persiapan menuju pertarungan di Pemilu 2019.”

a. Ketika Azas Pun Berganti

Sejarah baru yang paling fundamental adalah pergantian azas organisasi PRD. Setelah selama empat belas tahun menggunakan azas sosial demokrasi kerakyatan (sosdemkra), akhirnya PRD memilih Pancasila sebagai azasnya yang baru. Pilihan ini cukup menarik jika mengingat bahwa di era awal didirikannya, PRD justru berani tegas menolak penggunaan azas Pancasila yang diwajibkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai azas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Ketegasan PRD untuk tidak menuruti anjuran pemerintah Orba saat itu sebenarnya ditujukan sebagai bentuk kepeloporan demokratisasi politik Indonesia yang sudah begitu dikerdilkan oleh pemerintah Orba. Namun, karena pilihan sikap ini pulalah PRD di masa lalu mendapatkan tuduhan stigma komunis gaya baru, karena dianggap menolak Pancasila yang merupakan ideologi resmi negara. Budiman Sudjatmiko (2013: 298-301) selaku ketua umum PRD di masa itu menjelaskan:

“Kami anti otoritarianisme, menolak kebijakan pembangunan tersentralisasi, mendukung proses transisi politik melalui pemilihan umum yang bebas.. demokrasi sosial (social democracy), sosialisme demokratik (democratic socialism), ajaran marhaenisme Bung Karno, Marxisme, dan komunisme memang sama-sama ada di sisi kiri dalam dan kiri-tengah dalam spektrum politik. Tapi bukan berarti mereka kembar identik satu sama lain..”

Azas bagi PRD merupakan cerminan dari ideologi yang dianut, dan menjadi landasan berpikir serta bergerak bagi organisasi. Namun azas juga harus sesuai dengan konteks zaman yang objektif. Azas sosdemkra dipilih PRD karena Indonesia berada dalam konteks di bawah otoritarianisme kekuasaan Orde Baru. PRD menyadari bahwa masyarakat Indonesia terus mengalami industrialisasi yang memunculkan dan mematangkan keberadaan kaum buruh dan semakin nyata kesenjangan sosial-ekonomi. Dibutuhkan suatu perubahan dalam proses pembangunan, ke arah yang lebih berorientasi kerakyatan. Sementara Pancasila di masa itu bagi PRD sedang diselewengkan oleh penguasa untuk memberikan legitimasi bagi praktek *abuse of power* atau penyimpangan kekuasaan selama tiga dekade lebih, demi melanggengkan kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Konteks zaman disaat ini bagi PRD adalah liberalisasi kehidupan politik masyarakat Indonesia yang semakin menjadi-jadi. Terjadi pula gejala disorientasi politik yang semakin mengabaikan arah masa depan bangsa. Sementara itu sesungguhnya situasi pelik dimana kedaulatan bangsa dan negara semakin terkoyak oleh praktek penguasaan sumber-sumber daya alam nasional di bawah kendali perusahaan-perusahaan asing, tanpa diiringi oleh prosedur alih teknologi ataupun pembagian hasil yang patut.

Di sisi lain, kesadaran politik masyarakat Indonesia juga semakin memprihatinkan, ditandai dengan suburnya budaya politik transaksional yang jauh dari nuansa ideologis. Zainuddin Maliki (2004: 23-26) bahkan menyebut adanya fenomena *zero trust society*, dimana masyarakat sudah mengalami tingkat krisis kepercayaan yang akut kepada para elit politik maupun pada proses politik itu dapat menghadirkan perubahan yang substansial. Sehingga azas sosial demokrasi kerakyatan dirasa kurang kontekstual untuk merepresentasikan semangat kebangsaan dan kepentingan nasional yang telah menjadi kebutuhan objektif saat ini.

PRD secara internal melakukan pengkajian yang mendalam terhadap realitas objektif kebangsaan dan sampai pada kesimpulan bahwa dibutuhkan upaya membangkitkan kembali kesadaran nasionalisme yang substansif. PRD menemukan bahwa sesungguhnya Pancasila benar adanya sebagai dasar falsafah bangsa, atau *philosophische grondslag* yang haruslah kembali dihidupkan, tetapi dengan merujuk langsung pada tafsiran pencetusnya di masa awal. Soekarno melalui pidatonya tertanggal 1 Juni 1945 adalah referensi utama PRD untuk membedakannya dengan tafsiran Pancasila yang selama ini disusun atas dasar kepentingan kekuasaan Orba. Naskah Manifesto Politik hasil Kongres 2010 (KPP PRD, 2012: 22-23) menyebutkan:

“Untuk merajut unsur-unsur yang berpihak pada kepentingan nasional ke dalam suatu alat politik yang bertujuan menuntaskan revolusi nasional, dibutuhkan suatu ideologi pemersatu berupa Pancasila. Untuk itu, Pancasila harus diletakkan kepada penjabaran yang sesuai dengan gagasan Bung Karno; yakni sebagai nasionalisme, internasionalisme/kemanusiaan, sosialisme, demokrasi, dan ketuhanan sebagai dasar negara RI. Dengan begitu Pancasila merupakan wadah yang mampu menampung unsur-unsur progresif dalam suatu kerja dan perjuangan gotong royong untuk mewujudkan sosialisme Indonesia.”

PRD meyakini bahwa pada hakekatnya, Pancasila merupakan perwujudan dari cita-cita universal ideologi sosialisme yang dibangun atas dasar nilai-nilai luhur yang telah dikandung dalam kebudayaan asli masyarakat Indonesia. PRD mengikuti penafsiran Soekarno tentang perasan kelima sila menjadi hanya eka sila, yakni gotong royong. Esensi inilah yang diklaim PRD sebagai penegasan betapa sosialisnya falsafah Pancasila itu, mengingat salah satu nilai dasar ideologi sosialisme ialah terbangunnya kehidupan masyarakat yang kolektif. Naskah pidato Soekarno berjudul “Kelahiran Pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945 (KPP PRD, 2012: 48-49) menyebutkan:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga: socio-nationalisme, social-democratie, dan ketuhanan.. dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Gotong royong adalah faham yang lebih dinamis dari kekeluargaan.. menggambarkan satu usaha, amal, pekerjaan.. adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, buat kepentingan bersama. Itulah Gotong-royong!”

PRD menilai perasan Pancasila menjadi Tri Sila, yaitu: Socio-nasionalisme, Socio-demokrasi, dan Ketuhanan juga merupakan tiga prinsip yang menegaskan kekhususan nilai sosialisme dalam lapangan prakteknya di Indonesia. Pertama, bahwa di dalam kesadaran socio-nasionalisme terdapat aspek kebangsaan yang melahirkan nasionalisme, dan aspek kemanusiaan yang melahirkan internasionalisme. Kedua, di dalam kesadaran socio-demokrasi terdapat aspek musyawarah mufakat yang melahirkan kedaulatan rakyat, dan aspek keadilan sosial yang melahirkan kesejahteraan sosial. Ketiga, masyarakat sosialis di Indonesia haruslah menjunjung tinggi kehidupan spiritual yang berketuhanan (KPP PRD, 2012: 51-55).

b. Manifesto Politik Menegaskan Posisi

Manifesto Politik merupakan naskah resmi organisasi PRD yang merangkum semua hasil keputusan Kongres Ke-VII Tahun 2010. PRD di dalam naskah tersebut (2012: 17-18) menguraikan pasang surut pembangunan nasion atau bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejak era feodalisme, masyarakat di Nusantara sebenarnya sudah memiliki cara produksi yang khas dan mandiri, yakni gotong royong dan terbuka pada pengaruh luar yang tidak eksploitatif. Interaksi kerajaan-kerajaan di nusantara tercatat pernah semakin dipertajam ke arah terintegrasinya kepentingan ekonomi, politik, dan kebudayaan, baik dilatari oleh hubungan perdagangan maupun penaklukan. Kemajuan yang dihasilkan adalah terbentuknya konsep Bhineka Tunggal Ika dan bahasa pergaulan yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern. Namun, hadirnya kolonialisme telah mencerabut semuanya, karena kerajaan-kerajaan di Nusantara harus bertekuk-lutut. Praktek penindasan kolonialisme pulalah yang menggiring masyarakat di Nusantara di kemudian hari menyadari diri sebagai senasib dan sepenanggungan. Ini menjadi bekal bagi pembentukan rasa kebangsaan, hingga memuncak pada diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Di masa awal kemerdekaan inilah berlangsung proses *national and character building* yang dilakukan demi membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan potensial. Maka dirumuskanlah konsep Tri Sakti sebagai prinsip utama perjuangan nasional, yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Namun, proses ini ambruk setelah pemerintahan dikuasai oleh rezim Orde Baru yang

berwatak komprador pasca peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965. Apa yang berlangsung kemudian disebut oleh PRD sebagai *nation and character destruction*, atau proses penghancur-leburan bangsa Indonesia. Ditandai dengan kembalinya proses penjajahan asing yang masuk melalui investasi modal dan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini terus memburuk hingga dalam perancangan pembangunannya negara Indonesia menjadi sangat bergantung pada lembaga-lembaga keuangan pemberi donor atau utang. Tradisi rezim komprador bagi kepentingan eksploitasi kapitalisme global seperti ini kemudian terus diwariskan oleh rezim-rezim yang terbangun setelahnya (KPP PRD, 2012: 18-19).

PRD memandang bahwa rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto hanya membuka kembali gerbang intervensi modal asing dan memberikan ruang seluasnya bagi pembangunan fondasi sistem kapitalisme di Indonesia. Namun, di masa setelah reformasi justru semua itu menjelma menjadi lebih membahayakan dengan sebutan neoliberalisme dan neo-kolonialisme. Peran negara untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya terus dilikuidasi dan digantikan dengan berkuasanya logika mekanisme pasar dalam segala bidang kehidupan. Rezim-rezim pemerintahan yang berwatak komprador terhadap kepentingan neoliberalismenya neo-kolonial itu, bagi PRD telah menyusun dalih secara sepihak untuk tidak melibatkan rakyat dalam proses amandemen konstitusi dasar negara. Seluruh substansi dalam pasal per pasal di UUD 1945 yang anti kolonialisme dan pro kemandirian nasional dibongkar menjadi alat pembenar bagi segala praktek liberalisasi ekonomi, politik, dan budaya (KPP PRD, 2012: 21-22).

PRD menyimpulkan yang menjadi problem pokok bagi bangsa Indonesia bukanlah korupsi sebagaimana pandangan umum gerakan sosial-politik. PRD mengakui perilaku korupsi sistemik sebagai faktor internal yang paling merongrong cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia benar adanya. Namun, jika konsentrasi pergerakan hanya berkuat memerangi korupsi, maka yang terjadi justru perpecahan di antara sesama, dan merusak geo-politik nasional. Situasi yang kacau di dalam negeri itulah yang dalam pandangan PRD justru menjadi tujuan dari pihak eksternal yang punya daya penghancur lebih besar terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa. Inilah yang disebut imperialisme, dan diyakini sebagai problem pokok dan paling mendesak untuk dijadikan musuh bersama setiap elemen bangsa. Adapun bentuk penjajahan gaya baru dari imperialisme yang merupakan wujud mutakhir dari hasrat penindasan kapitalisme disebut neoliberalisme. (KPP PRD, 2012: 24-26).

Tujuan PRD adalah menyelenggarakan pembebasan nasional untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, tanpa penindasan manusia atas manusia, dan bangsa atas bangsa. Strategi perjuangan yang paling mendesak adalah membangun semangat dan kesadaran persatuan nasional. Metode perjuangan yang dipilih adalah *machtvorming* atau mengandalkan kekuatan mobilisasi massa aksi yang sadar sepenuhnya untuk bergerak membangun kekuasaan. Namun, dalam proses perjuangan *machtvorming* yang diharapkan oleh PRD itu juga dinilai masih harus menghadapi banyak hambatan berupa kontradiksi internal dalam masyarakat. Terdapat banyak spektrum dan fragmentasi yang memecah belah pemahaman dan rentan memicu perpecahan diantara sesama. PRD di dalam manifestonya

menetapkan beberapa kategori, yakni: (1) Siapa kawan, ialah mereka yang melawan imperialisme dan memihak kepentingan nasional; (2) Siapa lawan, ialah mereka yang menjadi instrument penghisapan neoliberal; (3) Siapakah kaum peragu, ialah mereka yang mengerti namun tidak berani mengambil sikap atas fenomena ini (KPP PRD, 2012: 27-29).

c. Menjawab Lewat Gerakan Nasional Pasal 33

Tanggal 22 Juli 2011, persis di peringatan hari jadinya yang ke 15 tahun, PRD mendeklarasikan Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP-33) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki basis massa dan struktur organisasinya. Gerakan ini oleh PRD dikatakan sebagai penemuan kembali senjata utama bangsa melawan imperialisme. PRD menjadikan Pasal 33 UUD 1945, terutama yang tertuang dalam naskah otentik pra amandemen keempat, sebagai sebuah proposal program politik bersama bagi siapapun. Menimbang peran vital dan strategisnya Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan utama penyelenggaraan perekonomian nasional yang berazaskan kekeluargaan dan bertujuan untuk kemakmuran bersama (KPP PRD, 2011: 3-5).

GNP-33 bagi PRD bermaksud untuk mengingatkan, meluruskan, dan menuntaskan tujuan berbangsa kita kepada cita-cita Revolusi Agustus 1945 dan gagasan para pendiri bangsa. Ditegaskan pula bahwa PRD bukanlah kelompok yang pertama kali menginisiasi gerakan ini, melainkan hanya mendeklarasikannya kembali ke hadapan seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya bukan untuk menjadikan gerakan ini sebagai hanya miliknya sebuah kelompok politik tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang sadar dan

bersatu melawan imperialisme. Hambatan keberhasilan bangsa ini bagi PRD adalah masih sangat terfragmentasinya gerakan rakyat yang hanya memperjuangkan isu sektoralnya, maka dibutuhkan platform politik bersama yang berakar pada problem pokok bangsa (KPP PRD, 2011: 10-12).



Gambar 4.13. Kampanye Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945
(Sumber: Dokumentasi KPP PRD, 2011)

d. Tentang Anggaran Dasar, Logo dan Struktur

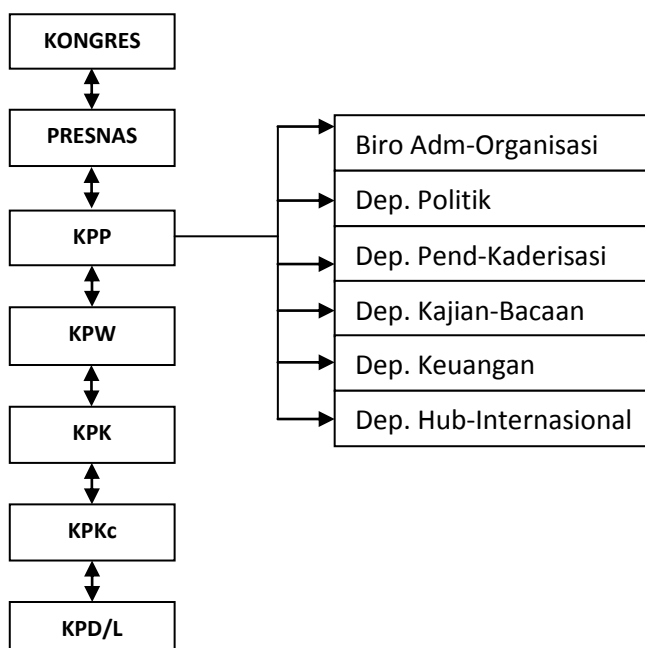
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan sebuah naskah kunci bagi setiap organisasi sebagai pedoman jalannya mekanisme internal. Diterangkan dalam Modul Pendidikan Dasar Anggotanya, AD/ART Partai Rakyat Demokratik (PRD) Tahun 2010 – 2015 menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa PRD adalah partai kader yang berbasis massa, bersifat terbuka, dan berwatak progresif-revolusioner. Sementara di Pasal 6 disebut bahwa tujuan PRD yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa.

Pokok-pokok perjuangan PRD diuraikan dalam Pasal 7, yaitu untuk memimpin dan atau terlibat aktif: (1) dalam menuntaskan perjuangan demokrasi nasional; (2) dalam menggalang persatuan nasional melawan imperialisme; (3) dalam perjuangan anti korupsi. Sementara itu mekanisme

kunci dalam organisasi PRD sebenarnya masih sama dengan sebelum Kongres Tahun 2010, yakni sentralisme demokratik atau disingkat sendem, yang juga merupakan ciri utama dalam organisasi-organisasi politik sayap kiri berhaluan ideologi sosialisme di seluruh dunia.

Namun, dalam naskah AD/ART tidak lagi disebutkan secara eksplisit, dengan hanya diterangkan bahwa prinsip kerja organisasi PRD di Pasal 10 adalah: (1) Organ yang lebih rendah dan setiap anggota mematuhi kepemimpinan organ yang lebih tinggi; (2) Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, usulan, dan kritik organ yang lebih rendah; (3) Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan suara mayoritas; (4) Setiap struktur dibimbing oleh mekanisme evaluasi yang rutin untuk memperkuat kolektivisme; (5) Perdebatan kader dan anggota dibuka secara demokratis sebelum pengambilan keputusan, setelahnya seluruh pihak wajib melaksanakan keputusan secara bulat.

Prinsip sendem yang dianut PRD juga tergambar melalui bagan struktur organisasinya yang membuka ruang koordinasi timbal balik antar setiap lapisan strukturnya. Forum kepemimpinan dan ruang bagi pengambilan keputusan tertinggi disebut Kongres, yang merupakan forum bagi seluruh kader PRD di Indonesia, terlepas dari status strukturalnya dalam kepemimpinan organisasi. Selain itu, dapat juga dilihat dari peran sentral kepemimpinan internal organisasi PRD yang dipimpin oleh sekretaris, sebagai poros instruksi dalam kerja-kerja ideologi, politik, maupun organisasi.



Gambar 4.14. Bagan Struktur Organisasi PRD
(Sumber: Modul Pendidikan Dasar Anggota PRD, 2012)

Sejak awal didirikan, logo yang juga menjadi bendera organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) belum mengalami perubahan. Warna dasar merah dimaknai sebagai semangat perjuangan rakyat Indonesia yang menyala-nyala. Lambang bintang berwarna kuning bermakna tujuan mulia perjuangan rakyat Indonesia. Sebelah kirinya melingkar setengah lingkaran roda gigi berjumlah sembilan dan berwarna hitam, bermakna rakyat pekerja sebagai tumpuan perubahan bagi masa depan bangsa Indonesia.



Gambar 4.15. Logo Bendera Partai Rakyat Demokratik
(Sumber: Modul Pendidikan Dasar Anggota PRD, 2012)

Tabel 4.1. Periodisasi Struktur Pimpinan dan Azas PRD

No	Periode Kepemimpinan KPP PRD	Struktur Pimpinan	Azas Organisasi
1	1996 – 1999	Ketum : Budiman Sudjatmiko Sekjend : Petrus H. Haryanto *Catatan: periode ini terinterupsi oleh kriminalisasi dan penetapan PRD sebagai organisasi terlarang, kepemimpinan PRD “bawah tanah” dimandatkan pada kolektif Andi Arief, Nezar Patria, dan Faisol Reza.	Sosial Demokrasi Kerakyatan
2	1999 – 2001	Ketum : Budiman Sudjatmiko Sekjend : Petrus H. Haryanto	Sosial Demokrasi Kerakyatan
3	2001 – 2003	Ketum : Haris Rusly Moti Sekjend : Natalia Scholastika	Sosial Demokrasi Kerakyatan
4	2003 – 2005	Ketum : Yusuf Lakaseng Sekjend : Zely Ariane	Sosial Demokrasi Kerakyatan
5	2005 – 2009	Ketum : Dita Indah Sari Sekjend : Agus “Jabo” Priono	Sosial Demokrasi Kerakyatan
6	2010 – 2015	Ketum : Agus “Jabo” Priono Sekjend : Pjs. Dominggus Oktavianus *Catatan: sekjend terpilih di Kongres adalah I Gede Sandra yang dalam perjalanannya digantikan.	Pancasila

(Sumber: Data Primer, 2015)

4.1.3. Mengepak Sayap Sampai Lampung

Di provinsi Lampung PRD sudah eksis sejak masa-masa awal pendiriannya, di kisaran tahun 1997. Berawal dari tumbuhnya kesatuan aksi mahasiswa lokal dari berbagai kampus di Kota Bandar Lampung, yang nalar kritisnya mulai lebih berani menyelenggarakan kegiatan berunsur politik. Berbagai kegiatan rutin diselenggarakan seperti diskusi, aksi massa, penyebaran selebaran dan pamflet yang banyak mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru.

a. Lahir dari Embrio Gerakan Mahasiswa

Dicatat oleh Syafarudin, dkk (1997: 6-9) dinamika gerakan mahasiswa di Lampung mulai kembali menghangat setelah kampus Universitas Lampung didatangi oleh massa petani yang menggelar mimbar bebas di tahun 1994. Para petani tersebut meneriakan kabar penggusuran yang mereka alami dan mempertanyakan komitmen kerakyatan para mahasiswa. Sejak itu mulai terbangun banyak konsolidasi gerakan mahasiswa yang rutin melakukan advokasi problem-problem sosial-ekonomi yang dialami masyarakat, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Gerakan mahasiswa di Lampung sejak saat itu marak melakukan aksi massa secara besar-besaran. Kemudian terbentuklah Forum Diskusi dan Dialog Mahasiswa (FORDIMA) sebagai elemen gerakan mahasiswa yang paling kritis di Lampung, inilah yang menjadi embrio bagi pembentukan PRD. Sebagaimana sejarah awal pendiriannya di seluruh Indonesia, PRD tumbuh dari radikalisasi gerakan mahasiswa.

Bambang Ekalaya, Fenta, Putra Budi Ansori, dan Gian Moko adalah beberapa orang pegiat utamanya, yang pada tahun 1995 menjalin hubungan dengan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). SMID adalah jaringan organisasi gerakan mahasiswa skala nasional yang dipimpin oleh Andi Arief, yang kebetulan juga berasal dari Lampung. Pada tahun 1996 aksi-aksi FORDIMA mulai menggunakan nama SMID Cabang Bandar Lampung dan memiliki kemampuan mobilisasi anggota yang cukup besar dari kampus Unila, UBL, STIAL, A2L/STIE, dan UML. Berkaitan dengan SMID menjadi salah satu organisasi yang turut membentuk PRD di tahun 1996, maka cabang SMID juga sekaligus menjadi perwakilan PRD di Lampung.

b. Lampung Sebagai Basis Andalan PRD

PRD di Lampung juga ikut mengalami alur gerakan yang sesuai arahan PRD pusat sejak awal. Bahkan Lampung sejak awal hingga termasuk dalam kategori basis yang paling diandalkan bagi organisasi PRD secara nasional, baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas gerakan politiknya. Seperti saat PRD harus bergerak secara tertutup karena represi pasca peristiwa Kudatuli, ataupun saat diputuskan menjadi peserta pemilu 1999. Tercatat aktivis PRD Lampung juga mengalami teror dan represi yang tak kalah beratnya dari pemerintah dan aparat militer. Salah seorang aktivisnya, M. Yusuf Rizal yang juga mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unila tewas dengan luka tembak peluru tajam yang menembus dadanya. Kejadian berlangsung pada tanggal 28 September 1999, saat melakukan aksi massa menolak pengesahan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB), yang dianggap sebagai celah untuk kembalinya superioritas militer pasca reformasi.



Gambar 4.16. M. Yusuf Rizal dan Suasana Demonstrasi Tolak UU PKB (Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 1999)

Aktivitas politik PRD di Lampung sejak awal didirikan mencakup beberapa hal, seperti yang disebut taktik atas, yaitu menjalin kontak dan hubungan politik dengan elit-elit politik lokal terutama dalam rangka menarik dukungan atas program-program kerakyatan yang PRD usung. Sementara yang disebut

taktik bawah, adalah kegiatan politik yang lebih ditujukan untuk menyentuh kesadaran massa, melalui rutinitas *statement* di media massa, penyebaran pamflet dan selebaran, maupun aksi-aksi massa seperti mimbar bebas dan demonstrasi.

PRD Lampung juga aktif melakukan advokasi problem-problem yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pendampingan konflik-konflik agraria yang bersifat vertikal. Biasanya yang berlangsung antara rakyat versus perusahaan perkebunan dan pemerintah yang telah sangat merugikan dan diyakini merampas tanah milik warga. Konflik-konflik perburuhan juga kerap menjadi sorotan advokasi PRD, begitu juga dengan berbagai problem yang dihadapi masyarakat miskin perkotaan. PRD dengan demikian selalu terdorong untuk membangun ormas-ormas dari berbagai sektor masyarakat yang diadvokasi, dengan tujuan memperbesar pengaruhnya. Maupun kampanye program perjuangan politik yang mereka usung, dan juga merespon berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Gerakan politik PRD di Lampung selalu bersinergi dengan garis perjuangan yang ditetapkan pimpinan pusat PRD, karenanya meski berada di daerah, aksi-aksinya lebih banyak isu-isu politik di tingkat nasional ketimbang lokal.



Gambar 4.17. Suasana Aksi Programatik PRD
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2004)



Gambar 4.18. Suasana Aksi Tuntut Kegagalan Rezim SBY
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2010)

c. Setelah Stratak Perjuangan Harus Diubah

Setelah Kongres di Tahun 2010 merubah begitu banyak substansi di dalam tubuh organisasi PRD, gerakan politik maupun kolektif organisasi PRD di Lampung juga melakukan penyesuaian. Cukup banyak perubahan yang dilakukan ataupun persoalan yang dialami. Perubahan azas dari sosdemkra menjadi Pancasila, perubahan strategi dan taktik politik ke arah intra-parlemerter yang moderat, pada mulanya sangat berpengaruh pada ketimpangan pemahaman anggota-anggota PRD di Lampung. Mengingat selama beberapa tahun sebelumnya konsentrasi di arahkan pada gerakan ekstra-parlemerter yang radikal.

Dampak terbesar di tubuh organisasi PRD Lampung ialah dilengserkannya kepengurusan Komite Pimpinan Wilayah periode 2010-2015 yang dipimpin oleh Ali Akbar sebagai ketua dan Abu Hasan sebagai Sekretaris, yang baru menjabat selama kurang dari setahun melalui Konferensi Luar Biasa. Meski segera dibentuk kepengurusan baru untuk menggantikannya, perpecahan tetap terjadi dengan keluarnya beberapa orang kadernya dari keanggotaan. Situasi ini sempat mengganggu kohesifitas organisasi PRD di Lampung.

Di masa yang baru ini sebenarnya pola gerakan PRD di Lampung dalam prakteknya tidak mengalami banyak perubahan. Metode gerakan ekstra-parlementer seperti aksi-aksi massa dalam kerangka advokasi problem masyarakat, merespon isu-isu nasional, maupun kampanye programatik tetap menjadi andalan. PRD mengklaim metode seperti itu sebagai ciri khas partai politik yang sungguh-sungguh berwatak kerakyatan dan transformatif. Berdasar keterangan-keterangan pihak PRD, selalu dinyatakan bahwa meski kelak berhasil masuk ke dalam parlemen, metode yang digunakannya tidak akan berubah. Dikatakan bahwa tujuannya agar kelak mampu memelopori tumbuhnya kesadaran politik yang baru, yakni model demokrasi partisipatoris di kalangan rakyat maupun parpol, yang selama ini cenderung terpisah jauh dan dekat hanya di masa kampanye elektoral.



Gambar 4.19. Suasana Aksi Demonstrasi PRD Lampung
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2013)

Sebagaimana arahan umum PRD secara nasional, di Lampung juga dideklarasikan Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP-33) sejak tahun 2011. Gerakan ini diandalkan sebagai program tuntutan utama dalam setiap aksi politik PRD untuk menghadapi berbagai persoalan rakyat yang diadvokasinya. Pasal 33 UUD 1945 sebagai platform perjuangan politik bagi PRD dianggap sebagai alat pemersatu pandangan yang tepat untuk menghadapi berbagai

kelompok politik yang punya kekhususan tersendiri dalam memandang problem pokok bangsa. Kandungan esensial pasal ini merupakan manifestasi dari amanat sila ke-5 dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disusun sebagai landasan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, menuju bangsa Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian. Karenanya PRD meyakini pentingnya mengajukan kepada semua pihak untuk bersepakat kembali menegakkan amanat Pasal 33 tersebut sebagai solusi sistematis bagi problem bobroknya ekonomi-politik nasional.



Gambar 4.20. Gerakan Nasional Pasal 33 PRD di Lampung
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2013)

Melalui GNP-33 ini pula, PRD di Lampung melakukan berbagai bentuk taktik gerakan politik atas yang di masa sebelum bergantinya azas organisasi justru kerap dihindari. Sebagai sebuah gerakan yang menghendaki diri dapat kembali menjadi partai politik elektoral yang punya legitimasi baik di mata publik maupun lingkaran kekuasaan, PRD berupaya untuk membangun komunikasi intensif dengan pihak-pihak pemerintah di daerah. Pandangannya bahwa setiap elemen pemerintahan lokal, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus didorong maju kesadaran politik kerakyatannya hingga ke ranah praktek.

Tolak ukurnya ialah kedekatan programatik, bahwa PRD di masa ini berani mendukung pemerintahan lokal tertentu yang dianggapnya memiliki komitmen tinggi untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, PRD juga berani melawan setiap pemerintahan lokal yang secara vulgar mengabaikan kepentingan rakyat umum. Kegiatan mengundang para tokoh di setiap acara yang diselenggarakan oleh PRD, maupun mengunjunginya bersilaturahmi langsung secara resmi, kerap dilakukan.

Taktik politik ini dimaksudkan untuk menyuksekan strategi terbangunnya kesadaran kolektif dari semua elemen bangsa, terutama yang sudah lebih dulu memiliki akses terhadap kekuasaan untuk kembali berpihak pada kepentingan rakyat yang sejati, dan meminimalisir konflik kepentingan lintas kelompok. PRD menyadari masih harus melalui tahapan yang begitu panjang untuk dapat secara mandiri meraih kekuasaan, karenanya strategi politik intra-parlementer yang dilakukan saat ini adalah sebesar mungkin mencari peluang untuk dapat mempengaruhi kekuasaan dalam mewujudkan transformasi. Pemberlakuan sistem otonomi daerah yang telah memberi ruang pemisah dan otoritas lebih bagi setiap kepala daerah terhadap rakyat dan wilayah kekuasaannya, bagi PRD merupakan landasan material objektif yang mendukung.



Gambar 4.21. Suasana Kerja Politik Atas PRD di Tingkat Lokal
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2012)



Gambar 4.22. Suasana Vergadering dan Diskusi Publik PRD
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2014)

Disamping itu untuk menguatkan legitimasinya di mata publik sebagai partai politik alternatif yang patut didukung, PRD di Lampung secara rutin menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dan mobilisasi massa yang besar secara kuantitas selain demonstrasi. Sifat kegiatannya lebih programatik dan organisasional, yakni berupa *vergadering* atau rapat-rapat akbar maupun launching sikap politik organisasi atau seruan dalam merespon momentum tertentu, semisal saat pemilu presiden yang lalu. Tujuannya agar arah program dan pandangan politik yang diperjuangkan PRD selama ini tidak asing diketahui publik, memperbesar kemungkinan diraihny dukunyan dan simpati massa, baik di luar kalangan PRD, maupun anggota yang berasal dari kalangan awam dan baru terekrut melalui pengorganisasian di basis-basis advokasi yang dimilikinya.

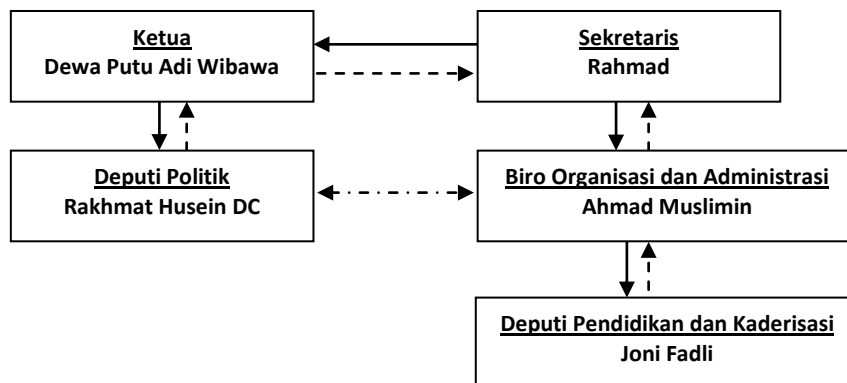


Gambar 4.23. Suasana Rapat Akbar dan Launching Sikap Politik PRD
(Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2013)

PRD Komite Pimpinan Wilayah Lampung, saat ini sekretariatnya berada di Jalan Teuku Umar, Gang Langgar, Nomor 30, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kepemimpinan organisasi hasil Konferensi Wilayah Luar Biasa tahun 2011, yaitu Dewa Putu Adi Wibawa dan Rahmad sebagai ketua dan sekretarisnya. Kerja-kerja organisasi dibantu oleh adanya struktur pengurus yang membidangi Biro Organisasi dan Administrasi, Deputy Politik, dan Deputy Pendidikan Kaderisasi. Sementara titik pembasisan dan pembentukan struktur organisasinya berada di lima daerah yang disebut Komite Pimpinan Kota/ Kabupaten (KPK), yakni: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, dan Kabupaten Way Kanan.



Gambar 4.24. Sekretariat KPW PRD Lampung Tampak Depan (Sumber: Data Primer, 2014)



Gambar 4.25. Bagan Struktur Pengurus KPW PRD Lampung (Sumber: Data Primer, 2015)

Mengingat telah terjadinya perubahan azas dan strategi taktik perjuangan, yakni kembali mempersiapkan diri sebagai partai politik yang legal dan siap untuk mengikuti kontestasi elektoral. PRD di Lampung juga ikut didorong untuk lebih giat melakukan pembesaran tubuh organisasi dengan memaksimalkan perekrutan anggota secara kuantitas. Sementara untuk menjaga kualitasnya, PRD melakukan proses kaderisasi yang intensif dan berjenjang untuk mengintegrasikan nilai-nilai ideologi yang dianutnya kepada setiap anggota yang telah bergabung. Proses pengumpulan data di lapangan menemukan bahwa anggota terdaftar di Lampung mencapai lebih dari 500 orang. Namun, jumlah di atas kertas itu tidak berarti seluruhnya aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pengurus organisasi PRD.

Tabel 4.2. Struktur Pimpinan dan Jumlah Anggota KPK PRD Lampung

No	KPK PRD	Struktur Pimpinan Organisasi	Jumlah Anggota
1	Bandar Lampung	Ketua : Robby Weldan ES Sekretaris : Riskon Fatria	124
2	Pesisir Barat	Ketua : Gusti Kade Artawan Sekretaris : Nurul Ahmad	287
3	Lampung Tengah	Ketua : Nyoman Adi Irawan Sekretaris : Ahmad Loni	243
4	Metro	Ketua : Isnan Subkhi Sekretaris : Rafiq Ambardhie	118
5	Way Kanan	Ketua : Jasurah Sekretaris : Sayuti	136

(Sumber: Data Primer, 2015)

Pola perekrutan anggota yang diselenggarakan oleh PRD di wilayah Lampung sangat mengandalkan pengorganisasian aktivis mahasiswa, atau malah dari kerja-kerja advokasi persoalan sosial-ekonomi seperti konflik agraria, layanan kesehatan dan kependudukan, maupun konflik vertikal lain seperti kasus

penggusuran. Kehadiran PRD ke dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sedang menghadapi permasalahan itu telah mempermudah proses pengenalan profil, sejarah, dan tujuan perjuangan politik yang dicita-citakan oleh PRD. Antusiasme para calon anggotanya pun jika berada dalam situasi seperti itu menjadi lebih tinggi bahkan heroik. Maka tak heran jika perolehan anggota baru dari pola ini secara kuantitas sangatlah besar, ketimbang metode lain. Selain itu, perekrutan juga dilakukan secara tersentral melalui situs <http://www.prd.or.id> dengan menyediakan formulir isian dan petunjuk kontak di daerah-daerah yang memiliki struktur PRD.



Gambar 4.26. Suasana Pendidikan dan Kaderisasi Anggota PRD Lampung (Sumber: Dokumentasi KPW PRD Lampung, 2013)

Namun, sebagaimana juga diakui oleh setiap informan penelitian, kelemahan pola ini adalah: (1) Loyalitas anggota cenderung temporer, karena memudar setelah persoalan sosial-ekonomi yang dihadapinya dan diadvokasi oleh PRD tuntas; (2) Begitupun perekrutan anggota dari aktivis mahasiswa yang cenderung berhenti aktif setelah lulus dan bekerja; (3) Pembasisan struktur organisasi PRD terutama di Kabupaten menjadi tidak merata, lokasinya pun cenderung di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan; (4) Segmentasi keanggotaan PRD menjadi kurang berhasil menyentuh semua kalangan, didominasi oleh mahasiswa, petani atau warga miskin perkotaan.

Tabel 4.3. Periodisasi Struktur Pimpinan KPW PRD Lampung

No	Periode Kepemimpinan KPW PRD Lampung	Struktur Pimpinan Organisasi
1	1997 – 1998	Ketua Komite Persiapan : Bambang Ekalaya
2	1999 – 2001	Ketua : Mahendra Utama Sekretaris : Habiburokhman
3	2001 – 2002	Ketua : Cahyalana Sekretaris : Anwar Sarifudin
4	2002 – 2004	Ketua : Nopriansyah Sekretaris : Aziz Satria Jaya
5	2004 – 2005	Ketua : Ferry Susanto Sekretaris : Ling Ling
6	2005 – 2007	Ketua : Rakhmat Husein DC Sekretaris : Abu Hasan
7	2007 – 2010	Ketua : Badri Sekretaris : Donna Sorenty Moza
8	2010 – 2011	Ketua : Ali Akbar Sekretaris : Abu Hasan
9	2011 – 2015	Ketua : Dewa Putu Adi Wibawa Sekretaris : Rahmad

(Sumber: Data Primer, 2015)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan fokus untuk mengidentifikasi ideologi sosialisme Indonesia dan menganalisis prakteknya oleh kelompok politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) Komite Pimpinan Wilayah Lampung Tahun 2010 hingga 2015 ini. Setelah melalui proses analisis terhadap seluruh data yang diperoleh, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan. Pertama, terkait ideologi sosialisme Indonesia yang diangankan oleh PRD, sebagai berikut:

1. Pergantian azas organisasi pada Kongres Ke-VII tahun 2010 dari sosial demokrasi kerakyatan menjadi Pancasila, bukan berarti PRD telah beralih meninggalkan ideologi sosialisme. Sebaliknya PRD meyakini keputusan tersebut sebagai strategi perjuangan politik, karena azas bukanlah hal yang tabu untuk dievaluasi dan digantikan dalam mekanisme forum kongres. Azas bagi PRD adalah cerminan operasional ideologi yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan objektif di masa tertentu.
2. PRD menginterpretasikan ideologi sosialisme Indonesia yang dianutnya sebagai Pancasila, dengan mengikuti penafsiran Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Penafsiran itu berpusat

pada pandangan Soekarno bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Tri Sila, yakni: socio-nasionalisme, socio-demokrasi, dan ketuhanan. Sementara jika diperas menjadi Eka Sila, adalah gotong royong.

3. Ideologi sosialisme Indonesia yang dimaksudkan PRD menghendaki terwujudnya suatu tata kehidupan masyarakat Indonesia yang seutuhnya adil dan makmur, tanpa adanya penindasan manusia atas manusia, ataupun bangsa atas bangsa.
4. PRD meyakini bahwa esensi universal dari ideologi sosialisme sesungguhnya sangatlah selaras dengan amanat konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu: Pancasila, UUD 1945 yang otentik (sebelum amandemen), maupun tujuan kemerdekaan dalam naskah pembukaan/preamble.
5. Landasan material objektif bagi PRD untuk teguh menganut ideologi sosialisme adalah analisa atas kebutuhan objektif bangsa Indonesia yang sedang menghadapi situasi penjajahan gaya baru dari kepentingan kapitalisme global yang berjudul imperialisme-neoliberal. Situasi ini tidak hanya menyengsarakan rakyat karena lumpuhnya kemandirian ekonomi nasional, tetapi juga merongrong kedaulatan bangsa dan merendahkan posisi negara dalam pergaulan internasional. Begitupun pengaruhnya terhadap kebudayaan nasional yang semakin tidak berkepribadian.
6. Selain itu PRD juga meyakini bahwa nilai-nilai pokok dari ideologi sosialisme sesungguhnya sangatlah tidak asing dan bertolak-belakang bagi kebudayaan masyarakat Indonesia. Semisal budaya gotong royong dan musyawarah untuk bermufakat yang sejak lama sudah ada dalam

kehidupan tradisional masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Nilai-nilai kebudayaan ini dianggap sangat beririsan dan selaras dengan nilai-nilai universal dari ideologi sosialisme, seperti kolektivisme. Terlebih hal ini juga sudah sejak lama diakui secara eksplisit oleh para tokoh pendiri kemerdekaan negara Republik Indonesia.

7. Penyebaran ideologi oleh PRD, terlepas dari ideal tujuannya dan konsisten atau tidak prakteknya, juga menggunakan modus operandi yang sesuai dengan teori analisis ideologi dari John B. Thompson. Lima modus yang dimaksud adalah: (1) Legitimasi, dengan strategi rasionalisasi, universalisasi, dan naratif; (2) Disimulasi, dengan strategi pengalihan, euphemisasi, dan metafora; (3) Unifikasi, dengan strategi standarisasi, dan simbolisasi kesatuan; (4) Fragmentasi, dengan strategi diferensiasi, dan penolakan; (5) Reifikasi, dengan strategi naturalisasi, eternalisasi, nominalisasi, dan pasifisasi.

Kedua, adalah penarikan beberapa poin kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh ideologi sosialisme Indonesia yang dianut dan diusung oleh PRD terhadap gerakan politiknya dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. Sebagai berikut:

1. Gerakan politik PRD dalam periode ini tidaklah bersumber dari tradisi politik sosialis seperti komunisme maupun sosial demokrasi, melainkan sangat terinspirasi oleh tradisi Sosialisme Abad 21 yang berkembang di beberapa negara dalam kawasan Amerika Latin, seperti Venezuela dan Bolivia. Namun, PRD belum dapat dikatakan terpengaruh oleh tradisi

tersebut karena belum adanya bukti terjalin hubungan langsung yang jelas antara kedua pihak.

2. Perspektif kekuasaan yang dikehendaki oleh PRD adalah terwujudnya perubahan sistem ekonomi-politik secara radikal menjadi apa yang disebut dengan demokrasi partisipatoris. Sistem ini diupayakan untuk dapat secara konkret memberikan jaminan akses bagi seluruh elemen rakyat terhadap kekuasaan. Khususnya dalam kerangka mewujudkan kebijakan yang sesuai kebutuhan objektif mayoritas rakyat di dalam suatu negara, maupun kepentingan nasional bagi bangsa tersebut.
3. Kongres Ke-VII Tahun 2010 mengamanatkan organisasi PRD untuk tidak memperjuangkan terwujudnya revolusi sosialisme dengan cara-cara yang radikal dan subversif, melainkan dengan cara-cara legal-konstitusional yang cenderung lebih moderat. Revolusi sosialisme dilakukan dengan jalan damai, yakni melalui strategi intra-parlementer, dengan maksud melakukan transformasi dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri.
4. Keputusan ini sama sekali tidak menghapuskan model perjuangan dengan strategi dan taktik ekstra parlementer. PRD tetap menghendaki massifnya taktik perjuangan melalui berbagai aksi massa dan advokasi konflik kepentingan vertikal yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah yang telah merugikan. Tujuannya untuk membangun ciri khusus atau karakter dari PRD sebagai partai politik gerakan rakyat, berbeda dari parpol mainstream yang cenderung elitis dan terpisah dari problem keseharian masyarakat.

5. Dipertahankannya strategi dan taktik perjuangan ekstra-parlementer ini juga sesuai dengan kehendak PRD untuk mewujudkan cita-cita *machtvorming*. Ini merupakan skema pembangunan kekuatan politik dari massa rakyat yang memiliki kesadaran dan kehendak aktif untuk melakukan perjuangan politik secara kolektif dan partisipatoris.
6. Strategi dan taktik perjuangan intra-parlementer PRD pasca perubahan fundamental di dalam tubuh organisasinya, mendapatkan pengujian yang perdana dengan ikut mengintervensi pemilu legislatif tahun 2014. PRD tidak kembali berkesperimen membentuk partai politik baru, melainkan dengan taktik diaspora politik. Taktik ini dilakukan dengan memilih kader-kader terbaiknya secara elektoral untuk dapat menyebar dan menumpang kepada partai politik legal lain sebagai caleg.
7. Taktik diaspora politik PRD dalam intervensi momentum pemilu tahun 2014 tidak dilakukan secara serampangan. Terdapat batasan yang tegas sekaligus longgar dalam pelaksanaannya di lapangan, seperti melarang diaspora ke dalam Partai Demokrat dengan alasan apapun, ini karena partai yang berkuasa selama dua periode tersebut dipandang sebagai komprador bagi kepentingan imperialisme-neoliberal di Indonesia. Selain itu juga ditekankan harus adanya kesepakatan dan kesepahaman dengan elit-elit politik dari parpol yang ditumpangi agar dapat memberikan akses dan juga dukungan bagi kader PRD apabila meraih kemenangan. Maupun penegasan untuk hanya mengizinkan kadernya maju dalam pemilu legislatif di tingkat kabupaten/kota saja, bukan provinsi maupun nasional. Tujuannya agar tidak memecah konsentrasi kekuatan internal dan dapat

lebih maksimal bekerja dalam kerangka pemenangan kadernya. Selain itu juga diterapkan larangan keras bagi kader-kader terbaiknya yang maju dalam pertarungan elektoral untuk tidak melakukan praktek politik transaksional, mereka harus berangkat dari keadaan yang terbatas dan memaksimalkannya sebagai upaya pendidikan politik bagi rakyat.

8. Strategi dan taktik intra-parlemerter PRD dalam momentum pemilu tahun 2014, meski tidak dapat dikatakan mencapai keberhasilan maksimal, namun juga tidak menemui kegagalan mutlak. Lima puluh orang kader PRD yang menjadi caleg di seluruh Indonesia, dua orang di antaranya berhasil lolos memenangi suara rakyat. Satu orang yang bernama Gusti Kade Artawan merupakan kader PRD Wilayah Lampung yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat melalui Partai Gerindra. Sementara satu orang lainnya adalah kader PRD Wilayah Sulawesi Tengah yang menang melalui Partai Nasdem.
9. Adapun yang menjadi maksud dari taktik diaspora politik dalam merespon momentum pemilu tahun 2014 ialah untuk tidak tinggal diam menanti datangnya tokoh politik pembebas seperti mendiang Soekarno yang menjadi panutan. PRD berusaha untuk menciptakan tokoh-tokoh politik yang berasal dari kader-kadernya sendiri, yang populis dan mendapatkan legitimasi dukungan dari kalangan publik seluas mungkin. Meski menjabat melalui parpol borjuasi, bekal ideologi dan mekanisme penjagaan kader yang dilakukan oleh PRD diyakini dapat berhasil menjaga komitmen dan konsistensi para kadernya, hingga saatnya nanti PRD berhasil menjadi parpol yang mandiri secara elektoral.

10. PRD juga memanfaatkan ruang perebutan kekuasaan di level terendah seperti suksesi Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Kepala Desa setingkat Lurah. Tujuannya sama-sama sebagai ruang pengujian bagi, kader, struktur, maupun kolektif basis organisasi PRD meraih simpati, dukungan dan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Upaya lain yang dilakukan oleh PRD adalah juga dengan memanfaatkan taktik politik atas, seperti membangun jaringan terhadap para tokoh masyarakat, elit politik, media massa, ataupun pemerintahan lokal agar dapat membuka ruang yang sebesar dan seluas mungkin bagi PRD untuk dapat menebar pengaruh maupun ikut menentukan terwujudnya perubahan yang menguntungkan kepentingan rakyat umum.
11. PRD mempersiapkan organisasinya untuk kembali masuk sebagai partai politik peserta pemilu di tahun 2019 sebagai perwujudan komitmennya memperjuangkan ideologi sosialisme. Namun, realitas objektif yang harus diakui bahwa harapan itu akan sulit diwujudkan, mengingat keterbatasan subjektif organisasi PRD, maupun sistem politik yang berlaku di Indonesia masih sangat menyulitkan bagi parpol gerakan rakyat.

6.2. Saran

Keseluruhan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini mendorong peneliti untuk dapat menyusun beberapa poin rekomendasi saran, terutama ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi kelompok politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) sendiri, sebagai berikut:

1. PRD ke depan harus mampu mengembangkan tafsir interpretasi ideologi sosialisme dalam konteks Indonesia lebih matang lagi dengan tidak hanya memperhatikan pengalaman di masa lalu, melainkan juga terhadap perkembangan yang lebih kekinian. Tujuannya agar lebih mudah diserap maknanya oleh seluas mungkin kalangan publik, dan agar juga dapat lebih massif dioperasionalkan di ranah praktek.
2. PRD harus mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan eksistensi gerakan politik organisasinya, demi menyokong gerak maju demokratisasi kehidupan politik di Indonesia. Mengingat praktek demokrasi di Indonesia sejauh ini masih sangat muda dan belum matang, baik secara konseptual maupun praksis.
3. PRD harus mampu menemukan model perekrutan dan kaderisasi yang kuat dan efektif untuk menghadapi fakta hegemoni sistem demokrasi liberal, transaksional, dan prosedural yang saat ini berlaku di Indonesia. Tujuannya agar PRD dapat mensiasati budaya *high cost politic* atau politik biaya tinggi yang berwatak eksklusif karena hanya dapat diakses oleh kelompok berlatar modal material yang besar saja, tanpa dapat dipastikan komitmen keberpihakannya pada kepentingan rakyat.
4. PRD harus sanggup menyerap pelajaran dari setiap pengalaman gerak politiknya sejak awal didirikan, dan terutama di masa setelah terjadinya perubahan fundamental dalam organisasinya di tahun 2010. Pelajaran terpenting ialah dari pengalaman kegagalan-kegagalannya, jika memang teguh berkomitmen untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2019, ataupun momentum pemilu di periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1964. *Sosialisme Indonesia; Perkembangan dan Cita-Citanya*. Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Agger, Ben. 2005. *Teori Sosial Kritis; Mazhab Frankfurt, Karl Marx, Cultural Studies, Teori Feminis, Postmodernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Aidit, Dipa Nusantara. 1962. *Sosialisme Indonesia dan Sjarat-Sjarat Pelaksanaannya*. Jakarta: Akademi Ilmu Sosial Aliarcham .
- Althusser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi; Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jala Sutra.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour. 2010. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Garna, Judistira. K. 2009. *Metoda Penelitian Kualitatif Edisi Ke-III*. Bandung: The Judistira Foundation dan Primaco Akademika.
- Harnecker, Martha. 2007. *Memahami Revolusi Venezuela; Perbincangan Hugo Chavez Dengan Martha Harnecker*. Jakarta: Aliansi Muda Progresif dan Institute for Global Justice.
- Harnecker, Martha. 2015. *Sosialisme; Pengalaman Venezuela/Amerika Latin*. Yogyakarta: Resist Book.
- Huberman, A. Michael & Matthew B. Miles. 2009. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Kasenda, Peter. 2014. *Sukarno, Marxisme & Leninisme; Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

- Lane, Max. 2007. *Bangsa yang Belum Selesai; Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto*. Jakarta: Reform Institute.
- Lane, Max. 2012. *Malapetaka Indonesia; Sebuah Renungan Tentang Pengalaman Gerakan Kiri*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- Lane, Max. 2014. *Unfinished Nation; Ingatan Revolusi, Aksi Massa, dan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- Lebowitz, Michael. A. 2009. *Sosialisme Sekarang Juga*. Yogyakarta: Resist Book.
- Lelland, David. Mc. 2005. *Ideologi Tanpa Akhir*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lorimer, Doug. 2013. *Pokok-Pokok Materialisme Historis; Pandangan Marxis Terhadap Sejarah dan Politik*. Yogyakarta: Bintang Nusantara.
- Lukman, Tatiana. 2013. *Alternatif*. Jakarta: JAKKER.
- Maliki, Zainudin. 2004. *Politikus Busuk; Fenomena Insesnsibilitas Moral Elite Politik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Mertolojo, Soemartono. 1961. *Sosialisme Indonesia; Re-so-pim, Am-pe-ra, Kepribadian Nasional, Tuntutan Kemanusiaan*. Semarang: Mitra Djaja.
- Meyer, Thomas. 2003. *Sosial Demokrasi Dalam Teori dan Praktik; Pengalaman Kaum Sosial-Demokrat Jerman*. Yogyakarta: CSDS.
- Miftahuddin. 2004. *Radikalisasi Pemuda; PRD Melawan Tirani*. Jakarta: Desantara.
- Mintz, Jeanne. S. 2003. *Muhammad, Marx, Marhaen; Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Molyneux, John. 2000. *Karl Marx; Aku Bukan Marxis*. Jakarta: Teplok Press.
- Munasichin, Zainul. 2005. *Berebut Kiri; Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Negoro, Dipo. 2013. *Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme*. Yogyakarta: Bintang Nusantara.
- Newman, Michael. 2006. *Sosialisme Abad 21; Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book.

- Onghokham. 2013. *Sukarno; Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Depok: Komunitas Bambu.
- Plekhanov, G.V. 2006. *Anarkisme dan Sosialisme*. Bandung: Ultimus.
- PRD, KPP. 1997. *Pidato Pertanggungjawaban Politik Partai Rakyat Demokratik ; Sekali Lagi Menuju Demokrasi Multi Partai Kerakyatan*. Jakarta: KPP PRD.
- PRD, KPP. 1999. *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*. Jakarta: KPP PRD.
- PRD, KPP. 2011. *Gerakan Nasional Pasal 33*. Jakarta: Deputi Bidang Kajian dan Bacaan KPP PRD.
- PRD, KPP. 2012. *Modul Pendidikan Dasar Anggota PRD*. Jakarta: Deputi Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KPP PRD.
- PRD, KPP. 2013. *17 Tahun Partai Rakyat Demokratik; Sumbangsih Pemikiran untuk Indonesia*. Jakarta: KPP PRD.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ritzer, George. 2013. *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Saksono, Ign. Gatut. 2009. *Neoliberalisme vs Sosialisme; Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Forkoma PMKRI.
- Soyomukti, Nurani. 2007. *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*. Yogyakarta: Resist Book.
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Revolusi Sandinista; Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neo-Liberalisme*. Yogyakarta: Garasi.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Sosiologi; Dasar Analisis, Teori, dan Pendekatan*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Sudjatmiko, Budiman. 2013. *Anak-Anak Revolusi Buku 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudjatmiko, Budiman. 2014. *Anak-Anak Revolusi Buku 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Franz Magnis. 2005. *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Bagong. Muhammad Asfar. & Rudi Pranata. 1995. *Gejolak Arus Bawah, 1988 - 1993*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syafarudin. dkk. 1997. *Menembus Arus; Gerakan Mahasiswa dan Perspektif Reformasi dari Lampung*. Lampung Selatan: TIM PENYUNTING.
- Takwin, Bagus. 2009. *Akar-Akar Ideologi; Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Thompson, John B. 2014. *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi – Ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Thompson, John B. 2015. *Kritik Ideologi Global; Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Townshend, Jules. 2003. *Politik Marxisme*. Yogyakarta: Jendela.
- Uhlen, Anders. 1998. *Oposisi Berserak; Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Weber, Max. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme; Sejarah Kemunculan dan Ramalan Tentang Perkembangan Kultur Industrial Kontemporer Secara Menyeluruh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Wilson. 2012. *Orang-Orang Yang Berlawan; Beragam Catatan Dari Soekarno Hingga Wiji Thukul*. Jakarta: Opressiabook.
- Winters, Jeffrey A. 1999. *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Djambatan.

Skripsi / Tesis :

Jz, M. Harya Ramdhoni. 2004. *Kritik Marxisme-Leninisme Terhadap Kegagalan Partai Komunis Indonesia Dalam Ideologisasi Komunisme di Indonesia*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung.

Pranindita, Kusumawangi. 2009. *Pengaruh Marxisme Dalam Pemikiran Marhaenisme Soekarno*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung.

Saptamaji, M. Rolip. 2014. *Politik Sayap Kiri di Indonesia; Proses Politik Partai Rakyat Demokratik 1999 – 2009*. Program Pasca Sarjana Ilmu Politik: Universitas Padjadjaran.

Sumber Lain :

DETIK FINANCE, 2014. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2013/10/28/123022/2397158/4/anggaran-2014-defisit-rp-175-t-pemerintah-siap-tambah-utang-lagi>. Minggu 17 Agustus 2014.

LAMPUNG POST, 2014. Diakses dari Rubrik Buras Halaman 8. Jumat 22 Agustus 2014.

MERDEKA, 2014. Diakses dari <http://www.merdeka.com/uang/lipi-digaji-kecil-50-persen-pekerja-indonesia-masih-miskin.html>. Senin 11 Agustus 2014.